

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

KETAHANAN PANGAN DALAM KRISIS GEOPOLITIK

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

KETAHANAN PANGAN DALAM KRISIS GEOPOLITIK

KETAHANAN PANGAN DALAM KRISIS GEOPOLITIK

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan Agustus 2024

UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

Luthfi Assyaukanie, Ph.D.

Sadyo Kristiarto, S.P.

Anggiasari Puji Aryatie, S.S.

Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.

Sekapur Sirih

BUKU ini berisi enam topik diskusi tentang pangan dengan rentang topik yang panjang mulai dari ketahanan pangan di masa pandemi hingga tata kelola sampah makanan yang dibahas di Forum Diskusi Denpasar 12.

Bab I berisi pemikiran Dr. Bayu Krisnamurti, Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., dan MG Westri Kekasih Susilowati, S.E., M.E. mengenai ancaman krisis pangan dampak perang Ukraina-Rusia.

Bab II menyajikan pandangan Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., Muhammad Luthfi, Febrio Nathan Kacaribu, Ph.D., Mohammad Arsyad Rasjid Prabu Mangkuningrat, dan Franciscus Welirang tentang pengaruh geopolitik dan geostrategi dunia terhadap pangan nasional.

Bab III memuat pemikiran dr. Ni Made Diah Permata Laksmi D., M.K.M., Prof. drh. Muhammad Rizal Damanik, M.RepSc., Ph.D., Prof. Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si., dan Agnes A. Mallipu mengenai problem gizi dan pengelolaan makanan.

Bab IV berisi pandangan Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng., Dr. Lukmanul Hakim, Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si., dan H. Charles Meikyansah perihal menakar ketahanan pangan di masa pandemi dan ancaman resesi.

Bab V berisi pemikiran Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., dan Dr. Rachmi Widiriani mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi puncak ancaman El Nino di 2023.

Bab VI berisi pandangan Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M., Vinda Damayanti, dan Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa tentang tata kelola sampah makanan Indonesia.

Perbincangan di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu dirangkum menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilaris U. Gani. Seperti buku-buku yang telah diterbitkan, buku ini pun diperiksa secara kolektif melalui *zooming* dengan melibatkan ketiga penulis yang dikoordinasikan Ade Siregar.

Forum Diskusi Denpasar 12 terselenggara secara teratur berkelanjutan setiap Rabu berkat kerja tim yang solid. Topik diskusi, pembicara, pembahas ditentukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., bersama Arief Adi Wibowo, S.Si, M.T., Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Lutfhi Mutty, M.Si, serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwan-syah, S.Sos., M.A.

Adapun teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual ditangani Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Uman, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Tim Tenaga Ahli lainnya, Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP, M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd. bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi pembicara dan pembahas sesuai otoritas ataupun kompetensi masing-masing.

Forum Diskusi Denpasar 12 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, didahului menyanyikan lagu *Indonesia Raya*, lalu dibuka dengan sambutan Lestari Moerdijat. Bergantung pada topik, diskusi dipimpin moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie, atau Anggiasari Puji Aryatie, atau Radityo Fajar Arianto, atau Irwan-syah. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

Menyoal Kedaulatan Pangan

BERBAGAI survei mengenai perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Jawa Tengah menghasilkan temuan bahwa pemberian sembako oleh caleg ialah yang paling diharapkan. Temuan itu menunjukkan ‘urusan perut’ masih menjadi masalah utama bagi kebanyakan rakyat.

Oleh karena itu, kiranya dapat dimengerti pandangan yang mengatakan stabilitas politik rawan terganggu bila ‘urusan perut’ tak terpenuhi akibat pasokan pangan (yakni beras) buruk dan harganya tak terjangkau kebanyakan rakyat.

Ketersediaan beras yang aman masih bergantung pada impor. Ini kenyataan di masa normal, terlebih di masa tak normal-- buah belajar dari masa pandemi covid 19 dan dampak perang Ukraina-Rusia.

Di masa pandemi, Vietnam, misalnya, terpaksa mengurangi ekspor beras. Di saat pembatasan sosial, dua pertiga pekerja diminta untuk tinggal di rumah, menyebabkan kurangnya personel yang melayani aktivitas produksi dan ekspor.

India, pengekspor beras terbesar di dunia, malah menghentikan ekspor beras setelah pandemi covid-19 berlalu. Keputusan itu diambil pada 20 Juli 2023. Ketika itu harga beras di dalam negeri naik. Padahal menjelang pemilu legislatif yang berlangsung 7 November hingga 4 Desember 2023.

Beras untuk ekspor itu digunakan untuk menggelontor pasokan be-

ras di dalam negeri sehingga harga beras untuk rakyat sendiri turun. Sebuah keputusan politik sangat rasional ‘demi perut’ 1,4 miliar rakyat yang tentu berdampak amat sangat positif dalam tahun politik di dalam negeri, sekalipun berakibat tak enak bagi negara yang kebutuhan berasnya bergantung pada India.

Indonesia membatalkan rencana impor 1 juta ton beras dari India. Sebagai gantinya, pemerintah menugasi Bulog untuk mengimpor dari Thailand dan Vietnam.

Geopolitik internasional juga berpengaruh terhadap pasokan pangan dunia. Perang Ukraina-Rusia, misalnya, mengakibatkan Ukraina sebagai negara penghasil gandum terbesar di dunia tak dapat mengekspor hasil pertaniannya itu ke berbagai negara yang membutuhkan. Sebuah statistik menunjukkan 25% impor gandum kita berasal dari Ukraina.

Ditinjau dari berbagai sudut pandang dan perspektif, jelas dan tegas bahwa kedaulatan pangan, yakni ketahanan pangan bersandarkan pada kemampuan kita berswasembada pangan, harus diwujudkan oleh siapa pun yang menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara RI.

Topik kedaulatan pangan amat sering diperbincangkan. Sepanjang belum terwujud, sepanjang itu pula harus terus digelorakan sampai kita sebagai negara agraris mampu berswasembada pangan berkelanjutan. Berkelanjutan, dari musim ke musim. Bukan hanya semusim panen. Itulah spirit yang dicanangkan di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 yang dihimpun di dalam buku ini.

Saya berterima kasih kepada para pembicara, penanggap, dan tentu

audiens yang terus setia mengikuti Forum Diskusi Denpasar 12 melalui *zooming* sejak masa pandemi covid-19 sampai sekarang kita kembali hidup normal.

Jakarta, 5 Desember 2023



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Metode Jepang Dipakai India

MENANAM padi ada ilmunya. Orang Jepang bertradisi merunduk memberi rasa hormat. Ilmu padi bilang kian berisi kian merunduk. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati.

Ilmu Jepang menanam padi digunakan India. Hasilnya India negara pengekspor terbesar beras di dunia. Saya kaget mendapat pengetahuan itu, bahwa India menjadi hebat dalam hal beras antara lain berkat menggunakan metode Jepang. ‘Binatang’ apa pula itu gerangan?

Sebuah sumber bilang begini. “Budi daya padi metode Jepang sangat diadaptasi di India karena metode tersebut mencakup penggunaan benih varietas unggul. Pemeliharaan awal bibit dilakukan di persemaian dan dilindungi dari infeksi awal, kemudian dipindahkan ke lahan dan ditanam dalam barisan untuk memudahkan penyiangan. Ini menggunakan pupuk dosis tinggi. Hasil yang diperoleh melalui cara ini sangat tinggi.”

India juga menggunakan metode transplantasi. Metode ini dilakukan di daerah dengan kesuburan tinggi, curah hujan tinggi. Curah hujan di India memang melimpah. Teknik ini melibatkan pembiakan bibit di persemaian dan setelah 4-5 minggu bibit ditanam di lahan. Seluruh proses dilakukan dengan tangan. Oleh karena itu, metode ini sangat sulit dan membutuhkan masukan yang besar. “Tetapi pada saat yang sama, ini memberikan hasil tertinggi.”

Menanam padi di Jepang dibahasakan sebagai seni, *rice paddy art* atau *tambo art*. Ada dua kata dalam bahasa Jepang berkaitan dengan

sawah. Dua kata itu ialah ‘*tanada*’ dan ‘*senmaida*’. Kata pertama merujuk pada ‘teras padi’, sedangkan kata kedua merujuk pada ‘seribu teras padi’. Pandanglah hamparan seribu teras padi itu, sejauh mata memandang. Kiranya terasa ada seni bersemi di situ.

Seni sawah merupakan salah satu bentuk seni pertanian yang dibuat dengan menanam bibit padi berbagai warna di sawah untuk menciptakan gambar atau pola tertentu. Ketika padi dengan warna berbeda-beda itu tumbuh, terbentuklah lukisan sawah yang memesona. Seni ini dikenal sebagai *shokudo zushi* (secara harfiah berarti ‘gambar sawah’). Contoh seni sawah paling awal diketahui berasal dari zaman Edo (1603-1868). Namun, seni ini menjadi lebih populer pada abad ke-20.

Seni sawah itu kemudian menjadi tujuan wisata di Jepang. Inakade yang berada di Prefektur Aomori merupakan salah satu wilayah seni sawah terkemuka yang dijual biro perjalanan Jepang di pasar internasional.

Semua kutipan dan cuplikan itu tak bermaksud mengajar burung terbang atau ikan berenang. Semua itu baiklah dipandang sebagai ketakjuban seorang awam dalam hal pertanian padi, yang terganggu pertanyaan ‘kok bisa India menjadi pengekpor beras terbesar di dunia’.

Teras padi di Bali elok rupanya. Indah dipandang. Di laman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava, Republik Slowakia, terbaca artikel berjudul ‘Pesona Teras Sawah, Tegallalang, di Ubud, Bali’. Dalam bahasa Indonesia, bukan Inggris atau Prancis. Sepertinya bukan untuk menarik turis asing. Mengherankan, dari kedutaan RI nun jauh di be-

lahan dunia sana, orang Indonesia diperkenalkan dengan keindahan sawah di Bali.

Fakta itu pun mengganggu saya, menambah kegusaran, kapan pesona sawah seperti di Ubud itu dibuat lebih banyak di Tanah Air, menjadi tujuan wisata masif seperti di Jepang. Kapan pula kita berkedaulatan pangan, bahkan menjadi pengekspor beras, antara lain berkat kemampuan belajar seperti India, menggunakan metode Jepang.

Jakarta, 5 Desember 2023



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	7
Menyoal Kedaulatan Pangan	11
Metode Jepang Dipakai India	15

MENGANTISIPASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DAMPAK PERANG UKRAINA-RUSIA 22

1. Latar Belakang: Perang Rusia-Ukraina Picu Harga Pangan Meroket
2. Menyiapkan Kebijakan Antisipatif
3. Recovery Pandemi Covid-19 tidak Seimbang
4. Indeks Ketahanan Pangan Memburuk
5. Perlu Intervensi Ubah Pangan Pokok
6. Mengembalikan Semangat Petani

PENGARUH GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DUNIA TERHADAP PANGAN NASIONAL 56

1. Latar Belakang: Ancaman Krisis Global
2. Kerja Politik Harus Berpijak pada Nilai-Nilai Kebangsaan
3. Ketahanan Pangan Nasional Rawan, tetapi Belum Krisis
4. Pertanian Menjadi Bantalan Ekonomi
5. Pacu Pertumbuhan Melalui Kebijakan yang Konsisten
6. Menjadi Pemenang di Masa Krisis
7. Perlu Gerakan Nasional Majukan Pertanian

III PROBLEM GIZI DAN PENGELOLAAN MAKANAN 112

1. Latar Belakang: Dari Anemia sampai Stunting
2. Menyiapkan SDM Sehat Berkualitas
3. Akses terhadap Pangan Bergizi
4. Literasi dan Edukasi Gizi
5. Beban Ganda Gizi

IV MENAKAR KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI DAN ANCAMAN RESESI 142

1. Latar Belakang: Saat Kelaparan Mengancam Penduduk Bumi
2. Mengantisipasi Efek Pandemi
3. Sektor Pertanian Jadi Andalan
4. Mencari Solusi Over Stock Produk Pertanian
5. Antara Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Diversifikasi Pangan
6. Capaian Pertanian dan Mengambinghitamkan Covid-19
7. Belajar dari Vietnam dan Kuba

V KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI PUNCAK ANCAMAN EL NINO 2023 196

1. Latar Belakang: Adaptasi Hadapi Dampak El Nino
2. Mengantisipasi Kemarau Panjang
3. Perubahan Iklim Lebih Menakutkan daripada Pandemi Covid-19
4. Memantau Fenomena Iklim akibat El Nino
5. Upaya Memperkuat Cadangan Pangan

Catatan Moderator 250

Biodata Tim Ahli 262

VI

TATA KELOLA SAMPAH MAKANAN INDONESIA

1. Latar Belakang: Sampah Makanan 48 Juta Ton Per Tahun
2. Paradoks dan Ironi
3. Perlu Kolaborasi Global
4. Kerugian hingga Rp500 Triliun
5. Harga Pangan Memihak Petani
6. Penguatan Regulasi

232

Catatan Moderator

262

Biodata Tim Ahli

268



**Mengantisipasi
Ancaman Krisis
Pangan Dampak
Perang Ukraina-Rusia**

1 Latar Belakang: Perang Rusia-Ukraina Picu Harga Pangan Meroket

PANGAN dan ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Karena itu, krisis pangan dunia menjadi salah satu ancaman bagi semua negara. Ekonom Amerika Serikat, Nouriel Roubini, mengatakan meroketnya harga komoditas pangan bisa menjadi sumber ketidakstabilan, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga politik.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak Conference of Food and Agriculture pada 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate, and suitable supply of food for everyone*.

Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, tetapi umumnya mengacu pada definisi Bank Dunia (1986) serta Maxwell dan Frankenberger (1992), yakni akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*).

FAO menyatakan perang Ukraina-Rusia bertanggung jawab atas kenaikan 17,1% harga biji-bijian, termasuk gandum dan lainnya seperti *barley* dan jagung. Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang sekitar 30% dan 20% dari ekspor gandum dan jagung global. Kenaikan harga terbesar lainnya terjadi pada minyak nabati.

Indeks harga naik 23,2%, didorong oleh kebutuhan yang lebih tinggi untuk minyak biji bunga matahari. Ukraina adalah peng ekspor minyak bunga matahari terkemuka di dunia. Adapun Rusia ialah yang kedua.

Lonjakan intervensi perdagangan pada Maret 2022 bisa menjadi tanda adanya gangguan pasokan ke depan. Pembatasan ekspor makanan yang diberlakukan pada Maret hampir dua kali lipat dari jumlah dalam dua bulan sebelumnya.

Pembatasan ekspor yang mengurangi pasokan global telah menyebabkan harga lebih tinggi. Kondisi itu memicu pembatasan ekspor baru untuk menahan tekanan harga domestik, menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) pada harga internasional.

Jika salah satu dari lima pengeksportir gandum teratas melakukan larangan ekspor, efek kumulatif yang diperkirakan terjadi

ialah meningkatnya harga gandum dunia sekitar 13%, juga lebih banyak lagi jika yang lain bereaksi.

Selain pangan, hal lain yang perlu diantisipasi ialah kenaikan harga pupuk. Rusia adalah eksportir terbesar kebutuhan pupuk global. Terganggunya rantai pasok karena keterlambatan dan tingginya biaya logistik serta transportasi akibat gangguan pengiriman via wilayah Laut Hitam bisa memicu lonjakan harga pupuk.

Analisis di FAO memperkirakan biaya pupuk dapat meningkat 30% di banyak negara akibat krisis Ukraina itu. ■



Masalah pangan yang dihadapi saat ini, tidak semata persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global yang dihadapi seluruh umat manusia.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Menyiapkan Kebijakan Antisipatif

SAAT membuka Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) pada Rabu, 13 April 2022, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, sebelum menghadapi krisis kemanusiaan baik yang dipicu pandemi covid-19 maupun konflik Ukraina-Rusia, sebetulnya sudah dirasakan bahwa dunia belum berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi serta segala bentuknya hingga 2030.

Sejumlah organisasi dunia, kata Lestari yang biasa disapa Rerie, sudah membuat analisis komprehensif tentang ancaman dan indikasi kerawanan pangan serta bentuk malnutrisi.

Masalah pangan yang dihadapi saat ini, kata Rerie, tidak semata persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global yang

dihadapi seluruh umat manusia. Karena itu, mau tidak mau kebijakan antisipatif perlu disiapkan untuk menghadapi ragam ancaman termasuk ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, psikis, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang aman dan bergizi.

Secara khusus FAO mengeluarkan indeks untuk mengukur perubahan harga sejumlah komoditas pangan internasional setiap bulan. Sejak dimulainya pengukuran indeks pada 1990, indeks Februari 2020 ialah level tertinggi.

Inilah keadaan yang dihadapi secara global. Tindakan pembatasan ekspor mengurangi pasokan global yang memicu lonjakan harga. Sebab itulah, selain pangan, lonjakan harga pupuk juga perlu dilihat mengingat Rusia adalah eksportir pupuk global terbesar.

Menurut Rerie yang juga legislator Partai NasDem, Indonesia belajar dari berbagai konflik global untuk memperkuat elemen terkait agar memberi jaminan ketahanan pangan setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi. ■



Demand recovery lebih cepat daripada *supply*, dan itu terjadi pada kenaikan harga angkutan, keterbatasan tenaga kerja, kenaikan harga energi, dan sebagainya.”

Bayu Krisnamurthi

Wakil Menteri Pertanian 2009-2011

3 Recovery Pandemi Covid-19 tidak Seimbang

KENAIKAN harga sejumlah komoditas adalah fakta selama masa pandemi covid-19. Bahkan kenaikan harga itu masih terus terjadi ketika pandemi mulai mereda dan memasuki masa pemulihan (*recovery*). Di sisi lain, inflasi masih cukup tinggi.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Wakil Menteri Pertanian 2009-2011 Bayu Krisnamurthi mengatakan inflasi Indonesia hingga Maret 2022 sebesar 2,64%. Padahal inflasi *year on year* (yoy) 2021 hanya 1,87%, pada 2020 sebesar 1,68% yoy, dan di 2019 mencapai 2,27% yoy. Adapun inflasi yang berhubungan dengan pangan pada tiga bulan pertama 2022 itu sebesar 3,25% yoy.

Jadi, tambah Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 itu, tam-

paknya kita harus bersiap menghadapi inflasi tahun ini mungkin akan lebih besar dari perkiraan pemerintah di kisaran 3% plus minus 1% menjadi kira-kira 4%. “Saya memperkirakan mungkin menjadi 5% atau 6% dengan doa semoga tidak terjadi. Tapi saya khawatir. Kita perlu mempersiapkan diri menghadapi inflasi sebesar itu,” kata Bayu.

Ekonom itu menegaskan penyebab kenaikan harga ialah adanya *recovery* pandemi covid-19 yang tidak seimbang. Jadi *demand recovery* lebih cepat daripada *supply*, dan itu terjadi pada kenaikan harga angkutan, keterbatasan tenaga kerja, kenaikan harga energi, dan sebagainya. *Supply* merespons lebih lambat atas kenaikan.

Harga gas naik mengakibatkan harga pupuk naik 131%. Kondisi iklim yang tidak mendukung membuat produksi beberapa komoditas tidak optimal di seluruh dunia. Dan, terakhir ialah perang Rusia-Ukraina memperparah dampak yang sebelumnya sudah ada.

Masih menurut Bayu, harga kedelai cenderung turun sehingga ada harapan mulai Mei sampai Agustus harga kedelai mendekati harga normal kembali.

Kalau membandingkan dengan harga beberapa minyak nabati maka seluruhnya naik. Harga *rapeseed*, *canola*, *soybean* naik di kisaran 180%-200%, dan itu memengaruhi harga minyak sawit naik cukup besar.

Harga komoditas yang lain juga mengikuti, seperti gula sudah



MISUSANTO

Pedagang menata barang dagangannya di Pasar Tebet, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi Indonesia hingga Maret 2022 sebesar 2,64%. Padahal inflasi *year on year* (yoy) 2021 hanya 1,87%, pada 2020 sebesar 1,68% yoy, dan di 2019 mencapai 2,27% yoy.

naik 51%. Akibatnya harga gula di dalam negeri juga diproyeksikan naik meskipun sebenarnya setelah Mei ada prospek tekanan sedikit rendah karena musim giling di dalam negeri. Akan tetapi, prediksi itu tidak terlalu istimewa, hanya cukup menambah stok di dalam negeri.

Harga jagung, masih menurut Bayu, juga berada di situasi yang tidak baik yakni naik 94% dan itu akan berdampak kepada

para peternak melalui peningkatan harga pakan.

Bayu memperkirakan gandum akan menjadi masalah serius. Ketika terjadi invasi Rusia pada minggu pertama, harga gandum naik luar biasa dari sekitar US\$290 menjadi kurang lebih US\$500. Namun, yang agak aneh kenapa setelah invasi mulai berjalan, harganya justru turun. Ini fenomena perdagangan, tapi kita akan melihat pada minggu-minggu berikut ini mungkin harga gandum akan naik lagi, bukan karena masalah produksi, tapi persoalan blokade Rusia yang akan memengaruhi harga.

Menurut Bayu, harga beras internasional cenderung turun. Produksi beras akhir 2021 dan awal 2022 secara internasional sedang baik sehingga harganya cenderung turun sekitar 10% di pasar internasional.

Sebaliknya harga *crude oil* masih naik dan sudah mencapai 250%. Seperti diketahui, kalau harga *crude oil* naik, berarti harga hampir semua produk ikut naik. Yang pasti naik ialah harga pupuk. Jadi harga pupuk benar-benar mengkhawatirkan untuk masa yang akan datang.

Kalau dilihat dari sisi stok, kata Bayu, sebenarnya Indonesia memiliki persediaan. Akan tetapi, kalau dilihat dari kecukupan, sangat banyak produk kita yang stoknya hanya bertahan 1-1,5 bulan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah melakukan dua hal. Pertama, kata Bayu, membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan bantuan langsung tunai (BLT).

Kedua, subsidi komoditas beberapa target konsumen seperti minyak goreng curah. Langkah itu sudah tepat, hanya bagaimana efektivitas dan seberapa jauh kemampuan pembiayaan untuk itu. ■



Proporsi gandum sebagai pangan pokok yang pada 1970-an hampir 0% melonjak menjadi 18,3% pada 2010 dan 26,6% pada 2020.”

Dwi Andreas Santosa

Guru Besar Fakultas Pertanian,
Institut Pertanian Bogor (IPB University)

4 Indeks Ketahanan Pangan Memburuk

UKRAINA dan Rusia tercatat sebagai produsen dan peng-ekspor terbesar kebutuhan gandum dunia yang dipasok ke 50 negara termasuk Indonesia. Selain itu, kedua negara juga pemasok terbesar kebutuhan jagung dunia. Ukraina pun tercatat sebagai produsen minyak bunga matahari terbesar.

Ketika berkecamuk perang Rusia-Ukraina, kata Guru Besar Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB University), Dwi Andreas Santosa, sepertiga (1/3) sisa gandum untuk ekspor tidak bisa dikeluarkan. Di lain sisi, gagal tanam dan gagal panen di musim semi dan panas 2022 mengakibatkan produksi gandum Ukraina turun 55%.

Dampak perang Rusia-Ukraina, yakni adanya sanksi dunia bagi Rusia, menyebabkan pasokan alat-alat pertanian dan produk biji-bijian tidak bisa diekspor sehingga minat petani memproduksi



MIRAMDANI

Petani membajak sawah untuk ditanami padi pada lahan pertanian di wilayah Serang, Banten, Senin (13/11/2023). Produksi padi 20 tahun terakhir cukup mengkhawatirkan karena hanya meningkat 0,67% per tahun, sementara itu pertumbuhan penduduk 1,3%-1,4%.

si biji-bijian menurun. Akibatnya, kata Andreas, dunia kehilangan potensi produksi gandum sebesar 60 juta ton, jagung 30 juta ton, juga 10,5 juta ton *barley* dan minyak nabati.

Yang juga mengkhawatirkan, kata Andreas lagi, ialah posisi Brasil sebagai importir terbesar pupuk dunia sekaligus produsen terbesar kedelai. Kenaikan harga pupuk akan berpengaruh pada produksi kedelai negara tersebut sehingga harapan harga kedelai

akan turun tidak terwujud.

Lalu bagaimana situasi dan kesiapan Indonesia menghadapi krisis pangan 2022-2023? Menurut Andreas, *food security index* atau indeks ketahanan pangan kita terus memburuk dalam tiga tahun terakhir.

Produksi padi 20 tahun terakhir, tambah Andreas, cukup mengkhawatirkan karena per tahunnya hanya meningkat 0,67%, padahal pertumbuhan penduduk 1,3%-1,4%. Apalagi pada saat ini produksi padi justru menurun 0,35% per tahunnya.

Impor pangan dalam 10 tahun terakhir, ungkap Andreas, melonjak hampir 20 juta ton dari 8 juta ton pada 2018. Ini untuk delapan komoditas pangan utama menjadi 27,6 juta ton.

Andreas memperkirakan kenaikan impor pangan itu terkait politik pangan karena tidak bisa terlepas dari keputusan penandatanganan *letter of intent* (LoI) oleh IMF pada Januari 1998. Ada empat pokok dalam LoI IMF itu, yaitu penghapusan tarif impor bahan pangan hingga 0%, pencabutan monopoli impor pangan oleh Bulog, pembatasan peran Bulog dalam mengelola pangan, dan larangan memberi kredit likuiditas kepada Bulog.

Mengapa produksi beras tidak mampu melampaui produk pertumbuhan penduduk, bahkan jauh di bawah pertumbuhan penduduk? Menurut Andreas, itu karena impor gandum oleh Indonesia sudah mencapai 11,7 juta ton hingga 2021, nomor dua setelah Mesir. Jadi proporsi gandum sebagai pangan pokok yang pada 1970-an hampir 0% melonjak menjadi 18,3% pada 2010 dan

26,6% pada 2020. Adapun pada 2021 mungkin sudah di atas 27%.

Bila kecenderungan ini terus terjadi, kata Andreas lagi, sebelum 100 tahun perayaan kemerdekaan Indonesia, jangan-jangan 50% kebutuhan pangan pokok kita tergantikan oleh gandum. Nilai impornya juga melonjak dari hanya US\$6,8 miliar menjadi US\$9 miliar.

Beberapa waktu lalu pernah ada ide kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Saat membantu Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan pertanian pada 2015-2019, cerita Andreas, pihaknya diminta merancang bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Walaupun sekarang petani semakin terpuruk, beberapa rekomendasi sudah dilakukan secara masif, seperti perbaikan irigasi, juga pembangunan dam dan infrastruktur lain.

Ada pula usul lain, misalnya bank agro maritim, lalu asuransi pertanian sudah dilakukan walaupun belum masif, penggantian subsidi benih pupuk belum dilakukan, tapi akan digantikan menjadi *cash transfer*. Adapun raskin sudah melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) karena tingkat kebocoran raskin mencapai 40%. Kemudian badan otoritas pangan sudah terbentuk menjadi Badan Pangan Nasional. ■



Mitigasi krisis pangan sebenarnya multidimensional. Bisa ditelusuri dari aktivitas ekonomi, karena masalah pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga aktivitas distribusi dan konsumsi.”

MG Westri Kekalih S

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis,
Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah

5 Perlu Intervensi Ubah Pangan Pokok

PERUBAHAN global yang paling nyata akibat perang Rusia-Ukraina ialah harga-harga melonjak naik yang sekaligus mempertegas adanya krisis pangan global. Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menunjuk harga biji-bijian, gandum, dan minyak nabati naik cukup liar. Juga harga daging sapi dan daging ayam naik tajam, meski harga beras masih stabil.

Di dalam negeri, kata Bustanul, harga pangan pokok domestik yakni beras masih stabil meski luas lahan berkurang. Harga beras global yang cukup aman membuat situasi dalam negeri tidak bergolak.

Perang Rusia-Ukraina mendorong harga pupuk global naik luar biasa dan pasti berdampak pada Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan subsidi langsung bagi petani. Pada 2022

dilakukan *pilot project* cara mengomunikasikan secara baik ketika harga pupuk tidak lagi Rp2.150/kg, tapi Rp11.000/kg.

Krisis pangan global sebenarnya sudah diingatkan FAO sejak 2019. Menurut MG Westri Kekalih S, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis, Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, FAO menegaskan perlu pertumbuhan produksi pangan global minimal 70% agar tidak terjadi krisis pangan. Jadi, pada 2011 itu penduduk dunia rawan pangan sudah mencapai 1,02 miliar.

Permasalahan pangan nasional tidak jauh berbeda dengan persoalan pangan dunia. Selain karena laju pertumbuhan penduduk secara nasional Indonesia masih relatif tinggi pada kisaran 1,5%, juga terjadi alih fungsi lahan, degradasi, dan permasalahan lain.

Menurut Westri, mitigasi krisis pangan sebenarnya multidimensional. Bisa ditelusuri dari aktivitas ekonomi, karena masalah pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga aktivitas distribusi dan konsumsi.

Perang Ukraina-Rusia memang nun jauh di sana, tetapi semua terdampak. Indonesia tidak terkecuali. Lalu ada pandemi covid-19 yang saat ini isunya mulai mereda dari sisi kesehatan, tetapi kita masuk pada status endemik.

Isu domestik yang tidak kalah penting, kata Westri, ialah ketergantungan terhadap impor, baik impor bahan maupun impor jadi. Selain beras, masih ada impor kedelai, daging, dan lain-lain. Artinya ketergantungan terhadap impor masih tinggi. Isu-isu itu

akhirnya bisa membawa kita masuk ke situasi krisis pangan.

Dari *Buku Putih Pangan*, kata Westri, terlihat jelas bahwa kebutuhan pangan masyarakat lebih tinggi dari kapasitas produksi pangan dalam negeri. Itu sebabnya selalu ada ketergantungan pada impor.

Pola konsumsi pangan di Indonesia, tambah Westri, masih sangat didominasi oleh beras. Untuk mengatasi itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya diversifikasi, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan keterjangkauan. Meski demikian, diversifikasi pangan harus tetap dilakukan secara terus-menerus. Perlu ada intervensi untuk mengubah pola perilaku konsumsi pangan pokok beras. ■



Untuk mencapai ketahanan pangan tidak boleh mengecewakan petani, baik petani sebagai produsen maupun sebagai konsumen.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

6 Mengembalikan Semangat Petani

PEREKONOMIAN Indonesia memang masih memiliki banyak kelemahan. Perang Ukraina-Rusia memperburuk keadaan dan membuat kita terlambat menangani permasalahan secara khusus di sektor pangan.

Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, mengatakan pemerintah memang harus secara ketat menangani harga berbagai komoditas termasuk pangan. Kementerian Perdagangan selama tiga tahun berturut-turut berhasil mengendalikan harga. Kenapa? Karena ketika itu pemerintah menangani hingga detail di lapangan sampai ke upah kuli panggul dan segala macam struktur biaya. Dengan begitu, pemerintah memiliki data lengkap dan bisa ‘memaksa’ pelaku pasar mengendalikan marginnya. Ini yang sekarang tidak terjadi.

Kedua, kata Martin, harus diakui koordinasi antarkemen-



MIMOH IRFAN

Warga antri membawa jeriken, botol, dan wadah untuk membeli minyak goreng tanpa kemasan yang dijual murah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Operasi pasar minyak goreng tanpa kemasan bertujuan menormalkan harga jual minyak goreng.

terian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan daerah juga kurang baik. Legislator NasDem itu memberikan contoh dalam penanganan persoalan minyak goreng, pemerintah daerah sering tidak dilibatkan sejak awal sehingga mereka tidak tahu ketika pemerintah pusat ingin melakukan kendali.

Contoh lain, tambah Martin, sejak Desember 2021, Komisi VI DPR sudah mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk turun

ke masyarakat memantau minyak goreng. Ternyata mereka baru turun bersama kepolisian pada Maret. Jadi ada rentang waktu di mana respons itu terlihat tidak maksimal dan koordinasi antarke-
menterian/lembaga juga tidak terjadi.

Presiden menggelar rapat terbatas dan memutuskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp14.000. Akan tetapi, ketika dicek di wilayah Jawa Barat, khususnya di Bogor, tidak tersedia minyak goreng curah dan kalau ada harganya jauh di atas HET yakni mencapai Rp23.000.

Karena itu, kata Martin, ada dua hal yang harus dilakukan. Dalam jangka pendek dipahami jika Presiden mengambil kebijakan BLT untuk minyak goreng. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana anggaran pemerintah sanggup dan berapa komoditas yang harus dibuat BLT? Adapun dalam jangka menengah dan panjang harus dibuka kembali diskusi tentang perlunya *buffer stock policy* (menjaga harga pasar).

Di masa pascareformasi ini harus didiskusikan lagi apa kekurangan lembaga seperti Bulog di masa lalu? Lembaga *buffer stock* sebenarnya sangat diperlukan untuk bisa menjamin stabilitas stok dan harga.

Selain itu, pada beberapa komoditas, peran swasta sangat besar dan oligopolistik. Lagi-lagi contoh di persoalan minyak goreng. Hanya enam atau tujuh produsen minyak goreng yang menguasai pangsa pasar yang sedemikian besar. Demikian juga di CPO. *Market power* mereka sangat besar untuk menentukan harga dan

stok di lapangan. Karena itu, perlu dipikirkan lagi apakah peran negara atau tangan-tangan negara mesti ditingkatkan di beberapa komoditas khususnya terkait dengan pangan.

Sebenarnya, imbuh Martin, di BUMN sudah terbentuk *holding* BUMN pangan yang disebut ID Food. Tetapi, kata Martin, ID Food masih berperan sebagai BUMN perdagangan. Jadi harus dilihat apakah BUMN itu bisa difungsikan juga sebagai produsen sehingga dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar.

Untuk itu, kata Martin, sudah saatnya pemerintah dan seluruh lembaga terkait duduk bersama membicarakan bagaimana mengatasi suplai komoditas pangan. Harus ada langkah strategis menata sisi suplai baik dari *buffer stock policy*, tata niaga, maupun peran tangan-tangan negara untuk bisa membantu pengendalian harga.

Data impor pangan yang disajikan Bayu Krisnamurthi merisaukan Luthfi A Mutty, pelaku usaha tani sekaligus Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI. Keprihatinan Luthfi beralasan. Sebagai gambaran, kita impor gandum 100%, daging sapi 40,6%, kedelai 90%, beras pada 2021 pertambahan impor 14,44%, gula 4,6%. Padahal di zaman penjajahan, Indonesia termasuk pengekspor gula.

Data yang disampaikan semakin memprihatinkan karena ternyata sejak 2018 sampai 2020 terjadi penurunan luas areal panen. Ada banyak sebab, antara lain karena alih fungsi lahan dan harga gabah semakin turun sehingga tidak menarik bagi petani. Akan tetapi, bagi Luthfi, dalam 20 tahun terakhir perha-



ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses panen raya di Desa Wanasari, Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu (21/4/2021). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mendengarkan sejumlah keluhan yang disampaikan para petani, di antaranya mengenai ketersediaan pupuk hingga kebutuhan saat panen. Pemerintah akan memberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian kepada para petani tersebut.

tian pemerintah untuk meningkatkan kapasitas petani baik secara individu maupun kelompok terabaikan.

Menurut Luthfi, selama ini kelembagaan petani sangat lemah. Tidak ada lagi kegiatan yang merangsang petani untuk bekerja secara berkelompok. Tidak ada lagi pembinaan kelompok tani oleh

pemerintah. Tidak ada rekrutmen penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai ujung tombak dari pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada petani. Belum lagi banyak tenaga PPL beralih fungsi dari penyuluh menjadi tenaga struktural.

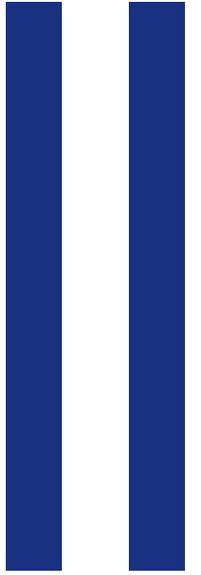
Maka, kata Luthfi, ada perang Rusia-Ukraina atau tidak, ada pandemi covid-19 atau tidak, persoalan pangan akan menjadi masalah masa depan dari bangsa ini kalau fondasinya yakni para petani tidak menjadi perhatian pemerintah. Paling mendesak dilakukan saat ini ialah mengembalikan semangat petani untuk melakukan kegiatan usaha tani melalui kelompok-kelompok.

Menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan, untuk mencapai ketahanan pangan tidak boleh mengecewakan petani, baik petani sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Dengan cara apa pun dan terutama meningkatkan produksi dalam negeri, stok pangan yang hanya berumur 1-2 bulan sangat rawan.

Jika terus terjadi pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan reproduksi padi, akan menyusahakan di masa depan.

Kadang-kadang, kata Saur, harus juga melihat ke belakang apakah perlu memiliki seperti banpres sapi dan seterusnya. Intinya ialah memberdayakan petani. Kreativitas menciptakan benih-benih baru justru harus terus dipelihara, dikembangkan, bahkan perlu mendapatkan insentif. ■



Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi Dunia terhadap Pangan Nasional

1 Latar Belakang: Ancaman Krisis Global

MENYAMBUT Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem Tahun 2022 yang berlangsung pada 15-17 Juni 2022, Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem mengadakan diskusi prarakernas. Tema besar yang diangkat terkait dengan perkembangan ekonomi, pangan, geopolitik, dan geostrategi yang sedang terjadi di dunia serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Terutama terkait perang Rusia-Ukraina dan dinamika Forum G20.

Diskusi dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas bagaimana pengaruh geopolitik dan geostrategi dunia terhadap energi dan lingkungan hidup nasional. Sesi kedua mengenai bagaimana pengaruh geopolitik dan geostrategi dunia terhadap

pangan nasional.

Di tengah kondisi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi covid-19, muncul perang Rusia-Ukraina yang berdampak serius terhadap masyarakat dunia, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan energi.

Presiden Joko Widodo pada 21 Mei 2022 mengingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina bisa menyebabkan krisis terhadap seluruh negara di dunia. Setidaknya ada dua komoditas penting yang sedang mengalami lonjakan harga di seluruh dunia, yaitu energi (BBM, gas, dan listrik) serta pangan. Harga gandum di Eropa dan Amerika Serikat naik lebih dari 30% (*Cnnindonesia.com*, 21 Mei 2022).

Terkait pangan, terutama gandum, posisi Rusia dan Ukraina cukup penting. Sebelum perang, dua negara itu menghasilkan 30% dari pasokan gandum dunia. Ukraina mengekspor 4,5 juta ton hasil pertanian per bulan melalui pelabuhannya. Sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022, ekspor Ukraina runtuh dan harga meroket. Sekitar 20 juta ton biji-bijian tertahan di Ukraina dari panen sebelumnya, yang jika dilepaskan dapat mengurangi tekanan pangan di pasar global (*Liputan6.com*, 20 Mei 2022).

Selanjutnya, harga gandum juga naik lebih tinggi setelah India melarang ekspor komoditas tersebut. India tercatat sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sejak 13 Mei 2022, pemerintah India secara resmi memberlakukan kebijakan larangan ekspor gandum dengan alasan untuk mengelola



M/MOH IIRFAN

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon (kiri) dan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema *Misi Damai Jokowi di Rusia-Ukraina, Efektifkah?*, di Media Center, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Konflik Rusia-Ukraina memicu kelangkaan beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan gandum. Peran kedua negara sangat vital untuk pasokan gandum bagi Indonesia dan dunia.

ketahanan pangan domestik yang terganggu akibat invasi Rusia ke Ukraina. Pada saat yang sama, hasil produksi atau panen gandum India mengalami kemerosotan akibat fenomena gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah India pada pertengahan Maret 2022 sehingga hasil panen gandum terganggu (*Tempo.co*, 24 Mei 2022).

Kebijakan India itu diprediksi berdampak pada Indonesia. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengungkapkan, kebijakan larangan ekspor gandum yang diambil India akan memperparah kelangkaan pasokan gandum di pasar global. Oleh karena itu, kita akan merasakan efek negatif berupa kenaikan inflasi dan harga jual produk makanan dan minuman berbahan dasar gandum di pasar domestik (*Tempo.co*, 24 Mei 2022).

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) mengatakan Ukraina adalah pemasok gandum terbesar kedua untuk Indonesia setelah Australia. Indonesia selama ini sangat bergantung pada pasokan gandum impor. Pada 2021, Ukraina mengekspor 3,07 juta ton gandum, meningkat jika dibandingkan dengan di 2020 sebanyak 2,96 juta ton.

Adapun Rusia memasok 2.955 ton gandum, anjlok dari tahun 2020 sebanyak 68,81 ribu ton. Jika mengacu pada data impor, sejak 2018 hingga 2020, Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Begitu juga dengan Rusia. Meskipun tren impor gandum menurun dari 2018 hingga 2020, peran Ukraina dan Rusia sangat vital untuk pasokan gandum bagi Indonesia dan dunia. Gangguan pasokan dari kedua negara itu jelas akan berdampak luas. Bisa saja akan terjadi kelangkaan dan berujung pada kenaikan harga (*Cnbcindonesia.com*, 27/2/2022).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyoroti potensi krisis global pascapandemi covid-19 akibat konflik geo-

politik Rusia-Ukraina. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjidi mengatakan konflik Rusia-Ukraina akan memunculkan krisis pangan global. Hal itu merupakan ancaman serius bagi dunia.

Kelangkaan beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan di beberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah dengan kelangkaan pasokan minyak akibat perang, akan menyebabkan inflasi global, yang ditandai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Selain itu, inflasi tinggi berpotensi menyebabkan krisis sosial serta peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Proteksi bahan pangan di setiap negara sudah mulai dilakukan, tidak ada lagi slogan pro ekspor untuk bahan pangan (*Kompas.com*, 15/5/2022).

Akibat perang Rusia-Ukraina, sejumlah negara telah memberlakukan pelarangan ekspor sementara pada komoditas gandum, sayuran, dan buah-buahan. Dari sekian produk yang dikenai larangan ekspor, gandum menjadi produk yang mengkhawatirkan Indonesia. Saat ini negara yang melakukan larangan ekspor gandum antara lain India, Rusia, Mesir, Serbia, Aljazair, Kazakhstan, dan Kosovo. Bagi Indonesia, larangan itu diprediksi mendongkrak lonjakan biaya produksi. Akibatnya, harga makanan yang berbahan gandum seperti mi instan dan roti terancam mengalami kenaikan harga (*Cnbcindonesia.com*, 19/5/2022).



MIA GUNG WIBOWO

Warga berbelanja di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/7/2022). Kelangkaan pasokan minyak dan beberapa komoditas pangan akibat perang Rusia-Ukraina memicu inflasi global, yang ditandai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina dapat menyebabkan krisis pangan global yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Sekjen PBB Antonio Guterres pada Jumat (20/5/2022) mengatakan bahwa perang tersebut telah memperburuk kerawanan pangan di negara-negara miskin akibat kenaikan harga. Perang, ditambah efek perubah-

an iklim dan pandemi, akan mengancam puluhan juta orang ke jurang kerawanan pangan yang memicu kekurangan gizi dan kelaparan massal. Beberapa negara dapat menghadapi kelaparan jangka panjang jika ekspor Ukraina tidak dikembalikan seperti di masa sebelum perang. Menurut PBB, harga pangan global hampir mencapai 30% lebih tinggi ketimbang waktu yang sama di 2020 (*Liputan6.com*, 20 Mei 2022).

Pada 20 April 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerukan perlunya tindakan untuk mengatasi potensi terjadinya krisis pangan akibat perang di Ukraina. Hal itu disampaikan saat menjadi panelis pada acara Tackling Food Insecurity: The Challenge and Call to Action, bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Managing Director IMF, Presiden Bank Dunia, dan Presiden IFAD, di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Mulyani mengatakan, perang dan tindakan-tindakan yang menyertainya telah memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, akan menimbulkan krisis pangan di negara-negara miskin dan rentan yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas (*Liputan6.com*, 20 Mei 2022).

Di kesempatan lainnya, Sri Mulyani juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh IMF dengan tajuk A Dialog with G20 Emerging Markets. Dialog itu dipimpin oleh Managing Director (MD) IMF dan dihadiri oleh negara-negara *emerging market* anggota G20, antara lain Indonesia, Arab Saudi, Argentina, Brasil, dan

Afrika Selatan. Dalam penjelasannya, MD IMF menyatakan perekonomian global sedang mengalami guncangan geopolitik dan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diterapkan dalam merespons kondisi geopolitik dimaksud. Negara-negara *emerging* menghadapi efek limpahan (*spillover*) yang lebih luas, antara lain terjadinya gangguan perdagangan internasional, kenaikan harga komoditas, termasuk pangan dan energi, meningkatnya jumlah pengungsi, dan isu humanitarian.

Menurut Sri Mulyani, tantangan itu menjadi sangat signifikan mengingat dunia masih dalam upaya memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, dia mendorong para pembuat kebijakan untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi yang tangguh dan inklusif, mengatasi dampak buruk pandemi, melakukan reformasi transformasional untuk mengatasi tantangan dan peluang perubahan iklim, serta pemanfaatan teknologi digital (digitalisasi) (*Liputan6.com*, 20 Mei 2022).

Perkembangan kondisi geopolitik dan geostrategi dunia seperti yang disampaikan di atas tentu harus mendapatkan perhatian yang baik dan cermat dari Indonesia. Pemerintah harus selalu mempersiapkan langkah-langkah preventif dengan cepat dan tepat untuk menghindarkan negara dari efek negatif yang mengganggu perekonomian nasional. Misalnya, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman kenaikan harga dan kelangkaan pangan. ■



Jika dalam ketahanan pangan saja kita masih menghadapi masalah maka tidak mungkin kita bicara mengenai kedaulatan pangan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Kerja Politik Harus Berpijak pada Nilai-Nilai Kebangsaan

KONSTELASI ekonomi dan politik dunia yang terjadi belakangan ini tentu berpengaruh langsung terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, butuh perhatian serius, terutama dalam menata ketahanan pangan dan energi, agar tidak berkontraksi terlalu dalam akibat krisis pangan dan energi yang melanda dunia.

“Saya kira itu menjadi sebuah keniscayaan, dan itulah alasan kenapa pada hari ini menjelang rakernas, Partai NasDem menggelar diskusi dengan mengambil topik ini sebagai salah satu bahasan,” jelas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi bertajuk Bagaimana Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi Dunia terhadap Pangan Nasional? pada Rabu, 8 Juni 2022, di Jakarta.

Pandemi covid-19 serta perang Rusia-Ukraina, menurutnya, telah berdampak luas, terutama pada sektor pangan dan energi.

Untuk mengantisipasi dampaknya, tentu butuh gerakan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri, karena ancaman yang dihadapi berpotensi menyasar ketahanan negara.

Dalam bidang ketahanan pangan, kata Rerie--sapaan akrab Lestari Moerdijat, perjalanan sejarah menunjukkan 70 tahun yang lalu saat peletakan batu pertama pendirian Fakultas Pertanian yang saat ini menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), Bung Karno mengingatkan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya satu bangsa. Kondisi demikian menuntut kita tidak sekadar berbicara dan berjuang menghadapi tantangan, tetapi yang paling penting ialah mewujudkan kedaulatan pangan.

Ketahanan pangan, menurutnya, dapat diartikan sebagai tersedianya bahan pangan yang cukup dengan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Jika dalam ketahanan pangan saja kita masih menghadapi masalah maka tidak mungkin kita bicara mengenai kedaulatan pangan,” tegas Rerie.

Berbicara masalah ketahanan pangan atau ketersediaan pangan, imbuhnya, banyak sekali masalah yang menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Misalnya, masalah lahan pertanian yang terus menyusut karena beralih fungsi dan masih banyak lagi hal yang perlu menjadi perhatian bersama semua pihak.

Dalam geopolitik dunia, kata Rerie, hubungan antarnegara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita berbicara ketahanan pangan, berarti menempatkan Indonesia sebagai bagian dari dunia sehingga membutuhkan komitmen dan prinsip

nonblok dalam upaya mengakhiri perang demi kemanusiaan. “Apalagi kita tahu persis bahwa Indonesia bergantung pada beberapa komoditas yang berasal dari kedua negara yang bertikai tersebut,” ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa jalan restorasi menuju Indonesia maju adalah landasan kerja dan implementasi dalam mewujudkan restorasi Indonesia di berbagai sektor kehidupan. “Kekayaan paradigma berpikir yang muncul dalam diskusi kali ini menjadi masukan berharga bagi NasDem untuk terus bekerja bagi masyarakat, karena dalam berbagai situasi, kerja politik harus dilakukan dengan hati dan penuh kasih, berpijak teguh pada nilai-nilai kebangsaan,” tukas Rerie. ■



Kita berharap ada perbaikan tata kelola sebagai kerangka kerja institusi, mulai dari regulasi sampai adopsi teknologi yang terkait dengan digitalisasi pangan harus dilakukan secara konsisten dan terarah.”

Andi Widjanto
Gubernur Lemhannas

3 Ketahanan Pangan Nasional Rawan, tetapi Belum Krisis

LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI didirikan pada 20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno, dan lembaga itu diperintahkan menjadi sekolah geopolitik. Artinya, Lemhannas harus mempelajari bagaimana pertarungan kekuatan yang terjadi di wilayah geografis tertentu. Sekarang kita berada pada era antara *global environment outlook* (GEO) 4 dan GEO 5. GEO 4 berkaitan dengan perang sumber daya, sedangkan GEO 5 tentang konektivitas, infrastruktur, dan rantai pasok (*supply chain*). Di era GEO 5, kuncinya ialah *cyber* dan *artificial intelligence* (AI).

Kalau melihat posisi Indonesia dan peta pertarungan global, Gubernur Lemhannas Andi Widjanto mengatakan, secara regional saja masih sangat kompleks karena masih mengandalkan

ASEAN dan interaksi bilateral satu negara dengan negara lain. Masalah di Laut China Selatan, misalnya, sesungguhnya bukan hanya terkait kedaulatan atau batas negara. Yang tidak kalah penting ialah apakah kita mampu untuk mengelola sumber daya alam baik minyak, gas, maupun perikanan yang ada di Laut China Selatan, di perairan Natuna, dari permukaan hingga ke dasar laut?

Menurut Andi, konflik Rusia-Ukraina menunjukkan kecenderungan tren hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat yang menurun drastis. Pada Februari 2022 Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina. Perang Rusia-Ukraina tentu saja akan memunculkan kerawanan dalam berbagai hal, seperti di bidang pangan dan energi.

“Karena Lemhannas adalah sekolah geopolitik maka semua analisis tentang posisi Indonesia di mata global berdasarkan data dan kajian yang mendalam,” jelas Andi. Pertama, peta kerawanan ekologi menunjukkan posisi kita belum ideal, bahkan jauh dari ideal. Banyak hal yang harus dilakukan untuk membawa paradigma ekologi, paradigma keberlanjutan, dan paradigma hijau menjadi paradigma utamanya.

Di Indonesia belum ada partai politik yang benar-benar mengusung *green policy*. Menjelang 2050, kita diramalkan akan menghadapi gejolak karena tidak bisa mengendalikan lingkungan. Proyeksi perubahan hasil pangan akan terus-menerus memburuk sampai 2050. Jawabannya bisa melalui Kementerian Pertanian

atau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perwujudan *green policy*, *green paradise*.

Ekonomi biru harus diwujudkan berupa kesehatan samudra, kesehatan laut (*ocean health*). Idealnya peta laut di Indonesia berwarna biru seperti Selandia Baru atau negara-negara Pasifik Selatan. Dalam peta global, warna laut di Indonesia masih kuning atau tidak dalam kondisi baik. Artinya, pada sebagian besar ikan yang kita makan di dalamnya terdapat kandungan polutan.

Lebih lanjut dijelaskan, oksigen di dunia, 50% dihasilkan oleh terumbu karang. Luas terumbu karang, jika dibandingkan dengan luas planet bumi, cuma 0,00025%. Berarti yang luas 0,00025% itu menyumbang 50% oksigen yang kita hirup. Dan, perlu diingat bahwa terumbu karang yang 0,00025% itu, 40% berada di Indonesia. “Kalau kita gagal mengelola terumbu karang, misalnya hilang 5% dalam waktu 10 tahun terakhir, maka dalam 10 tahun ke depan suhu bumi naik 0,2-0,3 derajat. Kalau naiknya 0,5 derajat atau bahkan mendekati 1 derajat, permukaan laut akan naik,” jelas Andi.

Ia menyatakan *climate change* bukan ancaman saat ini, melainkan ancaman 10 tahun lalu yang sudah terjadi. Kalau kita baru berpikir mengadopsi paradigma *blue economy*, kesehatan samudra sekarang, maka kita telat 10 tahun. “Jadi benar-benar dibutuhkan ada platform politik, platform pembangunan yang menggabungkan antara *green* dan *blue economy*,” paparnya.

Selanjutnya tentang kerawanan pangan yang menjadi topik



MIFADAM DWI

Antrean pada salah satu SPBU di Jakarta saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022). Transisi menuju energi hijau, energi yang lebih bersih dan terbarukan, belum terealisasi sehingga ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil masih sangat tinggi.

diskusi kali ini, menurutnya, peningkatan harga pangan memang terjadi di pasaran. Kendati demikian, Indonesia luar biasa bisa menekan harga pangan dan mampu menjaga stabilitas harga sehingga inflasi terjaga, relatif terbaik di dunia.

Indonesia dengan kebijakan pemerintah, terutama melalui badan fiskal, telah mengambil langkah luar biasa dalam menjaga harga komoditas. Tapi kalau dilihat dari indeks ketahanan pa-

ngan provinsi belum merata. Terutama di Papua, tetap ada permasalahan ketahanan pangan meskipun secara umum ketahanan pangan Indonesia relatif masih baik.

“Tapi sekali lagi, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan kalau Rusia dan Ukraina tetap bereskalasi.”

Masalah energi juga tidak jauh berbeda dengan persoalan pangan. “Kekhawatiran saya tentang energi adalah ketergantungan bahan bakar fosil di Indonesia sangat tinggi. Transisi menuju energi hijau, energi yang lebih bersih dan terbarukan, belum terealisasi sehingga ketergantungan pada bahan bakar fosil cenderung lebih buruk dari negara-negara di Afrika. Ketergantungannya sangat-sangat tinggi,” ungkap Andi.

Akibatnya, jelas Andi, begitu korporasi global melihat kita belum beralih ke energi hijau, ke ekonomi biru, dan ketergantungan pada fosil masih tinggi padahal mereka ingin produk-produk yang dihasilkan mendapatkan *green certificate* dan untuk produk maritim mendapatkan *blue certificate*, maka mereka akan mencari negara lain yang ekonomi hijaunya bagus, ekonomi birunya bagus, dan tengah bertransisi menuju energi terbarukan, juga negara dengan energi lebih bersih telah terimplementasi secara baik.

Permintaan pangan pada dasarnya relatif sama karena kita tidak mungkin tiba-tiba dalam sehari yang semula makan tiga kali menjadi delapan kali. Selain permintaan pangan relatif sama, pertumbuhan penduduk juga relatif terkendali. Jadi masalahnya pada distribusi dan produksi. “Harus ada terobosan untuk men-

ciptakan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi,” ucap Andi.

Berdasarkan kajian Lemhannas, lanjutnya, ketahanan pangan nasional masuk kategori rawan, tetapi belum sampai pada tahap krisis pangan. ”Kita berharap ada perbaikan tata kelola sebagai kerangka kerja institusi, mulai dari regulasi sampai adopsi teknologi yang terkait dengan digitalisasi pangan harus dilakukan secara konsisten dan terarah.” ■



Perhitungan inflasi berdasarkan IHP atau IHK penting untuk mengetahui apakah petani sebagai produsen betul-betul menerima manfaat dari lonjakan harga pangan atau tidak.”

Bustanul Arifin
Pengamat pertanian

4 Pertanian Menjadi Bantalan Ekonomi

PENGAMAT pertanian Bustanul Arifin menyatakan sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi yang terlihat pada kuartal I 2022, dengan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,01% secara tahunan atau *year on year* (yoy). Di kuartal II juga diperkirakan pertumbuhan akan tetap tinggi. Secara kumulatif sepanjang 2021 pertumbuhan bergerak positif mencapai 3,69% atau lebih baik ketimbang di 2020 yang mengalami kontraksi -2,07%.

Pertanyaannya, berapa angka pertumbuhan di sektor pertanian? Bustanul mengapresiasi kebijakan dan program yang dijalankan oleh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) selama tiga tahun terakhir sehingga sektor pertanian tumbuh 1,84% dan menjadi bantalan resesi selama pandemi covid-19. “Kalau tidak ada pertanian, mungkin akan terjadi krisis *benaran*. Jadi apresiasi kepada Kementan karena pertanian menjadi bantalan ekonomi nasional,” ujar Bustanul dalam diskusi yang dipandu oleh Martin Manurung pada 8 Juni 2022 itu.

Meskipun demikian, ia berharap pemerintah terus meningkatkan kinerja, terutama dalam menghadapi geopolitik global akibat konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Perang tersebut telah berdampak pada kenaikan harga-harga di dunia, terutama harga pangan dan energi.

“Rekomendasi saya untuk sektor pangan nasional dalam menghadapi geopolitik dan geostrategi global yang telah menaikkan harga pangan secara spesifik di Indonesia, harus diantisipasi agar ketersediaan dan harga pangan dalam negeri tetap terkendali,” ujarnya.

Komoditas ekspor, termasuk komoditas pertanian seperti minyak sawit mentah (CPO), mengalami peningkatan. Batu bara, timah, dan tembaga juga demikian. Hal itu membuat neraca perdagangan nasional selalu positif. Namun, di lain sisi, kita merasa sedih karena harga pupuk urea nonsubsidi melonjak mencapai Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut tentu membebankan sekitar 55% petani dalam negeri sebagai konsumen utama pupuk nonsubsidi. Selebihnya 45% petani adalah konsumen pupuk subsidi. “Soal pupuk subsidi kita harus terus mengawasi agar benar-benar tepat pada sasaran,” ujar Bustanul.

Ia menyambut baik rencana pemerintah memberlakukan subsidi langsung kepada petani mulai 2023 supaya betul-betul tepat sasaran, yakni diterima atau dikonsumsi oleh petani yang benar-benar berhak mendapatkannya. Untuk itu perlu didukung oleh data yang terintegrasi, juga sistem yang baik dan modern.

Bustanul secara khusus mengajak masyarakat, khususnya petani, untuk turut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Selain agar tepat sasaran, juga supaya penjualannya sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni pupuk urea Rp2.250 per kilogram (kg), NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) Rp2.300/kg, dan NPK formula khusus kakao Rp3.300/kg. “Ketentuan HET ini berlaku jika dibeli di pengecer resmi, secara tunai, dan dalam satuan kemasan utuh.”

Ia menjelaskan inflasi Indonesia berada di angka 2,6%. Walaupun masih jauh lebih rendah daripada negara-negara lain, kondisi itu harus tetap menjadi perhatian serius. Inflasi paling tinggi di Turki mencapai angka 61,1%. Amerika Serikat, yang biasanya 1%, sudah melonjak ke angka 8,5%. Laju inflasi global diukur berdasarkan indeks harga produsen (IHP). Kita selama ini mengukur inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK), yakni sebesar 2,6%. “Bila diukur dengan IHP maka inflasi kita lebih tinggi dari yang dilaporkan selama ini,” katanya.

Perhitungan inflasi berdasarkan IHP atau IHK penting untuk mengetahui apakah petani sebagai produsen betul-betul menerima manfaat dari lonjakan harga pangan atau tidak. Kalau petani tidak menerima manfaat, harus kita upayakan supaya mereka menerima manfaat tersebut. “Ini penting karena petani yang di awal harus menanggung kenaikan harga pupuk, harus menanggung sewa lahan yang mahal, tetapi kemudian tidak mendapat

manfaat dari kenaikan harga pangan,” urai Bustanul.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir pangan diterpa pandemi covid-19 yang luar biasa. Terganggunya koneksitas menjadi bagian yang membuat produktivitas terganggu pada semua sektor, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Ternyata Indonesia bisa selamat dengan baik karena pangan mampu menjadi penopang utama dalam melewati masa sulit tersebut.

Di saat pandemi covid-19 belum mereda, lanjut Syahrul, kita dihadapkan pada *climate change* yang ujung-ujungnya berdampak serius terhadap produktivitas yang memicu terjadinya krisis pangan dunia. Di samping itu, perang Rusia-Ukraina menimbulkan masalah bagi dunia, terutama karena terjadi krisis pangan dan energi.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia (273 juta jiwa) tentu membutuhkan pangan dalam jumlah yang besar pula. “Hal itu menjadi tantangan baru. Tetapi seperti yang digambarkan oleh Pak Bustanul di atas, kita memiliki ruang yang sangat besar untuk mendukung pengembangan sektor pertanian,” kata Syahrul.

“Matahari kan sumber daya alam. Angin yang tidak pernah berhenti merupakan bagian dari sumber daya yang kita miliki untuk mendukung produktivitas pangan. Wilayah yang terdiri dari pulau, dataran rendah, bukit-bukit, dan gunung menjanjikan hasil pangan bagi masyarakat. Tentu semua potensi sumber daya



MIMICKY GUSTAWAN

Warga merapikan pangan bersubsidi yang mereka beli di Joglo, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Ketersediaan 12 komoditas kebutuhan pokok masyarakat cukup terjamin selama dua tahun masa pandemi covid-19. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

alam itu membutuhkan dukungan sains, riset, dan teknologi,” tambahnya.

Menurut Syahrul, ketersediaan 12 komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat (sembako) cukup terjamin selama dua tahun masa pandemi covid-19. “Kita patut bersyukur karena pandemi bisa diatasi dengan vaksinasi atau bersembunyi (isolasi) dalam gedung, tapi kalau tidak makan itu bersoal,” ucap politikus

NasDem itu.

Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut, kata dia, bisa berasal dari produksi dalam negeri dan ada pula yang harus diimpor. Kedelai, misalnya, terpaksa diimpor karena harga kedelai impor Rp5.400/kg. Adapun kedelai produksi dalam negeri, kalau tidak dibeli dengan Rp7.000/kg, petaninya akan rugi.

Oleh karena itu, ada kebijakan impor, tetapi ada kendala karena harga kedelai dunia sedang melonjak signifikan, rata-rata mencapai Rp8.000/kg. Bila diimpor, harga jual dalam negeri bisa mencapai Rp10.000/kg, dan hal itu akan berpengaruh signifikan pula terhadap berbagai produk yang menggunakan bahan baku kedelai. Produk tahu, misalnya, bila harga kedelai dalam negeri lebih dari Rp10.000/kg, harga tahu bisa mencapai Rp14.000 sampai Rp20.000/kg.

Pertanyaannya, bagaimana ketahanan pangan nasional dalam menghadapi kondisi semacam itu? Menurut Syahrul, yang paling utama harus diperhatikan ialah ketersediaan padi dan beras. “Kita memiliki suplai yang cukup seperti yang digambarkan Pak Bustanul, yakni *overstock* 7 juta ton pada 2020 dan 9 juta ton pada 2021. Itu berarti beras menjadi modal utama untuk ‘mengintervensi’ dunia.”

Lebih lanjut ia menjelaskan, sudah tiga tahun kita tidak pernah mengimpor beras. Padahal, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah tidak mengimpor beras. Mudah-mudahan dalam rangka HUT ke-77 RI, ketahanan atau resiliensi pangan nasional mendapatkan

pengakuan dari Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu memperlihatkan *resiliensi* pangan. “Ingat, untuk 273 juta rakyat kita harus disiapkan pangan yang cukup dulu, baru kemudian kita mengintervensi pangan dunia,” paparnya optimistis.

Pembangunan bidang pertanian, menurut Syahrul, tidak bisa hanya mengandalkan dana yang bersumber dari APBN, tetapi harus dengan investasi, dengan kerja sama berbagai unsur dan pihak terkait. Juga harus ada terobosan dalam membangun sistem pertanian modern yang efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi yang memadai. “Intinya kita harus masuk dengan pendekatan-pendekatan baru, dengan sains, riset, dan teknologi.” ■



Indonesia akan mengalami bonus demografi mulai 2038, dan saat itu kita mesti punya GDP US\$12.000. Untuk itu, kita mesti memacu pertumbuhan melalui kebijakan yang jelas dan dikerjakan secara disiplin serta konsisten.”

Muhammad Lutfi
Menteri Perdagangan

5 Pacu Pertumbuhan Melalui Kebijakan yang Konsisten

MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pidato Presiden Jokowi ketika dilantik pada 20 Oktober 2019 menyatakan bahwa secara ekonomi Indonesia akan menjadi negara nomor lima di dunia pada 2045. Artinya, *trajectory* percepatan pertumbuhan ekonomi nasional ialah 5,7%. Untuk bisa sampai 5,7%, ada beberapa hal yang mesti dipacu.

Pertama, komponen investasi dalam *gross domestic product* (GDP) mesti naik dari yang saat ini 32% menjadi 39%. Untuk itu, kita mesti menciptakan iklim investasi yang terbaik. Kedua, industrialisasi. Saat ini kita berada pada 21%-22%, tetapi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, industrialisasi Indonesia mesti mencapai 29% pada 2045. Ketiga, neraca ekspor dan impor harus terus ditingkatkan. Saat ini ekspor dan impor nasional sekitar 34%. Itu capaian positif, tetapi harus terus dipacu menuju sekitar 50%. “Artinya, ke depan kita mesti memacu geostrategi perdagangan,” kata Lutfi.

Permasalahannya, setelah pandemi covid-19 Indonesia meng-

alami ketertinggalan karena pertumbuhan permintaan lebih tinggi daripada pertumbuhan suplai. Contoh di Eropa, mengapa harga mobil bekas yang baru dipakai dua tahun lebih mahal daripada ketika mereka membeli dua tahun sebelumnya? Menurutnya, hal itu terjadi karena selama masa pandemi covid-19, pertumbuhan industri mobil di Eropa hanya 3%, sedangkan pertumbuhan pasar mobil mencapai 8%, atau ada selisih 5% antara *supply* dan *demand*.

Indonesia sebagai salah satu penghasil atau pengekspor mobil dunia, kata Lutfi, pada 2019 sebelum pandemi melakukan ekspor senilai US\$8,6 miliar. Ketika covid-19 mulai melanda pada 2020, turun menjadi US\$6,6 miliar. Setelah covid, kembali tumbuh menjadi US\$8,8 miliar. Fluktuasi harga itu terjadi akibat terganggunya proses produksi selama masa pandemi, yang ditandai dengan adanya pembatasan aktivitas serta mobilitas manusia dan barang sehingga terjadi ketimpangan antara *supply* dan *demand*.

Setelah pandemi covid-19, agresi militer Rusia ke Ukraina juga membawa dampak buruk bagi dunia. Begitu terjadi agresi militer, harga minyak mentah melonjak hingga US\$130 per barel. Di samping itu, suplai sejumlah komoditas pangan juga terhambat akibat perang sehingga ancaman krisis energi dan krisis pangan pun tak terelakkan.

Belajar dari pengalaman tersebut, baik terkait pandemi covid-19 maupun perang Rusia-Ukraina, Indonesia harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ke depan.

Pertama, untuk naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi nomor lima di dunia, sementara saat ini memiliki GDP US\$4.000, kita harus memiliki upaya dan langkah-langkah konkret agar sebelum 2038 berakhir, GDP sudah tumbuh dari US\$4.000 menjadi US\$10.000.

Pasalnya, berdasarkan studi yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sejak 1969 tidak ada satu negara pun bisa menjadi negara berpendapatan tinggi kalau jumlah orang tua di negara tersebut lebih banyak daripada orang muda. “Indonesia akan mengalami bonus demografi mulai 2038, dan saat itu kita mesti punya GDP US\$12.000. Untuk itu, kita mesti memacu pertumbuhan melalui kebijakan yang jelas dan dikerjakan secara disiplin serta konsisten,” papar Lutfi.

Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan rantai pasok dunia. Agresi militer ke Ukraina telah menghancurkan *multilateral trading system* sehingga kita harus aktif melakukan langkah dan upaya untuk mendapatkan perjanjian perdagangan baru seperti dengan negara-negara di Amerika Tengah serta Turki dan Bangladesh. “Kita berharap ini menjadi darah baru bagi perdagangan ke depan,” ucapnya.

Ketiga, kejelasan dan kepastian perjanjian perdagangan menjadi faktor yang sangat penting mengingat negara Barat atau negara maju kerap mengeluarkan aturan yang memberatkan saat terjadi kebuntuan perdagangan. Misalnya, Uni Eropa memberlakukan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk im-

balan (BMI) atas impor baja tahan karat canai dingin (*cold rolled stainless steel*) asal Indonesia.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembatasan ekspor mineral mentah dan menegaskan bahwa nikel yang memiliki kadar di bawah 1,7% tidak boleh diekspor terhitung mulai 1 Januari 2020.

Larangan ekspor bahan mentah mineral merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari seluruh sumber daya mineral yang kita miliki agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945 bahwa 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat'. ■



Langkah dan upaya optimasi pembangunan di bidang pertanian tidak hanya menjadi beban APBN, tapi harus pula dibuka ruang yang seluas-luasnya kepada pengusaha untuk berperan dan bekerja sama melalui jalur investasi.”

Arsjad Rasjid

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

6 Menjadi Pemenang di Masa Krisis

KETUA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bangsa Indonesia patut berbangga karena setelah dua tahun dilanda pandemi covid-19 mampu tampil sebagai pemenang. Artinya, jika dibandingkan dengan banyak negara, Indonesia relatif yang paling cepat bisa mengendalikan pandemi, dan itu merupakan prestasi yang membanggakan.

Capaian membanggakan tersebut bukan hanya menjadi prestasi pemerintah, melainkan buah dari kerja keras dan kerja sama semua pihak, termasuk Partai NasDem sebagai bagian dari partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. “Capaian-capaian di masa sulit itu harus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketika pandemi covid-19 belum sepenuhnya berakhir, imbuhnya, kita seperti menghadapi krisis di atas krisis akibat perang Rusia-Ukraina. Meski demikian, kalau dibandingkan dengan banyak negara, kita pun patut bersyukur karena kondisi ekonomi

nasional tetap terkendali. Karena itu, cukup realistis bila pemerintah memproyeksikan tambahan penerimaan negara tahun 2022 mencapai Rp420 triliun. Kendati belanja negara juga bertambah sekitar Rp390 triliun, setidaknya kita bisa menurunkan margin defisit anggaran.

“Luar biasa kita menjaga daya beli masyarakat, kita menjaga kemiskinan tidak naik, bahkan menurun. Angka pengangguran juga turun. Itu menunjukkan bahwa kerja keras pemerintah dan semua pihak terkait telah menunjukkan hasil yang sangat positif,” papar Febrio.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menambahkan, penting untuk mengatakan bahwa Indonesia hebat dalam menghadapi dan mengatasi krisis, baik yang disebabkan oleh pandemi covid-19 maupun akibat perang Rusia-Ukraina. “Di Kadin kami sering bilang sedang ada dua perang, yakni perang lawan pandemi yang kita sudah menang tapi tetap harus waspada, serta perang ekonomi global,” tuturnya.

Setelah pandemi, muncul persoalan baru akibat perang Rusia-Ukraina. Perang tersebut, selain membawa dampak buruk bagi dunia internasional, juga secara bilateral berdampak pada Indonesia yang selama ini mengimpor pupuk sekitar 15% dari Rusia dan mengimpor gandum sekitar 23% dari Ukraina.

“Jadi sebetulnya ketergantungan Indonesia terhadap Rusia dan Ukraina tidak terlalu besar, apalagi kita sudah bisa menjamin ketersediaan beras dalam negeri. Tetapi secara geopolitik, perang

Rusia-Ukraina telah membuat harga komunitas pangan dan migas dunia melonjak dua sampai tiga kali lipat, dan ini akan memicu inflasi di dunia yang otomatis akan berdampak ke Indonesia,” Arsjad mengingatkan.

Kondisi ekonomi internasional dan nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan, menurut Arsjad, akan terus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Apalagi akan menghadapi pesta demokrasi 2024. Tentu dibutuhkan gotong royong, dialog sosial, juga kerja sama berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan petani untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kolaboratif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pihaknya menilai ada dua solusi yang bisa dilakukan bersama oleh pemerintah, Kadin, pelaku usaha, dan petani. Pertama, solusi jangka pendek dengan memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui subsidi harga jual di tingkat petani serta subsidi bahan baku, terutama minyak, pupuk, dan gandum. “Tentunya juga harus dipastikan bahwa subsidi diberikan kepada petani yang berhak menerima melalui optimasi penggunaan teknologi guna meningkatkan pendapatan petani penerima subsidi dengan kartu tani digital,” usulnya.

Selain itu, perlu ada pembebasan sementara biaya masuk dan PPN bahan baku impor terdampak krisis seperti pupuk dan gandum.

Di sisi lain, tambahnya, pemerintah juga mesti memastikan



M/BRIYANBODO HENDRO

Area persawahan di Desa Purworejo, Pati, Jawa Tengah, yang terendam banjir, Senin (23/1/2023). Ribuan hektare tanaman padi di Jawa Tengah terancam gagal panen akibat terendam banjir cukup lama. Gagal panen bisa memicu lonjakan harga komoditas pangan.

ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar secara insidental dan berlanjut.

Kedua, solusi jangka panjang, yakni meningkatkan produksi pangan di hulu serta menguatkan ekosistem pangan Indonesia agar bisa mencapai swasembada pangan. Kadin bersama pelaku usaha dan pemerintah bekerja sama melakukan penyuluhan dan pendampingan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Kadin juga, sambung Arsjad, akan terus mendorong integrasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana sektor pertanian serta transfer teknologi. Langkah dan upaya optimasi pembangunan di bidang pertanian tidak hanya menjadi beban APBN, tapi harus pula dibuka ruang yang seluas-luasnya kepada pengusaha untuk berperan dan bekerja sama melalui jalur investasi.

Dalam pandangan Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Fransiscus Welirang, lonjakan harga komoditas pangan awalnya disebabkan oleh kondisi gagal panen yang kemudian diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. “Jadi perubahan iklim adalah kunci dari semuanya yang mengakibatkan harga komoditas naik, berlanjut pada 2022 ketika terjadi perang di Ukraina,” ungkap Fransiscus.

Ia menyebutkan sudah dua tahun produksi kedelai dunia mengalami penurunan karena stok di Amerika hanya cukup untuk 30 hari. Brasil sebagai penghasil kedelai terbesar di dunia, produksinya juga menurun sehingga stok yang ada cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia selama 90 hari. “Saya kira itu yang mengakibatkan harga naik di dunia,” ujarnya.

Bagaimana dengan gandum? Fransiscus menjelaskan sudah dua tahun produksi gandum mengalami penurunan hingga di bawah angka permintaan dunia atau berada dalam kondisi minus.

Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara produsen gandum mengalami penurunan stok akibat perubahan iklim, dan

Indonesia sesungguhnya sangat beruntung karena dari semua komoditas yang mengalami kenaikan harga, hanya satu komoditas yang harganya tidak naik, yakni beras, dan kita memiliki stok beras yang cukup aman setidaknya untuk enam bulan ke depan. ■



Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang melimpah, tetapi selama ini belum dikelola dengan baik sehingga terus menjadi importir produk-produk pertanian dari mancanegara.”

Rachmat Gobel
Wakil Ketua DPR RI

7 Perlu Gerakan Nasional Majukan Pertanian

WAKIL Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, selaku penanggung jawab dalam diskusi tersebut, menyatakan salah satu yang menjadi perhatiannya ialah bidang pertanian karena kalau berbicara tentang NKRI maka harus memajukan pertanian, perkebunan, dan kelautan.

“Kalau kita jalan dari Jakarta ke Bandung, kita temukan banyak orang mengeringkan gabah di pinggir jalan sehingga kalau mobil lewat gabahnya beterbangan. Di daerah lain juga sama. Selain tempat penjemuran yang tidak aman, pengeringan gabah juga tidak sesuai dengan suhu udara dan waktu yang seharusnya. Setahu saya, untuk menghasilkan beras berkualitas, maka dalam waktu 5 jam setelah panen, gabah harus dikeringkan,” jelas Rachmat.

Menurutnya, penurunan produksi padi tidak semata karena masalah tanah yang kurang produktif. Masalah itu bisa dengan mudah diatasi melalui proses pemupukan yang teratur. Apalagi sudah ada program pupuk bersubsidi sehingga para petani

yang selama ini mengeluh tidak bisa membeli pupuk, bisa diatasi melalui pupuk bersubsidi. Karena itu, proses produksi dan distribusi pupuk bersubsidi perlu diatur sebaik mungkin agar tepat sasaran.

Rachmat menyatakan Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang melimpah, tetapi selama ini belum dikelola dengan baik sehingga terus menjadi importir produk-produk pertanian dari mancanegara. Oleh karena itu, perlu gerakan besar secara nasional untuk mengatasi berbagai persoalan pertanian dalam membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Mantan Menteri Perdagangan itu optimistik produksi padi yang biasanya cuma 3 ton per hektare dapat ditingkatkan menjadi 10 ton per hektare. “Saya berani mengatakan begini karena sudah membuat *pilot project* di kampung saya, di dapil saya yang tadinya hanya bisa menghasilkan 3 ton, dengan menggunakan pupuk nonsubsidi produksinya bisa mencapai 10 ton per hektare,” paparnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Ukay Karyadi, di satu sisi mengapresiasi optimisme pemerintah Indonesia untuk mewujudkan swasembada beras. Namun, ia mengingatkan jangan sampai terjadi swasembada seperti dalam kasus minyak goreng. “Kita menjadi penghasil sawit terbesar di dunia, tapi tidak bisa mengatur komoditas yang kita miliki karena selalu dikaitkan dengan kepentingan pasar global,” kata Ukay.

Dalam kaitan itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Na-

sional (BPKN) RI, Rizal E. Halim, menyatakan bila melihat geopolitik yang sedang terjadi, sebenarnya hanya melanjutkan menuju titik keseimbangan yang lebih baru dari persoalan lama terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan sekutunya versus blok Tiongkok bersama Rusia. Ujungnya ialah penguasaan sumber daya dan penguasaan rantai pasok.

“Jadi kalau kita lihat minyak bumi, Rusia sama Amerika merupakan produsen terbesar. Gas alam juga begitu, kemudian berkembang yang namanya *global supply chain*. Mereka akan saling mencegat setelah perang dagang antara Amerika-Tiongkok sehingga menjegal sistem logistik global. Itu yang terjadi saat ini sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina,” jelasnya.

Bagaimana dampaknya terhadap pangan dan minyak dunia? Rizal menyebutkan Ukraina yang tadinya menjadi lumbung pangan bagi negara-negara Afrika dan Timur Tengah, rantai pasokannya menjadi terhambat. Begitu pula pasokan biji-bijian dari Ukraina ke negara-negara Eropa pun terhambat, dan itulah yang mendorong terjadinya kelangkaan komoditas yang tentu saja akan memicu kenaikan harga secara signifikan.

Ia secara khusus mengingatkan agar negara hadir dalam melindungi konsumen, terutama bagi kelompok miskin dan rentan miskin dalam menghadapi masalah krisis pangan dan krisis energi yang sedang terjadi. “Hal ini penting mengingat banyak temuan kami di lapangan, di tengah masyarakat, terkait bagaimana konsumen sangat tidak berdaya dan sangat inferior karena negara

belum hadir. Banyak kasus mengenai perlindungan konsumen yang selalu menempatkan konsumen sebagai pihak yang tidak berdaya. Padahal kita memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen,” tegas Rizal.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania, menjelaskan setiap negara punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyatnya tidak boleh kelaparan dan tidak boleh ada yang kekurangan asupan gizi. Pangan adalah kebutuhan primer masyarakat global.

Menurutnya, Indonesia punya tantangan besar karena berada dalam zona yang akan menghadapi krisis pangan, yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun karena berbagai gejolak di dunia. Belum usai persoalan covid-19 yang ditandai dengan berbagai pembatasan aktivitas sosial yang berimbas pada pembatasan mobilitas barang dan jasa, yang tentu saja berdampak pada sektor pangan. Akibatnya, *supply and demand* semakin tidak seimbang sehingga muncul ancaman kerawanan pangan. Meski demikian, kita patut memberikan apresiasi karena data menunjukkan ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Akan tetapi, hal itu hendaknya tidak membuat kita lengah.

Ancaman nyata yang sedang dihadapi, kata dia, ialah berbagai akibat yang ditimbulkan oleh invasi Rusia ke Ukraina karena adanya ketergantungan sejumlah negara terhadap berbagai komoditas pangan dari Ukraina. Gandum sebagai salah satu bahan dasar berbagai makanan olahan diprediksi harganya akan naik



ISTANA KEPRESIDENAN/GUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo menanam bawang merah di lokasi *food estate*, Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2021). Program *food estate* adalah bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi pangan global yang tidak menentu.

mencapai 40%, dan secara global Rusia dan Ukraina menyumbang ekspor gandum mencapai 30% sehingga harga kebutuhan bahan dasar pangan di dunia diprediksi naik kurang lebih 22%-23%.

“Saya pikir ini ancaman besar sehingga di balik itu banyak negara yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk menekan atau menyetop ekspor komoditas tertentu dalam rangka menjamin kebutuhan pangan dalam negeri masing-masing,” jelas Yessy.

Ia mengingatkan agar Indonesia berperan aktif dalam menghadapi krisis global dan tidak hanya pasrah menempatkan diri sebagai pihak terdampak, karena di balik krisis yang dihadapi, ada peluang yang tidak boleh disia-siakan. Kita tahu bahwa setelah Ukraina menyetop ekspor biji bunga matahari, negara-negara Uni Eropa bahkan India mulai terpikir untuk kembali menggunakan minyak sawit yang dulu pernah mereka tinggalkan.

“Ini peluang bagi Indonesia. Kita negara nomor satu di dunia yang memproduksi minyak kelapa sawit mentah (CPO). Nah *gimana* hadirnya negara di sini dalam melihat tantangan sekaligus peluang yang ada,” ujarnya.

Selain itu, imbuhnya, program *food estate* adalah bentuk respons pemerintah terhadap reaksi global yang tidak bisa kita hindari. Kita harus mempersiapkan Indonesia menjadi negara produsen pangan karena kita punya modal yang besar, punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang tidak kalah asalkan di-*backup* oleh kebijakan-kebijakan dan regulasi yang menunjang.

Penanggap lainnya, Kapoksi Partai NasDem di Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menilai berbagai pandangan dan gagasan yang muncul dalam diskusi kali ini akan menjadi masukan berharga bagi rakernas sebagai bentuk peran serta Partai NasDem dalam menghadapi permasalahan internasional dan nasional yang berdampak pada terjadinya krisis komoditas pangan dan energi.

“Menurut saya, ini semua menjadi masukan yang akan disam-

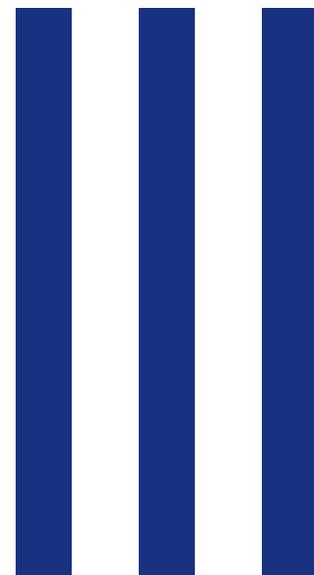
paikan dalam rakernas, dan langkah penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis pangan dan energi ialah melakukan mitigasi risiko sedini mungkin,” ucap Fauzi Amro.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, yang juga Sekretaris Jenderal Partai NasDem, menyatakan berbicara tentang pangan berarti menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus objek. Rakyat adalah produsen sekaligus konsumen. Pada saat kebijakan untuk menaikkan harga pangan, yang diuntungkan ialah rakyat sebagai produsen. Pada saat menurunkan atau memberikan subsidi harga pangan, yang diuntungkan ialah rakyat sebagai konsumen.

“Saya setuju dengan pandangan para pembicara bahwa krisis pangan dan energi jangan hanya dilihat sebagai bencana, tetapi harus menjadi momentum untuk menata dan mengatasi masalah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, khususnya dalam menata produktivitas dan distribusi pangan dan energi nasional ke depan,” ucap Johnny saat memberikan kata penutup pada diskusi tersebut.

Menurutnya, Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan mengingatkan bahwa kita harus menghadapi krisis sebagai momentum untuk mengambil kebijakan-kebijakan besar, tidak hanya untuk jangka pendek memenuhi *supply and demand* saja. Langkah besar yang harus kita lakukan ialah meredesain pangan nasional agar tidak terus bergantung pada komoditas pangan yang diproduksi di negara-negara dengan empat musim.

Sebagai negara dengan dua musim, *dependency* pangan pada negara empat musim akan terus berlangsung selama tidak ada substitusi pangan dalam negeri karena tidak akan pernah Indonesia menjadi negara dengan empat musim. “Waktunyalah sekarang untuk mendesain ulang pangan demi *resiliensi*, *security*, dan kedaulatan pangan nasional yang menempatkan petani sebagai fundamen *dependency* pangan dalam negeri,” ucap Johnny. ■



Problem Gizi dan Pengelolaan Makanan

1 Latar Belakang: Dari Anemia sampai Stunting

LAPORAN terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kondisi kesehatan para pekerja Indonesia patut menjadi perhatian semua pihak. Menurut laporan itu, lebih dari 35% pekerja di sektor formal mengalami obesitas dan kelebihan berat badan. Penyebab utamanya ialah gaya hidup dan minimnya aktivitas fisik.

Adapun para pekerja di sektor nonformal umumnya memiliki kondisi lebih baik karena karakter kerja mereka lebih banyak mengandalkan kegiatan fisik. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, semakin besar potensinya menderita obesitas. Sebanyak 44 dari 100 pekerja dengan *income* tinggi mengalami problem kelebihan berat badan.

Obesitas berpengaruh bukan hanya pada performa kerja dan produktivitas, tapi juga pada kondisi kesehatan secara umum. Para pengidap obesitas sangat rentan terkena penyakit. Tingkat kehadiran pegawai penderita obesitas lebih rendah ketimbang mereka yang tidak memiliki problem berat badan.

Obesitas hanyalah salah satu persoalan kesehatan yang terkait dengan pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi manusia modern. Anemia adalah gangguan kesehatan lain yang semakin menjadi problem serius, yang menimpa semua kelompok umur. Yang paling merisaukan ialah masalah tengkes (*stunting*) yang menimpa lebih dari 24% anak-anak Indonesia. ■



Semua langkah harus memiliki tujuan untuk mengakhiri semua bentuk kelaparan dan kekurangan gizi, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaiki nutrisi pada 2030.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Menyiapkan SDM Sehat Berkualitas

INDONESIA Emas 2045 hanya tinggal 23 tahun lagi. Pertanyaannya, apakah dengan semua rencana, semua *roadmap* yang disiapkan, dan semua infrastruktur yang sedang dibangun, telah disiapkan pula sumber daya manusia (SDM)-nya, dalam hal ini SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tapi yang paling utama ialah yang memiliki kualitas, kapabilitas, dan kecerdasan, serta sehat jasmani dan rohani?

Pertanyaan kritis itu dilontarkan Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, saat membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) pada Rabu, 7 September 2022. Menurut Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, pertanyaan itu tidak hanya harus

dijawab oleh pemerintah, atau Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan, tetapi mesti dijawab bersama karena SDM yang sehat dan berkualitas menjadi tantangan bersama.

Mengapa menjadi tantangan bersama? Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya berada pada kategori darurat gizi. Lihat saja angka *stunting* yang cukup tinggi dan terjadi pergeseran pola hidup yang memperburuk situasi untuk menciptakan generasi yang sehat jasmani dan rohani.

Rerie mengajak untuk mengingat kembali salah satu poin dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) Nomor 2: *Zero Hunger*, yang memastikan bahwa semua langkah harus memiliki tujuan untuk mengakhiri semua bentuk kelaparan dan kekurangan gizi, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaiki nutrisi pada 2030.

Pertanyaannya, dari posisi sekarang sampai 2030, sudahkah kita mengidentifikasi gap yang ada? Pada 2030 ke 2045 menyambut Indonesia Emas, di saat Indonesia memerlukan generasi yang betul-betul sehat jasmani dan rohani, apa yang harus dilakukan?

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, kata Rerie, harus juga ditegaskan bahwa tidak boleh menafikan kesehatan tenaga kerja. Bagaimana posisi kesehatan para pekerja di Indonesia saat ini?

Indonesia, kata Rerie, masih memiliki pekerjaan rumah berhubungan dengan *stunting*, serta belum sepenuhnya terbebas atau baru saja melewati periode pandemi. ■



Stunting dimulai sejak dalam kandungan saat pembuahan dan terbawa hingga si bayi berusia dua tahun. Semenjak di dalam rahim, janin memerlukan energi.”

Muhammad Rizal Damanik

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

3 Akses terhadap Pangan Bergizi

DATA Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan situasi kesehatan dan gizi di Indonesia, sejak ibu hamil memang cukup memprihatinkan. Hampir separuh jumlah ibu hamil menderita anemia, padahal itulah masa tumbuh kembang janin.

Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, dokter Ni Made Diah Permata Laksmi, mengungkapkan bahwa selain anemia, 17% ibu hamil juga menderita kekurangan energi kronis (KEK). Bahkan sebenarnya sebelum hamil pun 20% calon ibu atau wanita usia subur sudah terkena anemia dan 14% KEK. Jadi perlu ada program peningkatan gizi bagi calon pengantin dan ibu hamil karena anemia ataupun KEK berdampak

pada bayi dan balita.

Data Riskesdas itu juga menunjukkan sebanyak 29% bayi lahir prematur dan 6% bayi lahir dengan berat rendah yang akan memengaruhi juga pada angka *stunting*.

Pola makan pun, kata Ni Made, cukup memprihatinkan. Masyarakat Indonesia senang mengonsumsi makanan manis dan asin yang memang kurang bergizi. Akibatnya, angka obesitas cukup meningkat. Hal itu diperparah dengan perilaku *sedentary* (kurang bergerak) di kalangan anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa.

Faktor-faktor yang memengaruhi status gizi ialah asupan, akses terhadap pangan bergizi, dan ketersediaan keanekaragaman pangan bergizi di lingkungan pasar. Ini masalah umum di Indonesia.

Pola konsumsi makanan masyarakat Indonesia, tambah Ni Made, juga kurang baik. Hampir setengah jumlah penduduk Indonesia memiliki angka kecukupan energi kurang 80%. Ini menunjukkan konsumsi yang tidak memenuhi gizi seimbang. Keadaan itu juga menimbulkan pergeseran risiko sakit dan kematian di Indonesia. Pada 2007 persoalan malnutrisi sebagai penyebab pertama sakit dan kematian. Kemudian pada 2017 bergeser bahwa risiko diet meningkat, menjadi penyumbang terbanyak dari faktor-faktor sakit.

Pemerintah, kata Ni Made lagi, melakukan intervensi gizi berdasarkan siklus hidup. Semenjak ibu hamil sudah dilakukan in-

tervensi gizi seimbang untuk memperbaiki kondisi ibu dan janin. Perlakuan itu mengingat kondisi sebagian ibu hamil mengalami anemia.

Intervensi gizi seimbang juga dilakukan melalui program suplementasi tablet vitamin A saat ibu menyusui. Setelah enam bulan, bayi memerlukan asupan makanan tambahan atau makanan fungsional.

Suplementasi vitamin A untuk anak remaja sudah dimulai sejak periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memberikan suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 41/2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, kata Ni Made, tidak hanya mengatur soal gizi yaitu aneka ragam pangan, tetapi juga menyangkut perilaku hidup bersih, sehat, termasuk cuci tangan pakai sabun. Selain itu, tentang berat badan. Artinya memantau status gizi tetap dalam berat badan atau tinggi badan normal, bukan malnutrisi atau obesitas.

Terkait 10 pesan umum gizi seimbang, prinsipnya ialah aneka ragam pangan dengan porsi yang cukup, kandungan yang beranekaragam, cukup minum, membatasi gula, garam, dan minyak, serta perilaku hidup bersih sehat, termasuk cuci tangan dan aktivitas fisik.

Salah satu persoalan terkait gizi di Indonesia ialah semakin meningkatnya kasus obesitas. Menurut Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan



Petugas melayani warga yang memeriksakan tumbuh kembang anak mereka di Posyandu Kompleks Astek, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/9/2023). Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 72/2021 menargetkan angka *stunting* di Indonesia menjadi 14% pada 2024.

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Muhammad Rizal Damani, diperkirakan pada 2029 satu dari dua orang Indonesia akan mengalami obesitas. Ini tentu menjadi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini.

Obesitas secara sederhana didefinisikan sebagai terlalu banyak *input* daripada *output*. Berbagai aktivitas masyarakat saat ini cenderung rendah energi jika dibandingkan dengan asupan

yang masuk. Kita bekerja atau anak-anak bermain menggunakan gadget. Tidak seperti sekitar 30 tahun lalu, anak-anak benar-benar memanjat pohon atau benar-benar bermain bola. Saat ini, anak-anak bermain bola lebih banyak berupa gim.

Isu yang menjadi program prioritas nasional sekarang ini ialah *stunting*. Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 72/2021 menargetkan angka *stunting* di Indonesia menjadi 14% pada 2024 dari saat ini sekitar 24,4%.

Ada beberapa provinsi dengan angka *stunting* di atas 30%, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan. Kita berharap angka *stunting* di daerah-daerah itu terus turun.

Stunting, kata Rizal, biasa disebut tumbang pertumbuhan, yang dipicu kekurangan gizi kronis atau dalam kurun waktu lama mengalami infeksi berulang. Sebagian masyarakat menyebut *stunting* sebagai pendek karena mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Namun, sebenarnya gangguan bukan hanya pada pertumbuhan sel tulang tungkai kaki sehingga si anak menjadi pendek. *Stunting* dimulai sejak dalam kandungan saat pembuahan dan terbawa hingga si bayi berusia dua tahun. Semenjak di dalam rahim, janin memerlukan energi. Seandainya terjadi kekurangan energi akan mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Yang lebih utama ialah akibat *stunting* tersebut pertumbuhan sel otak si bayi tidak maksimal.

Masalah *stunting* di Indonesia sudah demikian lama. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengarahkan agar program penurunan angka *stunting* lebih dipercepat. Bertahun-tahun penurunan angka *stunting* relatif kecil dan ditargetkan setiap tahun turun sekitar 3%. Diharapkan, dengan adanya Perpres No. 72/2021, penurunannya menjadi lebih cepat sehingga pada 2024 bisa mencapai 14%.

Penyebab *stunting*, kata Rizal lagi, memang multikompleks, tidak hanya persoalan kurang gizi. Berbicara gizi berarti apakah bahan pangan tersebut tersedia di satu lokasi. Jika tersedia, apakah harganya terjangkau dan apakah masyarakat paham mengolahnya secara benar? Hal-hal tersebut menyangkut pengetahuan masyarakat mengenai *stunting*.

Upaya percepatan penurunan *stunting* tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi harus melibatkan swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat, juga media untuk menginformasikan percepatan penurunan *stunting*. ■



Guru yang unggul tidak akan didapatkan apabila profesi tersebut belum menjadi profesi yang dibanggakan oleh setiap orang.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

4 Literasi dan Edukasi Gizi

MAKANAN yang dikonsumsi balita di Indonesia belum banyak ragam. Itu juga terjadi di provinsi-provinsi yang kaya. Karena itu, harus dicari solusi yang tepat agar bayi-bayi mengonsumsi ragam makanan bergizi yang ber-sumber dari lingkungannya.

Balita yang *stunting* dan *non-stunting*, kata Annis Catur Adi, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya, memang berbeda tingkat konsumsinya, baik terkait dengan gizi makro, energi protein, maupun gizi mikro.

Memang ada kaitan antara kualitas konsumsi dan sumber pendapatan. Sangat besar gap antara masyarakat berpendapatan

tinggi dan berpenghasilan rendah jika dilihat dari makanan yang dikonsumsi. Masyarakat berpendapatan tinggi mengonsumsi makanan berkualitas seperti daging dan susu.

Selama ini, kata Annis, yang paling banyak dipikirkan ialah soal penyuluhan mengenai makanan bergizi dan pendidikan, tapi tidak disampaikan soal keberadaan pangan tersebut. Contohnya ikan. Jepang bukan penghasil ikan, tapi keberadaan ikan sangat dekat dengan masyarakat Jepang. Di mana-mana ikan dengan sangat mudah diperoleh. Berbeda dengan di Indonesia sebagai negara penghasil ikan, tapi untuk menemukan ikan yang *ready to eat* sangat susah. Makanya, penyuluhan ‘ayo makan udang’ atau ‘ayo makan ikan’ tidak berdampak signifikan karena akses terhadap pangan yang mengandung ikan masih jauh.

Indonesia mempunyai potensi pangan lokal luar biasa yang bisa diolah menjadi makanan era kekinian seperti makanan instan, asalkan formulanya diperbaiki dengan memasukkan makanan lokal yang unggul, misalnya bahan makanan yang mengandung protein hewani.

Obesitas sebagai akibat kelebihan pangan bergizi juga menjadi topik yang sangat serius. Faktanya makanan yang beredar banyak mengandung GGL (gula, garam, lemak) melebihi standar. Ke depan, meskipun tidak terpisahkan dengan makanan modern, masyarakat mulai melek dengan manfaat makanan sehat.

Literasi dan edukasi gizi bagi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting karena menjadi bekal dalam memilih gaya hidup

sekaligus melakukan usaha yang baik dan menyehatkan. Namun, edukasi dan literasi gizi akan menjadi tidak optimal jika tidak didukung kemudahan akses masyarakat terhadap makanan sehat.

Meskipun secara alami Indonesia memiliki banyak ragam pangan bergizi, perlu ada strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap pangan bergizi itu. Terkadang ingin mengonsumsi makanan lebih sehat, tapi ketersediaannya terbatas.

Karena itu, kata Agnes A. Mallipu, Direktur The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia, perlu menciptakan lingkungan yang kondusif agar produksi pangan bergizi dan aman semakin meningkat.

Upaya meningkatkan konsumsi pangan bergizi dan aman secara berkelanjutan dilakukan GAIN melalui sistem pangan. Caranya dengan memberikan makanan bergizi kepada bayi dan anak serta ibu menyusui.

Inovasi yang dilakukan, kata Agnes, dengan pendekatan *emotional demonstration* (emodemo), yakni bentuk pendekatan yang lebih memicu emosi ibu supaya dapat memperbaiki pola pemberian makanan kepada bayi dan anak.

Di samping itu, GAIN melaksanakan program dengan sasaran gizi remaja. Kenapa gizi remaja? Itu terkait erat dengan meningkatnya obesitas dan juga persiapan sebelum memasuki masa kehamilan. ■



Makanan yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan dari aspek enakness saja, yang malah dapat membahayakan kesehatan.”

Amelia Anggraini

Ketua Bidang Perempuan dan Anak
DPP Partai NasDem

5 Beban Ganda Gizi

PERSOALAN gizi membawa beban ganda (*double burden*). Pertama, kekurangan gizi menyebabkan prevalensi *stunting* tinggi. Kedua, kelebihan gizi menaikkan prevalensi anak-anak obesitas.

Menurut Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, persoalan gizi terletak pada bagaimana memilih bahan pangan yang baik. Metode memilih bahan pangan yang baik itu harus disosialisasikan agar masyarakat paham dan melakukannya.

Di sekitar kita, kata Felly, banyak bahan pangan bergizi, dari buah-buahan hingga ikan, misalnya. Bahan pangan tersebut harus diolah menjadi makanan yang sehat. Jadi tergantung pengo-

lahannya.

Harus diakui, kata Felly, banyak orang tidak paham atau tidak tahu mengolah bahan makanan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi, padahal sebetulnya tidak mahal. Lagi-lagi sosialisasi soal itu sangat penting. Lalu, siapakah yang semestinya berperan? Siapa yang harus mencari, menemukan, dan memberikan pelatihan-pelatihan secara masif kepada masyarakat? Bagaimana membuat makanan yang enak, bergizi cukup, dan siap saji untuk diberikan kepada keluarga sendiri?.

Komisi IX DPR, kata legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu, selalu membicarakan dengan Kementerian Kesehatan mengenai makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita untuk tambahan gizi. Hal tersebut untuk melihat kemungkinan pengayaan makanan tambahan dan kontinuitas pemberian makanan tambahan itu agar target penurunan angka *stunting* bisa tercapai.

Adapun hal lain yang mesti diperhatikan ialah pemberian ASI. Harus ada kampanye masif agar ibu-ibu muda tidak segan memberikan ASI kepada putra-putri mereka. Kalau bisa sampai 23 bulan, atau minimal 6 bulan itu ASI eksklusif, supaya daya tahan tubuh anak betul-betul baik dan tidak mudah terkena virus.

Data Unicef menunjukkan, selama dua tahun terakhir pandemi, sebanyak 7 juta anak bermasalah dengan gizi dan sudah menuju ke *stunting*. Salah satu sebab lemahnya daya tahan itu ialah kurangnya ASI di masa bayi.



Beberapa remaja sedang menikmati hidangan di rumah makan, beberapa waktu lalu. Remaja Indonesia saat ini menghadapi tiga masalah gizi atau *triple burden of malnutrition*. Ketiga masalah gizi tersebut ialah kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro anemia. Obesitas pada remaja berada pada titik yang cukup mengkhawatirkan.

Permasalahan gizi, *stunting*, *wasting*, *underweight* dan obesitas itu merupakan realitas di Indonesia saat ini. Mengutip tim peneliti Departemen Ilmu Gizi FKUI-RSCM dan klaster Human Nutrition Research Center FKUI yang berkolaborasi dengan Unicef, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengatakan bahwa penurunan aktivitas fisik baik di dalam maupun luar sekolah, kemudian gangguan pola makan

dan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dari luar rumah, juga buruknya keragaman makanan, merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah gizi di kalangan remaja.

Remaja Indonesia saat ini menghadapi tiga masalah gizi atau *triple burden of malnutrition*. Ketiga masalah gizi tersebut ialah kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro anemia. Obesitas pada remaja berada pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Riskesdas, obesitas pada remaja meningkat secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2013 hingga 2018. Anemia pada remaja juga menjadi masalah yang berakibat pada gangguan perkembangan kognitif dan motorik serta produktivitas kerja yang nantinya berefek pada bayi yang dilahirkan.

Gaya hidup modern, tambah Amelia, turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat termasuk tingginya konsumsi gula dan garam. Selain itu, ada pula pergeseran perilaku konsumsi dari tradisional ke instan.

Mengenai penurunan aktivitas fisik, kata Amelia, infrastruktur di ruang publik tidak mendukung aktivitas fisik. Ruang publik di Indonesia tidak didesain untuk menstimulasi masyarakat melakukan kegiatan fisik. Begitu pula pola pembangunan infrastruktur, terutama dalam transportasi publik, tidak memadai. Padahal bertransportasi publik ialah salah satu kegiatan fisik. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, di sana orang lebih banyak naik sepeda atau berjalan kaki, sedangkan di Indonesia

orang malas melakukan hal itu. Riset Universitas Stanford, Amerika Serikat, menyebutkan masyarakat Indonesia paling malas berjalan kaki.

Kelebihan gizi atau obesitas tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu *stakeholder*, tetapi harus lintas sektor karena berkaitan dengan gaya hidup dan ruang gerak masyarakat. Misalnya, Kementerian Kesehatan menuntaskan kekurangan gizi atau *stunting* dan obesitas, kemudian Kementerian PUPR menyediakan ruang publik dan menstimulasi kegiatan fisik.

Saat ini, di kalangan anak muda, ada bahasa gaul *mager* alias malas gerak. Ungkapan itu mungkin sedikit banyak terpengaruh masa pandemi di saat orang-orang bekerja di rumah secara daring sehingga tidak banyak bergerak fisik. Karena itu, harus ada kampanye lagi agar masyarakat mau melakukan kegiatan fisik.

Pemenuhan gizi seimbang harus melibatkan swasta karena tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Kampanye gizi seimbang perlu ditingkatkan di tengah pesatnya industri *food & beverage* yang ternyata mengandung gula dan garam berlebih. Makanan yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan dari aspek enak saja, yang malah dapat membahayakan kesehatan.

Permasalahan gizi terkait pula dengan budaya suatu masyarakat. Menurut Dyah Puspitorini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020, budaya di Indonesia masih menganggap pemenuhan gizi menjadi tanggung jawab negara



MIRAMDANI

Peserta mengayuh sepeda mengikuti Gowes Ciptakan Harapan (Gocapan) di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Sabtu (18/2/2023). Gowes bersama yang diikuti ratusan karyawan Media Group dalam rangkaian Journalist Day 2023 ini mengelilingi Alam Sutera sepanjang 10 km. Aktivitas fisik menjadi sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat.

atau pemerintah.

Sebagai contoh, di daerah Rawa Belut, Cianjur, Jawa Barat, masyarakat menghasilkan sayur-sayuran berkualitas tinggi. Namun, yang mereka konsumsi ialah sisa hasil panen karena yang bagus dijual. Akibatnya, kata Dyah, kasus *stunting* di Rawa Belut cukup tinggi karena mereka mengonsumsi sayuran yang tidak terqualifikasi untuk dijual.

Faktor budaya yang lain ialah di rumah tangga. Saat makan, yang mendapatkan prioritas ialah bapak, bukan ibu. Padahal ibu-ibu kan hamil dan menyusui sehingga memerlukan asupan gizi yang baik. Jika di dalam rumah tangga ada pembagian proporsi pemenuhan gizi yang sama antara bapak, ibu, dan anak, angka *stunting* bisa turun dengan cepat.

Hal lain ialah penyediaan pos-pos gizi di lokasi umum. Tidak perlu mewah. Pos gizi itu bisa memberikan asupan tambahan gizi, walaupun tidak maksimal tapi tercukupi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika itu terlaksana secara masif, konsumsi makanan dapat terkontrol dan akan mengurangi *stunting* dan obesitas.

Wartawan senior Saur Hutabarat, saat menutup diskusi, mengingatkan bahwa WHO pernah merilis temuan yang menyebutkan Eropa dalam hal obesitas sudah mendekati keadaan yang disebut sebagai epidemi obesitas. Di Amerika Serikat, Michelle Obama mencanangkan program penurunan berat badan anak-anak, tetapi hingga sekarang belum berhasil.

Karena itu, data BPS mengenai angka obesitas di Indonesia, kata Saur, harus benar-benar diperhatikan agar tidak menjadi masalah di masa depan. Bukan saja soal mengontrol asupan atau melakukan aktivitas fisik, tetapi sampai pada kendali orang per orang dengan berjalan kaki pagi hari dan memiliki alat timbangan berat badan di rumah. Kebiasaan mengukur berat badan setiap pagi sudah harus disosialisasikan. ■

IV

A construction site at dusk. In the foreground, there are large stacks of white sacks, likely cement, with some workers visible. One worker is in the center, wearing a high-visibility vest and a hard hat, holding a sack. Another worker is on the left, bent over. In the background, there are tall metal structures, possibly part of a bridge or a large building under construction. The sky is dark blue, and the overall scene is dimly lit.

Menakar Ketahanan Pangan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi

1 Latar Belakang: Saat Kelaparan Mengancam Penduduk Bumi

THE World Food Programme (WFP), sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada 18 September 2020 mengeluarkan peringatan mengenai bahaya tambahan dari gelombang pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini.

Direktur Eksekutif WFP, David Beasley, mengungkapkan kondisi terkini di Benua Afrika akibat pandemi covid-19. Dia menyebut situasi di sana seperti hidup dan mati.

Di Republik Kongo, 15 juta lebih warga dalam ancaman kelaparan. Hal serupa juga menimpa 3 juta orang di Burkina Faso. Di Timur Tengah seperti Yaman, ungkap Beasley, 20 juta orang kekurangan pangan.

Wabah covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi menurun. Akibatnya, jumlah kasus kemiskinan dan pengangguran pun meningkat. Peristiwa itu disimpulkan Beasly sebagai yang terburuk sejak 1990.

Sebenarnya, jauh sebelum pandemi covid-19, dunia sudah menghadapi ancaman menyusutnya lahan pertanian hingga 44% dan FAO (Food and Agricultural Organization) melaporkan lebih dari 113 juta orang dari 53 negara dalam keadaan kelaparan akut.

Kekurangan pangan ini akan memunculkan masalah baru di masa mendatang, seperti *stunting*, terutama karena para ibu menyusui dan juga perempuan hamil serta anak usia dini kekurangan gizi.

Saat ini, pemerintah lebih fokus pada pencegahan penyebaran covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Padahal seharusnya fokus dan menaruh perhatian besar pula pada kemampuan bangsa dalam menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan sinyal resesi ekonomi akan terjadi pada akhir September 2020. Jika benar, tentu akan menambah tekanan pada kemampuan pengeluaran rumah tangga.

Rakyat akan mengalami kesulitan membeli kebutuhan pangan di masa mendatang. Ditambah lagi, gelombang pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dipastikan membuat pendapatan rakyat merosot tajam.

Merespons kondisi-kondisi seperti itulah Forum Diskusi Den-

pasar 12 pada Rabu, 30 September 2020, menggelar diskusi bertajuk Menakar Ketahanan Pangan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi. ■



Pemerintah harus memperluas akses petani, peternak, dan nelayan sampai ke tingkat desa, juga menyediakan stimulus ekonomi dan perlindungan jaring pengaman sosial sekaligus menekan laju kemiskinan di perdesaan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mengantisipasi Efek Pandemi

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan, dalam situasi di tengah tekanan yang bertubi-tubi, pandemi covid-19 memunculkan efek tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.

Namun, perempuan yang akrab disapa Rerie itu mengaku agak lega sebab produksi pangan atau pertanian masih mengalami pertumbuhan. “Kita melihat ada secercah harapan di sini,” ujarnya.

Lalu bagaimana seharusnya Indonesia bertahan menghadapi pandemi? Ia tidak menampik bahwa wabah penyakit yang melanda dunia mau tidak mau akan menaikkan jumlah penduduk yang terancam kelaparan.

Mengutip data Global Hunger Index (GHI) 2019, Rerie mengatakan, Indonesia menempati peringkat ke-70 dari 117 negara dengan skor 20,1%.

Artinya, Indonesia berada pada level serius terkait dengan masalah ketahanan pangan. “Memang tidak mengkhawatirkan, tetapi kita masih memiliki persoalan terkait *stunting*, tingkat kematian balita, dan populasi masyarakat yang mengalami kurang gizi.”

Indonesia, menurut legislator NasDem ini, masih menghadapi persoalan yang sangat mendasar, yaitu kekurangan gizi (9%), prevalensi balita kurang nutrisi (11%), prevalensi *stunting* balita (31%), dan tingkat kematian balita (2%).

Di luar itu, data WFP menunjukkan Indonesia surplus beras sebanyak 6,4 juta ton pada Juni 2020 kendati sempat menurun 13% pada Juni 2019.

Realitas itu, kata dia, menunjukkan kondisi ketahanan pangan Indonesia masih relatif aman. Persoalan berikutnya ialah apa yang perlu dilakukan?

“Bagaimana agar petani sebagai elemen penting dalam ketahanan pangan dapat berperan secara aktif mengatasi persoalan yang telah dan akan muncul?” tanya Rerie.

Anggota Komisi X DPR RI ini menjelaskan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menuju kemandirian pangan melalui teknologi pertanian, reforma agraria, dan regenerasi petani.

Indonesia juga harus melakukan terobosan lain, yakni mem-

perluas akses petani, peternak, dan nelayan sampai ke tingkat desa, juga menyediakan stimulus ekonomi dan perlindungan jaring pengaman sosial sekaligus menekan laju kemiskinan di perdesaan.

“Inovasi program melalui berbagai kebijakan dan perlindungan kepada para petani dan *stakeholder* guna ketahanan pangan sangat diharapkan,” tukas Rerie. ■



Program pemanfaatan lahan pekarangan akan terus didorong, khususnya di kota-kota besar, agar pekarangan milik warga bisa menghasilkan tanaman produktif.”

Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian

3 Sektor Pertanian Jadi Andalan

MENTERI Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengakui pangan dan utamanya ketahanan pangan adalah sesuatu yang sangat strategis karena berdampak langsung terhadap 273 juta penduduk Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Syahrul, ketahanan pangan adalah masalah yang secara penuh harus diseriusi dan ketersediaan pangan harus terjamin.

Menurutnya, kebijakan Kementerian Pertanian adalah kepentingan rakyat dan keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani. Itu menjadi tugas utama untuk bisa menghadirkan ketahanan pangan yang lebih baik.

Ia tidak memungkiri bahwa pandemi covid-19 berdampak pada pelemahan ekonomi, tidak saja di Indonesia, tapi juga di

seluruh dunia.

Ia mengibaratkan situasi saat ini, “Apabila kita memiliki pakaian yang sudah lusuh, kotor, kalau mau ganti, bisa ditunda tahun depan. Kalau kita punya mobil dan sepeda motor mogok-mogok, bisalah diperbaiki sedikit-sedikit. Bahkan kalau perlu didorong asal bisa jalan dan kita bisa menunda tahun depan untuk membeli yang baru.”

Namun, soal makanan, tidak boleh ditunda. Oleh sebab itu, kata Syahrul, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ia menjadi kebutuhan paling dasar agar bisa menghadirkan negara yang tetap damai, tenteram, dan teratur.

Mentan menjelaskan, ada 12 ketahanan pangan dasar yang harus dikendalikan oleh Kementerian Pertanian, di antaranya beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Itulah kebutuhan dasar pangan yang harus terus dipersiapkan. Lalu bagaimana ketersediaan komoditas tersebut untuk tahun ini? Syahrul mengatakan, “Kondisi untuk tahun 2020, insya Allah tetap aman. Bisa dikendalikan dengan baik.”

Bagaimana dengan ketergantungan produk pangan kita dari luar? Syahrul mengakui ada beberapa komoditas pertanian yang masih diimpor, yaitu bawang putih dan daging sapi.

“Tetapi dalam hitungan-hitungan yang ada, kita perkiraan yang ada, semuanya masih tersedia dengan baik,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa dalam mengelola ketahanan pangan, ada dua

program utama yang dilakukan saat musim tanam.

Pertama, musim tanam 1 (MT 1) dilakukan saat musim hujan. Ia menyebut ada 7,46 juta hektare areal pertanian yang sudah ditanami komoditas pertanian. MT 1 berlangsung mulai Januari hingga Juni.

Dari MT 1, jelas Syahrul, “Kita memiliki kurang lebih 29,78 juta ton gabah dan itu setara kurang lebih 17 juta ton beras. Jadi, dari Januari ke Juni, kami memiliki hasil produksi 17 juta ton beras.”

Menteri melanjutkan, “Kemudian ada yang *ter-cover* dari musim tanam 2019 kurang lebih 5 juta ton sehingga kita punya total stok beras sebanyak 23 juta ton. Sementara yang kita konsumsi sampai dengan Agustus 2020 sebanyak 15 juta ton.”

Kedua, musim tanam 2 (MT 2) adalah musim tanam gadu. Syahrul menjelaskan, Organisasi Pangan Dunia (WHO) sudah memberikan *warning* bahwa akan terjadi kekeringan.

Merespons peringatan WHO, Kementerian Pertanian langsung mengejar percepatan MT 2. “Hampir setiap minggu di setiap provinsi, kami langsung melakukan pengecekan terhadap perjalanan gerakan percepatan musim tanam dua,” kata Syahrul.

Menurut dia, di MT 2 itu kementerian yang dipimpinnya mengejar pada area-area pertanian yang ada irigasinya seluas kurang lebih 5,6 juta hektare. “Dari sini, kita berharap bisa mencapai 15 juta ton padi.”

Seperti apa kondisi riil di lapangan? Syahrul menjawab, “Kondisi MT 2, sampai sekarang ini sudah tertanami 87%. Kami



MIUSMAN ISKANDAR

Pekerja melakukan bongkar muat beras di salah satu agen beras di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Beras adalah salah satu komoditas yang menjadi ketahanan pangan dasar, termasuk jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

masih punya empat bulan lagi. Oleh karena itu, kami yakin bisa tercapai.”

Hitung-hitungannya, “Kalau dari hasil produksi padi ditambah stok yang tersedia sebelumnya, maka kita akan mendapatkan 22 juta ton. Mudah-mudahan di perjalanan tidak ada halangan sehingga kita punya 22 juta ton beras sampai dengan akhir Desember 2020.”

Cukupkah? Ia menjelaskan kebutuhan makan orang Indonesia akan beras (nasi), sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) mulai Juli sampai Desember 2020, kurang lebih 15 juta ton.

Ditambah dengan stok 2020, untuk tahun 2021, Indonesia masih punya produksi beras di atas 6 juta-7 juta ton. “Inilah kondisi dasar yang ada,” imbuh Syahrul.

Dalam menghadapi pandemi covid-19, Syahrul menjelaskan, Kementerian Pertanian tidak hanya bersandar atau mengandalkan program rutin seperti yang sudah berjalan.

Ia menyebut ada cara lain untuk meningkatkan produksi pangan, yakni pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah (30 ribu hektare) dan diperluas menjadi kurang lebih 200 ribu hektare. “Dari sini kita berharap ada tambahan produksi pangan di luar yang sudah masuk dalam program inti di MT 1,” tutur Syahrul.

Selain itu, perluasan di area tanam yang bisa diselengi dengan berbagai komoditas lain seperti bawang merah dan cabai, terutama di beberapa daerah yang mengalami defisit, akan ditopang agar ketahanan pangan menjadi lebih baik.

Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian juga melakukan pendampingan untuk diversifikasi pangan lokal. “Tujuannya jangan hanya mengandalkan beras sebagai makanan utama.”

Menteri mengatakan diversifikasi pangan itu antara lain singkong, jagung, sagu, pisang, kentang, talas, dan sorgum. “Beragam tanaman ini akan dikembangkan dan kita pacu di beberapa daerah.”

Di samping itu, program pemanfaatan lahan pekarangan juga akan terus didorong, khususnya di kota-kota besar, agar pekarangan milik warga bisa menghasilkan tanaman produktif.

Tanaman pekarangan, menurut Syahrul, ada yang 20 hari sudah bisa dipanen. Ada pula yang satu, dua, dan tiga bulan sudah dipanen.

Masih dalam rangka ketahanan pangan, Kementerian Pertanian juga membuat cadangan-cadangan logistik atau lumbung pangan. “Selama ini kita punya lumbung pangan nasional yang terus kita jaga,” tambah Syahrul.

Selain Bulog sebagai lumbung pangan nasional, di daerah juga ada lumbung pangan provinsi yang dijaga oleh gubernur. Lumbung pangan di tingkat kabupaten pun dihidupkan. “Keberadaan lumbung pangan desa juga akan terus didorong dengan melibatkan Kementerian Desa sebagai asisten kita,” kata Syahrul.

Dalam menghadapi pandemi covid-19, Syahrul menjelaskan pihaknya melakukan stok pangan untuk dua tahun sekaligus, bukan hanya untuk 2020. “Sehingga dalam dua tahun ke depan, kegelisahan-kegelisahan bisa terjawab melalui ketahanan pangan yang ada.”

Mengutip data BPS, Mentan mengungkapkan, pada pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2020, hanya pertanian yang tumbuh 16,24%. Jika digabung dengan sektor perikanan, produk pangan secara nasional tumbuh 22,4%.

“Kalau melihat kondisi yang ada sekarang, maka insya Allah

kami sangat yakin ketahanan pangan kita terus bertumbuh. Begitu pula ekspor produk pertanian kita tumbuh di atas 22%. Pada Agustus 2020, nilai ekspornya kurang lebih Rp30 triliun. Dari Januari ke Juli, ekspor pertanian kita kurang lebih Rp251 triliun,” ungkapinya.

Jadi dalam menghadapi pandemi, masih menurut Syahrul, “Praktis kita hanya tertahan di Februari-Maret. Pada April 2020 kita sudah mulai bangkit kembali.”

Bagaimana dengan program *food estate* seluas 30 ribu hektare yang diributkan? Menjawab pertanyaan ini, Syahrul mengatakan, “Insya Allah akan kami selesaikan dan tahun baru ini (2021) ada percontohnya.”

Syahrul mengatakan semua daerah sekarang bergairah memberikan dukungan di bidang pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami bangga Kementerian Pertanian mendapat apresiasi dari Presiden dan Wakil Presiden bahwa sektor pertanian jadi tumpuan dan topangan ekonomi agar tidak masuk ke krisis yang lebih dalam,” tandas Mentan Syahrul. ■



Distribusi bahan-bahan yang masih menghadapi kendala terkait dengan akses juga menjadi penyebab disparitas harga yang sangat jauh.”

Lukmanul Hakim

Staf Khusus Wakil Presiden
Bidang Ekonomi dan Keuangan

4 Mencari Solusi Over Stock Produk Pertanian

KEPALA Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di masa dan pascapandemi covid-19 ialah adanya perubahan *supply* dan *demand*.

Hal itu, menurut dia, pasti berpengaruh terhadap harga karena adanya berbagai pembatasan kegiatan masyarakat, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi prioritas pemerintah dalam membatasi penyebaran covid-19.

Perubahan cara berbelanja masyarakat dari *offline* ke *online* juga mengakibatkan beberapa transaksi tidak bisa diprediksi dengan cermat sehingga kalkulasinya terhadap kebutuhan kadang-kadang di bawah yang diharapkan.

“Namun, kita sudah melakukan antisipasi berapa persentase *range* untuk transaksi *online* ini. Kita juga *aware* dengan adanya *export restriction*, adanya ancaman kekeringan secara global atau krisis global yang disuarakan beberapa pihak, di antaranya lembaga pangan dunia,” kata Agung.

Pandemi covid-19 juga menyebabkan pengangguran di banyak negara, termasuk Indonesia, meningkat. “Solusinya, kita mengharapkan datang dari sektor pertanian,” ujar Agung.

Memasuki masa pandemi, daya beli masyarakat menurun. Namun, imbuh Agung, kualitas yang dikonsumsi masyarakat rata-rata ada peningkatan.

Indeks ketahanan pangan Indonesia mulai dari Januari hingga April 2020, seperti disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menurun dari 46,39% menjadi 40,10%.

Namun, setelah April sampai Agustus 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 47,68%. “Ini harus kita jaga sampai dengan akhir tahun sesuai dengan prediksi ketersediaan pangan kita,” tutur Agung.

Lalu, langkah apa lagi yang harus dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia?

Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah mengingatkan semua pihak terkait *early warning* dari Badan Pangan Dunia (FAO).

“Mendengar informasi dari Menteri Pertanian kami lega,

karena sebelumnya kami agak stres tentang ketersediaan pangan kita,” kata Lukmanul.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau kering terjadi di bulan April. Akan tetapi, realitanya ternyata sekarang ini terjadi yang diistilahkan oleh BMKG sebagai kemarau basah. Ada beberapa daerah yang hujan. “Insya Allah masa tanam sampai ketiga masih bisa dilakukan,” ungkap Lukmanul.

Ia menambahkan, Indonesia adalah negara kepulauan. Realitas itu kadang-kadang memunculkan persoalan tersendiri dalam akses sehingga seperti ada kekosongan pangan di suatu daerah, sementara di daerah lain *over stock*.

Lukmanul mengakui kondisi itu memang menjadi kendala. Ia menyarankan, dengan fakta tersebut, dapat dibuat program gabungan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa membuat akses-akses ke daerah yang selama ini menjadi kendala.

Meskipun sekarang sudah ada *online* pangan, kata Lukmanul, pengiriman bahan pangan tetap menggunakan alat transportasi. “Ini memang menjadi permasalahan tersendiri.”

Di zaman Orde Baru, pemerintah pernah mendiversifikasikan produk pangan. Namun, fakta di lapangan, diversifikasi itu diubah menjadi ‘memberaskan Indonesia’ dan ‘mengindonesiakan beras’.

“Jadi, teman-teman kita yang di Papua sana, yang makanan



MI/ADAM DWI

Pedagang menjajakan bahan pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Harga pangan dan bahan pokok cenderung naik selama pandemi covid-19.

pokoknya ubi, sangat mungkin generasi milenialnya sudah lupa dengan ubi. Atau masyarakat Maluku, yang makanan pokoknya sagu, mungkin juga sudah lupa,” tambah Lukmanul.

Padahal, kata dia, diversifikasi ini sebenarnya bagus karena tidak ada masalah dengan jenis-jenis pangan tersebut.

Lukmanul menjelaskan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengingatkan bahwa terjadi penurunan luasan lahan baku

sawah dari 11,38% menjadi 10,68% pada 2019 dan diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48% pada 2020.

Menurut Lukmanul, luas sawah-sawah itu kalau dihitung dengan jumlah panen hanya 1,4 kali dalam setahun. “Ini yang perlu kita siasati, bagaimana kita melakukan intensifikasi.”

Jika memang kondisinya seperti itu, bagaimana strategi membangun ketahanan pangan di Indonesia?

Lukmanul mengatakan, di Kementerian Pertanian ada dua strategi yang dilakukan, antara intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Tapi kami yakin para pakar lebih mendorong intensifikasi karena ekstensifikasi untuk jangka panjang,” kata dia seraya menambahkan bahwa membangun ketahanan pangan secara umum bisa melalui *food estate*.

Ia menjelaskan *food estate* yang sedang dikembangkan di Kalimantan ialah dengan membuka lahan baru, di samping ada pula variasi bagaimana mengonsumsi pangan dan tata kelola distribusi.

Lukmanul tidak memungkiri harga pangan dan bahan pokok cenderung naik selama pandemi covid-19. “Kita khawatir daya beli masyarakat terus turun karena adanya orang-orang miskin baru yang diikuti dengan pengangguran,” katanya.

Distribusi bahan-bahan yang masih menghadapi kendala terkait dengan akses, disebut Lukmanul, juga menjadi penyebab disparitas harga yang sangat jauh.

“Ini adalah kenyataan yang dihadapi dunia pangan. Wilayah

Indonesia sangat luas. Negara kepulauan, sementara alat transportasi kita masih sangat terbatas,” kata Lukmanul.

Ia mengusulkan perlunya badan penyangga produk hasil pertanian atau memanfaatkan badan yang sudah ada. Tugasnya membeli hasil produk pertanian sehingga bisa memberikan harapan bagi para petani.

Badan tersebut bisa menjaga agar produk pertanian tidak *over stock* sehingga harga bisa stabil dan distribusinya pun terjaga. ■



Harga beras di Indonesia yang paling mahal, tetapi keuntungan petaninya paling kecil.”

Sugiyanta

Dekan Fakultas Pertanian,
Institut Pertanian Bogor (IPB University)

5 Antara Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Diversifikasi Pangan

DEKAN Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB University), Sugiyanta, berpendapat bahwa melakukan ekstensifikasi pangan jauh lebih baik daripada intensifikasi dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Menurut dia, ekstensifikasi ialah yang paling logis karena biayanya tidak besar dan ada jaminan capaian lebih tinggi. Namun, karena di lapangan masih banyak kendala, ekstensifikasi produksi pangan sulit dilakukan.

Fakta di lapangan, luas sawah dan produktivitas padi nasional pada 2018 dan 2019 mengalami penurunan. “Kita khawatir kalau tidak ada tindakan dari pemerintah maupun petani, juga teknologi dan sebagainya, penurunan produksi padi akan terus

berlangsung,” kata Sugiyanta.

Benar, produktivitas pangan sampai 2020 memang terlihat masih aman, tetapi pembukaan lahan yang dilakukan sekarang belum tentu juga akan berdampak nyata pada penyediaan pangan 2020-2021, dan akan ada efeknya pada 2022-2023.

Sugiyanta mengajukan pertanyaan reflektif, “Lalu ketahanan pangan kita ada di mana?” Dia menjelaskan, ketahanan pangan bisa dibilang cukup tanpa memperhatikan sumbernya. Artinya, bisa dari dalam negeri atau impor.

“Kita sudah memiliki kemandirian pangan kalau 80% produksi sendiri. Kedaulatan pangan akan terjadi kalau 100% kita produksi sendiri, tidak bergantung pada luar negeri,” ujar Sugiyanta.

Kondisi Indonesia sekarang ini ialah kecukupan pangan karena masih ada impor beras. Dia mengingatkan, pada Desember hingga Februari biasanya Indonesia mengalami paceklik.

Pada September-Desember 2019 hingga Januari 2020 terjadi paceklik sehingga neraca pangan Indonesia negatif.

Sugiyanta mengungkapkan, sekarang Indonesia berada pada September 2020. Panen musim tanam kedua atau MT 2 sudah selesai. Adapun MT 1 berikutnya belum mulai. Biasanya pada Oktober dan November baru tanam.

“Kalau kita lihat hitung-hitungan neraca beras kita dengan konsumsi sekitar 312 gram per kapita per hari maka pada 2018-2019 kita hanya surplus 2,8 juta ton,” ungkap Sugiyanta.

Pada 2019 ke 2020 hampir sama. Indonesia masih dalam

kondisi positif. “Tetapi jika cadangan kita sebagaimana diungkap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekitar 5 juta ton, berarti sekitar dua bulan, kondisi kita sudah aman karena cadangan yang aman itu ada di kisaran 6 juta-9 juta ton untuk dua-tiga bulan,” ujar Sugiyanta.

Lalu apa yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangan secara ideal? Sugiyanta menegaskan, “Kita harus mampu meningkatkan produksi pangan sendiri tanpa harus impor.”

Untuk meningkatkan produksi pangan, menurut Sugiyanta hanya ada dua jalan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan pada lahan seluas 7,46 juta hektare itu?

Sugiyanta mengatakan, lahan yang 1 juta hektare bisa digunakan untuk menaikkan intensitas per tanaman maupun produktivitasnya dengan intensifikasi.

“Jadi jika produktivitasnya sekarang 5,2 juta ton, kita bisa naikkan menjadi 6,5 juta ton pada lahan yang 1 juta hektare, yang irigasi dan kondisi sawahnya bagus atau lahan kelas 1,” kata Sugiyanta.

Intensifikasi dalam konteks ini, menurut dia, “Kita meningkatkan produktivitas per satuan lahan dengan berbagai teknologi yang kita miliki.”

Ia menambahkan, terkait teknologi untuk meningkatkan produksi padi, Indonesia sudah punya, hanya tinggal penerapannya

yang harus dikawal. “Petani-petani kita memang perlu pengawalan.”

Ada pendekatan lain untuk ketahanan pangan, yakni mengurangi mengonsumsi beras. Di negara-negara lain pendekatan itu sudah berhasil, sedangkan di Indonesia belum.

Sugiyanta menyebutkan konsumsi beras di Indonesia memang masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan di negara-negara lain. Harus diakui, “Kita belum pernah berhasil mendiversifikasi pangan. Mungkin ini yang perlu kita rumuskan lebih baik sehingga kalau bisa konsumsi beras kita sekitar 80-90 kg per kapita. Kalau itu bisa kita kurangi sekitar 20%, tentu akan bagus sekali.”

Bagaimana dengan kesejahteraan petani? Sugiyanta mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, Indonesia paling tidak efisien. “Harga beras di Indonesia yang paling mahal, tetapi keuntungan petaninya paling kecil.”

Ketimpangan itu, menurut Sugiyanta, terletak pada sewa lahan dan tenaga kerja. Dengan melakukan intensifikasi, mesin-mesin pertanian bisa masuk ke lahan.

Pemerintah memang sudah membuat program pembagian mesin pertanian kepada para petani. Namun, program itu belum berjalan baik di lapangan. Dengan demikian, baik penanaman maupun pemanenan masih dilakukan secara manual. Ongkos produksi pun menjadi mahal.

“Itu semua memberatkan petani padi. Kalau tidak diperbarui,



MIRAMDANI

Petani mengolah hasil panen di Desa Sakerta Timur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (18/12/2021). Harga beras di Indonesia termasuk yang termahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Ironisnya keuntungan yang diperoleh petani paling kecil.

kita tidak akan mencapai hasil yang kompetitif di usaha padi,” ujar Sugiyanta.

Membandingkan keuntungan petani di negara-negara maju, ia mengungkapkan, seorang petani di sana bisa mengelola lahan hingga 25 hektare. Bahkan di Italia, seorang petani bisa mengelola lahan 40 hektare. “Di Indonesia, rata-rata luas lahan sawah petani masih seperempat atau setengah hektare.”

Sugiyanta menambahkan, Indonesia memang akan mengalami kesulitan bagaimana membuat petani bisa lebih efisien dalam memproduksi padi. “Sementara kita ingin terus memproduksi padi, tetapi petaninya tidak untung.”

Jika situasi seperti itu yang terus terjadi, dikhawatirkan keberlanjutan pasokan pangan jadi terganggu.

Sugiyanta mengatakan, kalau melihat situasi seperti itu, “Memang akan lebih baik jika kita menekankan pada intensifikasi untuk mempertahankan ketahanan pangan dengan menggarap 7 juta hektare di berbagai klaster.”

Ke depan memang perlu mencoba terus diversifikasi pangan. “Sejak kecil, anak-anak perlu dibiasakan makan nonberas, tetapi bukan mi instan. Kita memang berhasil mendiversifikasi pangan dengan mi instan, bukan dengan pangan kearifan lokal kita,” ujar Sugiyanta. ■



Harus ada *short cut* yang jelas sehingga jangan sampai terjadi seolah-olah petani di tingkat bawah tidak punya pemerintah.”

Charles Meikyansah
Anggota Komisi IV DPR RI

6 Capaian Pertanian dan Mengambinghitamkan Covid-19

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Charles Meikyansah, mengungkapkan bahwa DPR melalui Komisi IV telah membahas ketahanan pangan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo cukup lama karena memang banyak PR yang harus dikerjakan.

Terkait dengan situasi terkini sebagaimana sudah diperkirakan FAO, Charles mengatakan krisis pangan akan melanda dunia akibat *lockdown* dan pembatasan sosial menyusul WHO yang menetapkan covid-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia, menurut Charles, daerah rentan pangan pada 2018 ada di 88 kabupaten/kota. Adapun di 2019, walaupun turun, masih terdapat 76 kabupaten/kota yang rentan terhadap ma-

salah pangan.

Dengan kondisi itu, Indonesia menempati urutan ke-70 dari 117 negara yang menjadi objek riset dari *Global Hunger Index* untuk masalah ketahanan pangan.

“Itu menjadi sebuah PR cukup besar yang harus dikerjakan Kementerian Pertanian dan tentunya mitra kerja Komisi IV lainnya,” kata Charles.

Berdasarkan data terakhir *Global Food Security Index* (GFSI), keadaan Indonesia memang membaik, dari sebelumnya 54,8% pada 2018 menjadi 62,6% pada 2019. “Perbaikan ini harus terus dilakukan, utamanya dalam aspek *availability* dan *quality*, tentunya juga keamanan,” kata Charles.

Dari GFSI itu, jelas Charles, terdapat lima provinsi di Indonesia yang terkategori kebutuhan pangannya harus diurus secara lebih serius, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Barat. “Ini menjadi sebuah hal yang harus serius dilakukan oleh Kementerian Pertanian.”

Salah satu yang menjadi kendala untuk mengatasi hal itu ialah seberapa besar dana yang disiapkan untuk tahun anggaran 2020.

Kementerian Pertanian di awal mendapat anggaran sekitar Rp21,5 triliun. Akan tetapi, akibat penanggulangan covid-19, anggarannya turun sekitar Rp7 triliun. “Dari anggaran yang semula Rp21 triliun menjadi Rp14 triliun. Tetapi alhamdulillah kami melihat Kementerian Pertanian tetap mampu menunjukkan kinerja

yang cukup baik,” ujar Charles.

Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang mampu menjadikan sektor pertanian sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di saat pandemi covid-19 belum pulih.

Charles menjelaskan, anggaran 2020 untuk mengatasi covid-19 pada awalnya disiapkan Rp755,74 miliar, dengan perincian sekitar Rp40,03 miliar untuk dukungan pencegahan penularan covid-19 dan Rp135,68 miliar untuk pengamanan ketersediaan pangan, serta Rp580,03 miliar untuk jaring pengaman sosial.

Komisi IV DPR, menurut Charles, menganggap penting adanya penambahan anggaran untuk Kementerian Pertanian guna merespons covid-19 sehingga anggaran dalam rangka mengatasinya menjadi Rp2,65 triliun.

Perinciannya, Rp40,42 miliar untuk dukungan pencegahan penularan covid-19, Rp1,46 triliun untuk pengamanan ketersediaan pangan, dan Rp1,15 triliun untuk jaring pengaman sosial.

Beruntung, Kementerian Pertanian bisa melakukan penghematan di pos-pos anggaran tertentu dan kemudian diberikan kepada hal-hal yang lebih efektif.

Charles menjelaskan, setelah rapat koordinasi dan rapat dengan pendapat dengan pihak-pihak terkait, ditemukan formula Program Prioritas Nasional 2021.

Dalam program itu, ada rencana meningkatkan ketersediaan akses distribusi dan kualitas konsumsi pangan. Menurut Charles, akses kualitas konsumsi pangan ini menjadi sangat penting kare-



M/SUSANTO

Seorang petani menyemprotkan pupuk di lahan bawang di Desa Mojorembun, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (21/12/2021). Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah harus siap mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk.

na salah satu hal yang membuat nilai produk-produk pertanian menjadi tidak hemat dan mahal ialah masalah akses dan kualitas konsumsi.

Charles mengatakan, “Komisi IV DPR mengusulkan kepada Badan Penanganan Pangan agar tidak hanya berbicara tentang produk pertanian, tetapi juga bagaimana soal subsidi pupuk.”

Ia juga menjelaskan ada tiga agenda penting di sektor pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi covid-19. Pertama, menghadapi situasi darurat. Kedua, stabilisasi harga pangan termasuk pengendalian harga dan fasilitas pembiayaan petani. Ketiga, padat karya pertanian.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Charles mengharapkan para kepala daerah di tingkat kabupaten/kota bisa menjadikan daerah mereka sebagai garda paling depan di sektor pertanian.

“Ketika pupuk tidak ada, ketika ada masalah dengan pengairan dan segala macam, dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah harusnya berani mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani,” ujar Charles.

Legislator NasDem ini menyayangkan proses pembangunan kadang tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Ini yang seharusnya direspons oleh pemerintah pusat agar jangan sampai ketika terjadi kelangkaan pupuk, misalnya, atau ada masalah dengan pengairan dan sebagainya, kemudian menjadi berlarut-larut.

“Harus ada *short cut* yang jelas sehingga jangan sampai terjadi seolah-olah petani di tingkat bawah tidak punya pemerintah,” tambah Charles.

Ia melanjutkan, inovasi juga harus dilakukan melalui pengembangan pertanian modern. “Teknologi pertanian juga tidak boleh dilupakan,” tandas Charles.

Jangan Kambing Hitamkan Covid-19

Namun, ungkapan agak berbeda disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Suyoto.

Dia mengatakan, antara isu ketahanan pangan, ancaman resesi, dan terutama ketahanan pangan dengan covid-19, kalau dicari kaitan langsungnya, rasanya tidak ada. Apalagi kalau dikaitkan dengan produksi pangan, tidak ada kaitannya di Indonesia.

Menurut Suyoto, data bahwa indeks produksi pangan menurun pada April 2019, itu bukan karena pandemi atau covid-19. “Itu lebih banyak disebabkan cuaca. Jadi jangan kita mengambinghitamkan covid sebagai dampak penurunan atas produktivitas pangan.”

Kendati demikian, kata Kang Yoto, panggilan akrab Suyoto, kalau dikaitkan secara tidak langsung, memang ada, terutama jenis pangan atau protein hewan yang menjadi bahan baku untuk keperluan restoran yang berbasis pada servis.

Selama pandemi covid-19 dan ada *physical distancing* memang mengganggu orang ketika akan mengonsumsi makanan, terutama di restoran-restoran dan tempat wisata. “Akibatnya banyak peternak yang gulung tikar karena tidak ada permintaan,” kata Kang Yoto.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang beriklim tropis, lanjutnya, pandemi adalah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau mau menyelesaikan pandemi, sekaligus mengu-



MIMI IRFAN

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengendarai Combine Harvester saat Panen Raya di Desa Rancasenang, Cikeusik, Pandeglang, Banten, Selasa (28/7/2020). Perum Bulog melakukan aksi korporasi penting di masa pandemi covid-19 dengan menyerap langsung gabah atau beras petani pada musim panen raya. Upaya itu untuk menjaga stok pangan nasional sekaligus menstabilkan harga jual padi di level petani sehingga roda perekonomian nasional pulih kembali.

rangi resesi, maka pertanian, peternakan, dan nelayan itu harus mendapatkan perhatian yang sangat serius,” ujar Suyoto.

Memberikan contoh, mantan Bupati Probolinggo itu menjelaskan, migrasi bisa dicegah dengan pertanian, perikanan, dan peternakan.

Akibat covid-19, banyak orang yang pulang kampung. “Ka-

lau di kampung yang ada di kepulauan-kepulauan sekarang ini mendapatkan perhatian serius, maka produktivitas akan terjadi dan migrasi tidak akan ada lagi,” ujar Suyoto.

Menurut dia, ketahanan dan kemandirian pangan harus ditempatkan pada tiga pendekatan. Pertama, pendekatan ketahanan atau kemandirian. Kedua, pendekatan kualitas hidup atau kualitas pangan. Ketiga, pendekatan kesejahteraan petani atau peternak.

“Ini menurut kami yang harus dipikirkan. Kalau bicara ketahanan saja, sebenarnya yang berkepentingan itu pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang paling takut terhadap ketahanan pangan. Kalau bicara kualitas hidup, itu adalah bicara masa depan. Kalau kita bicara soal kesejahteraan petani, itu artinya kita sedang membicarakan para petani, peternak, sebagai aktor produsen yang sebenarnya,” tutur Kang Yoto.

Ia mengatakan, “Kita memperbincangkan ketahanan pangan, tetapi melupakan kesejahteraan para aktornya. Ini tidak boleh terjadi.”

Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, Suyoto mengusulkan ada empat hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana menaikkan produksi dari sisi yang berbasis keluarga. Kedua, perlu optimalisasi dari sisi produksi yang berbasis kelompok. Ketiga, manajemen makro, baik nasional maupun lokal. Adapun yang keempat ialah memastikan agar distribusi tepat waktu. ■



Mayoritas petani berumur tua, bahkan sepertiganya berusia di atas 54 tahun. Artinya mereka sudah berada di ujung produktif sehingga produktivitasnya rendah.”

Khudori

Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia-Pokja Dewan Ketahanan Pangan

7 Belajar dari Vietnam dan Kuba

ANGGOTA Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia-Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, menyatakan pandemi covid-19 memberi pelajaran bahwa kalau Indonesia bergantung pada impor, termasuk soal pengadaan pangan, ketahanan pangan tidak bisa dikontrol.

Banyak pertanyaan apakah Indonesia akan mengalami krisis pangan? Khudori menjawab, “Kalau kita menengok ke belakang, pada 2007, 2008, dan 2011, krisis pangan ditandai oleh *food price index* yang tinggi. Pada 2008 dan 2011 sangat tinggi. Kondisi sekarang kita masih di bawah 100.”

Menurut Khudori, setidaknya ada 16 lembaga yang memberikan peringatan bahwa akan ada potensi krisis pangan terkait

dengan covid-19. “Namun, keyakinan kami, krisis tidak akan terjadi. Ini juga dibuktikan dari situasi pangan global yang secara keseluruhan kondisinya sangat bagus. Gandum, jagung, sorgum, gula, beras, stok dan produksinya bagus.”

Ia tak menutup mata, pandemi covid-19 telah memutus lalu lintas perdagangan dan ekspor-impor. “Negara-negara pengimpor tentu tidak mudah mendapatkan barang dari negara eksportir. Apalagi kita tahu beberapa negara eksportir itu kadang-kadang ketika dihadapkan pada ancaman krisis akan melakukan pembatasan,” ungkap Khudori.

Ia memberikan contoh, awal April, Mei, terdengar kabar Thailand dan Vietnam tidak akan mengekspor beras mereka. Namun, belakangan direvisi karena produksi beras mereka bagus dan siap untuk diekspor.

Meski demikian, Khudori mengingatkan, jika sebuah negara mengalami krisis pangan, lalu menggantungkan pangan kepada impor, itu tidak bisa menjadi solusi untuk jangka waktu yang lama.

Di awal-awal covid-19 mewabah, Khudori dan lembaganya memperkirakan virus dan iklim akan memengaruhi produksi pangan. “Tapi ternyata perkembangannya sampai hari ini, produksi pangan relatif tidak terganggu karena kita antara lain diuntungkan oleh kemarau basah,” tuturnya.

Khudori mengatakan, di dua bulan terakhir (Juli-Agustus 2020) cukup mengkhawatirkan. Produk-produk peternakan da-



MIUSMAN ISKANDAR

Aktivitas bongkar muat beras impor dari kapal Thai Bin asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Saat pandemi, terputusnya lalu lintas perdagangan dan ekspor-impor menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan stok pangan nasional, terutama beras yang menjadi komoditas utama.

lam dua bulan itu mengalami deflasi. Produk-produk hortikultura berturut-turut tiga bulan terakhir juga mengalami deflasi.

Artinya apa? Hasil pertanian yang terus diproduksi ternyata tidak terserap oleh pasar. Di saat yang sama ternyata inflasi rendah. Ini menandakan bahwa daya beli masyarakat belum pulih.

Khusus beras, untuk tahun ini, kata Khudori, walaupun mungkin ada penurunan dari tahun lalu, tingkat penurunannya tidak terlalu besar, bahkan bisa jadi hampir sama dengan tahun lalu.

Kalau mengacu pada data terakhir BPS, sampai November 2020, kira-kira surplusnya 2,81%, Desember defisit, tetapi ini belum memperhitungkan *carry over* yang ada pada 2019.

Akan tetapi, menurut Khudori, sebelum ada covid-19, produksi pangan Indonesia sudah menghadapi persoalan. Salah satunya konversi lahan. Kalau mengacu pada data yang ada, dalam tujuh tahun terakhir terjadi konversi 917.000 hektare lahan. Artinya dalam setahun ada 130.000 hektare lahan yang dikonversi.

Jumlah itu sangat besar. Sementara itu, sumber daya atau mayoritas petani Indonesia ternyata memang berlahan sempit. Pendidikan mereka juga rendah, sebanyak 73% hanya lulus SD, bahkan tidak sekolah.

Selain itu, mayoritas petani berumur tua, bahkan sepertiganya berusia di atas 54 tahun. Artinya mereka sudah berada di ujung produktif sehingga produktivitasnya rendah.

Kesadaran untuk tekun bertani juga rendah. Pertanian, kata Khudori, bukan lagi menjadi aktivitas utama. Padahal definisi bertani adalah mereka yang menggantungkan sebagian besar pekerjaan dan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pertanian.

“Kalau kita sepakat dengan definisi tersebut, yang namanya bertani itu sebenarnya sudah tidak ada. Makanya tempo hari ra-

mai ada tulisan pertanian tanpa petani. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena tanpa petani, tanpa generasi petani, kita akan terancam,” jelas Khudori.

Impor produk pangan Indonesia masih besar. Yang tak kalah penting, katanya lagi, rantai pasok dan logistik juga harus kuat.

Jika semula impor hanya sebagai pelengkap dan ditempatkan sebagai langkah terakhir, sekarang di RUU Cipta Kerja, pangan menempati posisi yang sangat penting, sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan.

Survei terakhir yang dilakukan Kementerian Pertanian mengungkapkan, dari 73% lahan kita, kandungan bahan organiknya rendah, di bawah 2%.

Menurut ilmu tanah, kata Khudori, bahan organik di tanah yang di bawah 2%, kalau diibaratkan organisme itu sakit, kelelahan. Jadi harus dipulihkan kembali kalau menginginkan ketahanan pangan kuat.

Menurut Khudori, pandemi covid-19 memberikan pelajaran bahwa Indonesia semestinya tidak harus bergantung kepada negara lain. “Makanya kita harus berdaulat pangan. Tetapi berdaulat pangan akan terwujud kalau didahului dengan daulat petani. Ya, petani harus berdaulat lebih dulu.”

Bagaimana supaya petani berdaulat? Khudori menjelaskan, pertama, harus diberikan akses dan kontrol pada input. Kedua, harus ada perubahan di dalam tata produksi, tata niaga, dan tata konsumsi.



MIRAMDANI

Petani mengawasi sawahnya di kaki Gunung Ciremai, Desa Sakerta Timur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (18/12/2021). Mayoritas petani di Indonesia berpendidikan rendah, 73% lulusan sekolah dasar, bahkan tidak sekolah. Di antaranya juga sudah berusia lanjut sehingga produktivitas mereka rendah.

Melengkapi apa yang disampaikan Khudori, Ketua DPP Bidang Energi dan Mineral Partai NasDem, Kurtubi, mengatakan sektor pertanian untuk jangka panjang perlu direncanakan dan diarahkan agar dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Caranya? Anggota DPR RI 2014-2019 itu menjelaskan, perta-

ma, membuat program industrialisasi berbasis pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kedua, untuk daerah penghasil jagung seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), didorong agar melakukan investasi ke pabrik pakan ternak. Kemudian di lokasi yang sama, didorong lahirnya peternakan ayam/unggas. Nantinya, selain ayamnya dijual antardaerah, juga didorong lahirnya industri rumah tangga kuliner lokal, misalnya ayam taliwang, dengan bahan baku ayam yang dihasilkan peternak.

Kurtubi melanjutkan, kuliner siap saji dikemas dan diawetkan dengan teknologi iradiasi nuklir dari Batan yang sehat karena tidak memakai bahan kimia sehingga tetap segar sampai 1,5 tahun.

Program lainnya ialah mendorong lahirnya industri berbasis peternakan sapi, juga di NTB, sebab daerah itu selama ini merupakan pemasok sapi untuk Jakarta. Kemudian mengoptimalkan keberadaan Pusat Penelitian Bibit Sapi/Inseminasi di Banyuwulek, Lombok Barat.

Kurtubi menegaskan, itu semua sangat berpeluang bagi lahirnya industri kuliner berbasis ternak sapi. Kuliner lokal (rendang, abon sapi, dan lain-lain) diawetkan dengan teknologi iradiasi nuklir sehingga bisa diekspor.

Menutup diskusi, wartawan senior dan anggota Dewan Redaksi Media Group, Saur Hutabarat, mengusulkan, ke depan duta besar untuk Vietnam jangan diisi lagi oleh diplomat karier atau politisi. “Sudah saatnya duta besar di negeri ini dijabat oleh mereka yang ahli pertanian, khususnya pertanian beras,” kata Saur.

Ia menambahkan, hal serupa sebaiknya diberlakukan untuk Kuba. “Kirimlah atau tempatkan duta besar di sana yang juga ahli pertanian, khususnya pertanian beras.”

Mengapa hal itu perlu dilakukan? Saur menjelaskan, Kuba adalah negara pengimpor beras, sedangkan Vietnam pengeksport beras. Kuba menjalin kerja sama jangka panjang dengan Vietnam sejak 1999 dan akan berakhir di 2023.

Upaya peningkatan produksi beras di Kuba, menurut Saur, itu merupakan contoh kerja sama yang unik untuk dua negara. Mereka saling menolong. Pengeksport menolong pengimpor, yang tidak mungkin atau sulit terjadi di negara kapitalis.

Pada 2023, setelah kerja sama 24 tahun berakhir, Kuba akan punya 200 ribu lahan dengan rata-rata mampu memproduksi beras 6 ton per hektare atau memenuhi 86% kebutuhan beras rakyat Kuba.

Apa yang mau dikatakan di sini? Pertama, tidak ada penyelesaian menyangkut kedaulatan beras yang rampung dalam jangka pendek. Jarak antara Vietnam dan Kuba dari Kota Danang ke Kota Havana itu ialah 30 jam 14 menit terbang.

Jarak yang sangat jauh. Perbedaan budayanya juga sangat jauh. Yang disamakan hanya sebuah ideologi (marxisme leninisme).

Kuba mempunyai persoalan dengan air, tapi mereka mampu meningkatkan produktivitas maupun menyegarkan lahan dan menghasilkan padi.

Lalu supaya Indonesia punya kedaulatan pangan, apa yang

harus dilakukan? “Belajarlah dengan sangat sungguh-sungguh. Fokuslah pada persoalan beras, dan itu tadi, setop kirim duta besar sembarangan yang bukan ahli pertanian ke Vietnam dan Kuba,” kata Saur.

Vietnam adalah negara kecil. Beberapa waktu lalu, negara itu mengalami perubahan suhu yang luar biasa, sampai 43 derajat celsius lebih dan menyebabkan petani harus bekerja pada malam hari.

Para petani Vietnam punya etos kerja yang luar biasa. Hasilnya? Mereka mengalami peningkatan ekspor 10% dan kenaikan harga 5% akibat *panic buying* karena pandemi.

Mereka memetik hasilnya. “Jadi ayo kembali belajar mengenai hubungan Vietnam dan Kuba dalam hal beras. Tidak usah yang lain,” ujar Saur.

Bukan hanya soal beras. Vietnam, menurut Saur, bisa menarik investor begitu cepat. Mengapa? Pasti ada sesuatu. “Mari kita belajar sesuatu yang pokok dulu, yakni beras. Fokus saja apa yang telah dilakukan Vietnam dan Kuba,” ungkap Saur Hutabarat. ■



V



**Kesiapan Indonesia
Menghadapi Puncak
Ancaman El Nino 2023**

1 Latar Belakang: Adaptasi Hadapi Dampak El Nino

KEMARAU panjang pada pertengahan 2023 mulai dirasakan masyarakat Indonesia. El Nino yang akan menambah panasnya suhu udara juga bakal datang, yang dikawatirkan memengaruhi produksi pangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui situsnya menjelaskan, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya. Pemanasan SML ini terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan di kawasan tersebut

dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk di Indonesia.

BMKG mengklasifikasikan intensitas El Nino menjadi tiga kategori, yaitu El Nino lemah, moderat, dan kuat. El Nino yang akan singgah di kawasan tersebut ialah bagian dari El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yang memiliki dampak global pada cuaca dan iklim.

El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik tengah dan timur menjadi lebih hangat daripada biasanya. Fenomena alam itu dapat berdampak besar terhadap iklim di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia.

Berikut ini ialah beberapa dampak El Nino yang diperkirakan memengaruhi Indonesia.

1. Kekeringan: Selama El Nino, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia cenderung mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering daripada biasanya. Hal itu dapat menyebabkan kekurangan air dan mengganggu pasokan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari.

2. Kebakaran hutan dan kabut asap: Cuaca yang kering selama El Nino meningkatkan risiko kebakaran hutan yang dapat menyebabkan kabut asap. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah seperti Sumatra dan Kalimantan, yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan yang parah.

3. Penurunan hasil pertanian: Kekeringan dan perubahan pola cuaca dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan,

seperti padi, jagung, dan kedelai. Hal itu dapat berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia.

4. Gangguan nelayan: El Nino juga dapat menyebabkan perubahan dalam pola arus laut, yang bisa mengganggu produksi perikanan dan menciptakan kesulitan bagi para nelayan untuk mencari ikan.

5. Peningkatan suhu: Selama periode El Nino, suhu udara juga bisa meningkat di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat berdampak pada kesehatan dan produktivitas manusia.

Dampak El Nino dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga setahun. Karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersiap dan mengambil langkah-langkah guna beradaptasi demi mengurangi dampak negatifnya.

Adaptasi tersebut termasuk bagaimana sistem peringatan dini untuk bencana, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana, pengendalian kebakaran hutan yang efektif, serta dukungan bagi petani dan nelayan dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi selama periode El Nino.

Puncak ancaman El Nino diprediksi oleh BMKG terjadi pada Agustus-September 2023. Lalu, sampai sejauh mana Indonesia mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi?

Untuk menjawab pertanyaan itulah Forum Diskusi Denpasar 12 merasa perlu membahas persoalan tersebut dalam diskusi pada Rabu, 26 Juli 2023, dengan tema *Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Puncak Ancaman El Nino di 2023*. ■



Fenomena alam itu cepat atau lambat pasti datang dan memberikan dampak. Wajar kalau masyarakat Indonesia dan pihak-pihak terkait wajib mengantisipasi serta siap-siap beradaptasi.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mengantisipasi Kemarau Panjang

RAMAINYA sorotan media massa terkait akan datangnya El Nino dan dampaknya menjadi perhatian Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat mengantarkan diskusi yang digelar secara daring.

Persisnya, sejak awal hingga pertengahan Juni 2023, media massa termasuk media sosial ramai memberitakan dan menginformasikan soal El Nino dan dampaknya. Lazimnya pemberitaan, ada yang kandungannya biasa-biasa saja. Ada pula yang ilmiah sampai yang menyeramkan. Yang beraroma gosip dan hoaks pun tak ketinggalan.

Apa pun informasi yang tersebar soal El Nino, menurut Lestari, fenomena alam itu cepat atau lambat pasti datang dan memberi-

kan dampak. Wajar kalau masyarakat Indonesia dan pihak-pihak terkait wajib mengantisipasi serta siap-siap beradaptasi.

Namun, di tengah ingar-bingarnya pemberitaan, termasuk yang menyeramkan, menurut Rerie, panggilan akrab Lestari Moerdijat, ada juga yang mengulas El Nino dengan pendekatan saintifik dan lingkungan.

El Nino, masih menurut Rerie, pasti berkorelasi dengan kehidupan umat manusia. Persoalannya sekarang, kata anggota Komisi X DPR ini, “Bagaimana kemudian kita harus bersikap, strategi-strategi seperti apa yang harus disiapkan dan dihadapi oleh semua kelompok masyarakat, mulai dari satuan terkecil seperti keluarga, lingkungan bisnis, sampai dengan lembaga-lembaga dan pemerintahan.”

Rerie mengatakan, sejak awal 2023 badan-badan dunia berkali-kali telah mengeluarkan informasi yang intinya memberikan penguatan-penguatan, khususnya yang bisa dijadikan bahan untuk mengantisipasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim. Apa yang harus dilakukan masyarakat dunia, termasuk Indonesia, untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya.

Goal 13 SDGs memiliki tujuan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang.

Lestari mengapresiasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang setiap saat memberikan informasi harian



M/USMAN ISKANDAR

Warga antre untuk mendapatkan bantuan air bersih di Pegadungan, Kalideres, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Kalideres merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang dilanda krisis air bersih dampak musim kemarau dan berhentinya operasional instalasi pengolahan air (IPA) hutan kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau panjang terjadi pada Juli hingga Agustus 2023.

tentang cuaca, yang betul-betul membantu masyarakat sebagai ‘navigasi’ untuk mengetahui apa yang akan terjadi.

Tim Forum Diskusi Denpasar 12, menurut Lestari, telah mencatat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi El Nino.

Secara khusus dalam rapat kabinet, kata Rerie, juga sudah di-

bahas langkah-langkah yang harus disiapkan oleh pemerintah. Ini tentu melegakan, apalagi suhu global cenderung meningkat dan mencapai rekor baru dalam lima tahun mendatang.

Bahkan catatan terakhir Juni 2023, menurut Rerie, menjadi data penting sebab suhu terpanas di dunia diperkirakan terjadi selama tiga tahun lantaran El Nino sudah berada di Samudra Pasifik, dan berbagai fenomena lain terjadi pula di Samudra Hindia.

“Tidak bisa dimungkiri bahwa berbagai macam fenomena ini tentu akan berdampak pada situasi di Indonesia,” ujar Rerie.

BMKG memprediksi puncak kemarau panjang terjadi pada Juli dan Agustus 2023. Rerie mengatakan tidak bisa dimungkiri ini pasti berdampak kepada ketahanan pangan.

“Di beberapa tempat, kita juga sudah mulai merasakan kemarau panjang. Ini tentu akan menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah. Curah hujan yang rendah menyebabkan banyak sungai dan danau yang menguap,” tambah Lestari.

Ia menegaskan, jika kondisinya seperti itu, “Bagaimana kemudian kita menyikapi? Bagaimana kita kemudian melakukan antisipasi, dan yang paling penting bagaimana kita sebetulnya memahami apa yang akan terjadi?”

Lewat para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Rerie berharap apa yang didiskusikan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bisa memberikan banyak masukan kepada kita, “Sehingga kita mampu dan siap menghadapi berbagai dampak dari fenomena kemarau ekstrem yang nanti akan kita hadapi dan

yang juga harus kita sosialisasikan.”

Rerie tidak bisa memungkiri bahwa setiap fenomena alam pasti ada yang tidak bisa dihindari oleh manusia. “Oleh karena itu, mari kita optimalkan semua potensi yang kita miliki untuk mengatasi ancaman dan yang paling penting melindungi masyarakat dari dampak yang akan terjadi,” tegas Lestari Moerdijat. ■



Pada 1991, 1994, dan 1997, gara-gara El Nino, terjadi kekeringan panjang yang mengakibatkan kerusakan parsial dan kerusakan total pada lahan pertanian, terutama pada 1997.”

Rustian

Pelaksana Tugas Sekretaris Utama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

3 Perubahan Iklim Lebih Menakutkan daripada Pandemi Covid-19

PELAKSANA Tugas Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, mengatakan bahwa yang ditakuti oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi covid-19, juga bukan lagi perang, melainkan perubahan iklim.

Menurut dia, dampak perubahan iklim lebih mengerikan sehingga lebih ditakuti oleh semua negara. Bagaimana tidak mengerikan, perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. “Ya, inilah yang harus kita pahami bersama-sama, khususnya informasi soal ini yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat,” kata Rustian.

El Nino yang terjadi di 2023 ini, disebut Rustian, akan berdampak pada perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi

kering. Bencana hidrometeorologi kering, imbu Rustian, akan berdampak pada peningkatan suhu global dan frekuensi fenomena regional bencana hidrometeorologi kering.

Ia menjelaskan hidrometeorologi kering mengakibatkan kelangkaan air, gagal panen, juga kebakaran hutan dan lahan. “Ini bisa kita lihat adanya kabut asap lintas batas yang harus kita awasi.”

Selain itu, akan terjadi deforestasi dan emisi karbon dioksida serta pencairan es di kutub bumi yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Kondisi itu akan memicu bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

Rustian mengungkapkan, bencana alam yang terjadi di Indonesia pada periode 1 Januari-25 Juli 2023 sebanyak 2.034. Itu berarti setiap hari terjadi 10-12 bencana. Bencana tersebut didominasi gempa bumi sebanyak 18 kali dan erupsi gunung berapi 2 kali. Adapun bencana yang terkait dengan iklim ialah banjir 731 kali, cuaca ekstrem 657 kali, tanah longsor 353 kali, kebakaran hutan dan lahan 231 kali, dan kekeringan 23 lokasi. Gelombang pasang dan abrasi sebanyak 20 kali. Dampak kerusakan akibat bencana alam mengakibatkan warga masyarakat menderita dan lebih dari 3 juta jiwa mengungsi.

Rustian menambahkan, bencana alam yang terjadi dalam satu minggu terakhir (17-26 Juli 2023) didominasi kebakaran hutan dan lahan, diikuti dengan banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan tanah longsor.

Pada akhir Juni hingga minggu pertama Juli terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan karena pengaruh fenomena regional atau MgO gelombang Kelvin dan Rossby. Namun, di beberapa wilayah terjadi banjir.

Dalam dua minggu terakhir, jelas Rustian, kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat secara signifikan. Diidentifikasi terdapat sejumlah *hotspot*. “Di berbagai wilayah, baik Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku serta Papua, ada titik panas yang jumlahnya meningkat pada periode 19-25 Juli 2023,” ungkap Rustian.

Peningkatan titik panas paling tinggi, menurut dia, terjadi di wilayah Sulawesi yakni 77,1%, lalu Maluku dan Papua 17%. “Nah, inilah yang harus kita waspadai dalam akhir bulan Juli sampai dengan Agustus dan September 2023.”

Lalu, bagaimana dampak El Nino terhadap produksi pangan? Rustian menunjukkan data saat El Nino pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Pada 1991, 1994, dan 1997, gara-gara El Nino, terjadi kekeringan panjang yang mengakibatkan kerusakan parsial dan kerusakan total pada lahan pertanian, terutama pada 1997.

Pada saat itu, menurut Rustian, El Nino yang terjadi berkategori sangat kuat hingga menyebabkan Indonesia mengalami kekeringan parah yang kemudian menyebabkan terjadinya gagal panen.

Diprediksi, di 2023 Indonesia akan mengalami El Nino kate-

gori sedang. Meski demikian, tetap perlu diantisipasi agar tidak terjadi gagal panen.

Rustian memperkirakan kondisi kemarau panjang pada 2023 akan mendekati kondisi kemarau 2019, luas lahan yang terbakar berbanding lurus dengan besarnya emisi karbon dioksida dan pelepasan karbon dioksida akibat lahan terbakar memberikan tekanan pada kenaikan suhu global.

Rustian lalu menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pertama, prioritaskan upaya pencegahan. Upaya pencegahan lah yang harus dikedepankan. Kedua, infrastruktur *monitoring* dan pengawasan harus ada sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat keluarga. “Ini harus kita siapkan betul. Informasi ini harus segera diketahui, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota dan provinsi,” kata Rustian.

Ketiga, mencari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Keempat, lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Kelima, jangan biarkan api sampai membesar. Semua pihak harus tanggap dan jangan sampai terlambat. Keenam, lakukan langkah-langkah penegakan hukum tanpa kompromi.

“Enam arahan Presiden ini dilaksanakan dengan sistem berjenjang sampai ke lembaga swadaya masyarakat,” kata Rustian.

Menurut dia, itulah wujud keseriusan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Presiden me-

nekankan agar upaya deteksi dan pencegahan dini menjadi prioritas.

Kepala Negara juga meminta untuk terus memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG. Alokasikan anggaran tenaga dan sarana-prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.

Sinergikan pelaksanaan TMC (*Traffic Management Center*) lintas kementerian lembaga, koordinasikan seluruh *stakeholder* yang ada, dan pemda harus proaktif dalam merencanakan program kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan.

Demikian pula dengan penegakan hukum, yang harus tegas dilakukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kemudian segera menetapkan status siaga darurat bencana. ■



Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal muncul, BMKG melakukan penguatan sistem observasi *monitoring* prediksi dan peringatan dini cuaca dan iklim.”

Dwikorita Karnawati
Kepala BMKG

4 Memantau Fenomena Iklim akibat El Nino

KEPALA BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa fenomena iklim di Indonesia unik, tidak sama dengan iklim atau cuaca yang terjadi di negara-negara lain.

Ia memberikan contoh, saat ini di belahan dunia lain sedang terjadi gelombang panas, realitas alam itu tidak terjadi di Indonesia.

Menurut dia, hal itu terjadi karena lingkungan Indonesia ‘dikontrol’ oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Masih pula diapit oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. “Itulah situasi yang mengendalikan iklim Indonesia.”

Dwikorita menambahkan, saat ini musim kemarau panjang yang sedang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh angin monsun yang berasal dari Australia. Anginnya kering dan dingin. Dalam situasi yang sama, Indonesia juga sedang dipengaruhi oleh fenomena alam yang terjadi di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Di dua samudra itu sedang terjadi anomali suhu muka air laut yang suhunya lebih hangat dan di perairan Indonesia relatif lebih dingin sehingga terjadi aliran masa udara atau kelembapan udara dari Indonesia menuju ke Samudra Pasifik.

Fenomena alam itu mengakibatkan, “Kita kehilangan uap air yang menuju ke Samudra Pasifik sehingga di Indonesia kondisinya menjadi lebih kering,” kata Dwikorita.

Kekurangan uap air tadi, tambahnya, dalam waktu yang sama memunculkan gap suhu muka air laut di Samudra Hindia terhadap suhu muka air laut di perairan Indonesia.

Aliran massa udara basah juga terjadi ke arah Samudra Hindia-- disebut Indian Ocean--yang semakin kehilangan uap air. Jadi fenomena di musim kemarau yang mendapatkan angin kering dari Benua Australia diperparah dengan fenomena El Nino dan Indian Ocean.

“Itulah mengapa kita perlu mengantisipasi sejak dini. Sejak Februari lalu, kita sudah mengantisipasi hal tersebut,” jelas Dwikorita.

Berbeda dengan negara-negara lain, setelah Oktober-Novem-

ber, dampak El Nino di Indonesia semakin lemah. Di Australia, pengaruh El Nino diprediksi masih kuat. Oleh sebab itu, “Kita jangan panik. Kita *nggak* seperti Australia. Kontrol fenomena iklim di Indonesia berbeda dengan Australia,” tuturnya.

Puncak dampak El Nino, menurut Dwikorita, akan terjadi di Agustus dan September 2023. Pada Oktober semakin melemah dan akhirnya November atau Desember sudah netral kembali.

Saat ini, wilayah Indonesia memang masih berada dalam musim kemarau. Sebanyak 63% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Sisanya masih atau sudah ada hujan, seperti di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Dwikorita juga menjelaskan beberapa waktu sebelumnya terjadi apa yang disebut fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), yakni adanya pergerakan arak-arakan awan hujan dari Samudra Hindia memasuki wilayah Indonesia, persisnya di sepanjang khatulistiwa.

Fenomena alam itu mengakibatkan, meskipun musim kemarau, tiba-tiba muncul hujan yang bersamaan dengan gelombang atmosfer, gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin.

Gelombang Rossby atau Rossby Ekuator adalah suatu fenomena yang terjadi di fluida (atmosfer/lautan) yang berotasi secara berpasangan dan bergerak ke arah barat di sekitar kawasan ekuator. Gelombang Rossby juga dikenal dengan istilah gelombang planet.

Rossby Ekuator menjadi salah satu penyebab meningkatnya



MIRAMDANI

Aktivis lingkungan dari berbagai elemen melakukan aksi damai pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2023 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/6/2023). Aksi tersebut memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional setiap 5 Juni. Mereka menuntut pemerintah lebih serius mengantisipasi krisis iklim.

potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Hujan ini terjadi di tengah-tengah musim kemarau.

Gelombang Kelvin adalah gelombang atmosfer yang dibangkitkan oleh pemanasan sinar matahari. Gelombang ini bergerak dari arah timur ke barat.

Gelombang-gelombang itulah yang disebut Dwikorita menga-

kibatkan terjadinya hujan di musim kemarau. Meskipun Indonesia punya musim kemarau beberapa bulan dan puncak musim kemarau terjadi Agustus- September, kalau memang ada periode ulang MJO setiap 30-60 hari, maka akan terjadi hujan.

Fenomena alam tersebut sifatnya lebih lokal dan berdurasi lebih pendek. “Tetapi itu bisa menjadi berkah bagi kita di tengah musim kemarau,” kata Dwikorita.

Kendati begitu, Dwikorita mengingatkan, pada Agustus, September, dan Oktober 2023, “Kita masih harus siaga akibat dampak gabungan monsun Australia dan juga diperparah dengan El Nino dan Indian Ocean.”

Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal muncul, pihaknya melakukan penguatan sistem observasi *monitoring* prediksi dan peringatan dini cuaca dan iklim. “Kami akan lebih efektifkan dan intensifkan sistem peringatan dini kekeringan nasional untuk setiap 10 hari ke depan. Peringatan dini soal El Nino sudah kami sampaikan sejak Februari,” katanya.

Sebelumnya, di dalam masa El Nino, peringatan dini kekeringan dalam skala dengan resolusi lebih tinggi diberikan setiap 10 hari, zona mana saja yang harus diwaspadai.

El Nino saat ini sudah masuk, terutama di Jawa Timur dan Nusa Tenggara. “Kita lihat zona merahnya, kemudian ada sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan hingga tujuh bulan ke depan. Peringatan untuk tiga hari sampai seminggu ke depan juga sudah kami sampaikan,” ujar Dwikorita.

Jadi sistem peringatan dini yang dirilis BMKG sudah diteruskan ke provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Terhitung sejak Februari 2023, BMKG juga sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tentang potensi El Nino.

Laporan serupa disampaikan kepada para gubernur yang wilayahnya diprediksi terdampak El Nino, juga kepada kementerian/lembaga atau pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di samping itu, pimpinan BMKG juga melakukan audiensi dan disusul dengan rapat-rapat terbatas demi memastikan persiapan apa yang telah dilakukan kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

BMKG pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, sangat perhatian dengan hal ini,” kata Dwikorita.

Dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG berkoordinasi bagaimana menyiapkan lahan-lahan, terutama lahan gambut yang mudah terbakar, sebelum masuk musim kering itu dibasahi agar tetap terjaga kelembapannya.

Dwikorita mengatakan, meskipun musim kering, kalau gambutnya tetap dijaga basah, “Insya Allah tidak akan mudah terbakar.” ■



Banyak hal yang harus dilakukan dalam menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Peralnya, biaya distribusi bahan pangan di Indonesia relatif masih mahal.”

Rachmi Widiriani

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan,
Badan Pangan Nasional (Bapanas)

5 Upaya Memperkuat Cadangan Pangan

JIKA memang situasi iklim dari El Nino seperti yang telah dijelaskan para pembicara sebelumnya, lalu bagaimana dampaknya bagi ketahanan pangan nasional?

Menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmi Widiriani, berdasarkan situasi yang dihadapi Indonesia saat ini, paling tidak ada empat hal yang harus diperhatikan atau diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pertama, situasi geopolitik yang semakin tidak menentu. Kedua, perubahan iklim akibat El Nino. Ketiga, pascapandemi covid-19, kebiasaan atau perilaku masyarakat konsumen pangan berubah. Keempat, di beberapa lokasi masih terjadi gangguan

suplai daging sapi karena ada kasus antraks yang menyerang sapi.

Keempat hal itu, kata Rachmi, membutuhkan perhatian yang serius. Kalau tidak, akan terjadi krisis pangan. “Kita berharap hal itu tidak terjadi sebab kita telah siap mengantisipasinya.”

Ketika dihadapkan pada kenyataan itu, imbuh Rachmi, salah satu hal yang dilakukan saat ini ialah bagaimana Bapanas--menyusul keluarnya Perpres Nomor 125/2022-- memperkuat cadangan pangan nasional. Tidak hanya cadangan pangan pemerintah pusat yang dikelola oleh BUMN, tapi juga memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota sampai desa).

“Kalau memang terjadi perubahan iklim, yang menjadi *concern* kita ialah jangan sampai menimbulkan kerawanan pangan,” tegas Rachmi.

Itulah sebabnya, Bapanas jauh-jauh hari menyiapkan bagaimana ketersediaan pangan tetap cukup dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, baik jumlah maupun kualitas gizinya.

Rachmi menjelaskan, ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara. Peringkat itu memang belum seperti yang diharapkan sehingga diperlukan keberlanjutan.

Konsekuensinya, kata Rachmi, “Kita harus mampu mengelola dan mengantisipasi setiap kejadian-kejadian ke depan seperti apa, khususnya terkait dengan perubahan iklim yang berdampak pada berkurangnya air.”

Beruntung dalam suasana seperti itu, inflasi Indonesia cukup



M/RAWDANI

Warga antri membeli paket sembako murah menggunakan KJP Plus di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (6/3/2023). Agar stabilitas pangan tetap terjaga, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar pangan murah, menyalurkan bantuan pangan, menguatkan cadangan pangan, dan bantuan fasilitas distribusi pangan untuk mempercepat atau mempermudah bahan pangan sampai ke sasaran.

rendah di angka 3,52%. Setiap Senin, Bapanas mengadakan rapat untuk membahas inflasi dan pengaruhnya terhadap pengadaan pangan.

Bapanas berupaya agar stabilitas pangan tetap terjaga dengan melaksanakan kegiatan seperti menggelar pangan murah, menyalurkan bantuan pangan, menguatkan cadangan pangan,

dan bantuan fasilitas distribusi pangan untuk mempercepat atau mempermudah bahan pangan sampai ke tujuan.

Intinya, menurut Rachmi, banyak hal yang harus dilakukan dalam menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Pasalnya, biaya distribusi bahan pangan di Indonesia relatif masih mahal.

Rachmi memaklumi itu sebab geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Ada pegunungan, ada laut, dan daratan. Kondisi laut juga tidak selamanya stabil karena gelombang. “Jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk pemerataan stok dan ketersediaan pangan, khususnya menjelang akhir tahun,” katanya.

Bagaimana situasi ketahanan pangan di Indonesia saat ini? Rachmi menjelaskan, data menunjukkan masih ada 74 kabupaten/kota atau 14% wilayah yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Kabupaten-kabupaten itulah yang harus diperhatikan dan diprioritaskan melalui program penguatan ketahanan pangan.

Ada berbagai sebab mengapa ke-74 kabupaten/kota tersebut rentan rawan pangan. Salah satunya ialah neraca pangannya tidak seimbang. Produksi pangan dan kebutuhan pangannya tidak berbanding lurus. Konkretnya, kebutuhan pangan lebih besar daripada stok pangannya.

Masalah kemiskinan, menurut Rachmi, juga memengaruhi mengapa neraca pangan di daerah-daerah tersebut tidak seimbang dan rentan rawan pangan.

Lalu apa yang menjadi arah kebijakan pangan nasional? Rachmi menjelaskan, setelah Bapanas dibentuk, ada sembilan komoditas yang dikelola Bapanas. Namun, setelah Perpres 125 yang mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan, ada tambahan komoditas, yaitu minyak goreng dan ikan kembung.

Kemudian bagaimana tata kelola kebijakan pangan setelah ada Bapanas? Rachmi menjelaskan, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga. Untuk melaksanakan tugasnya, Bapanas berada di tengah-tengah, kemudian di hulu ada kementerian dan lembaga. Teknis bekerja Bapanas berada di hulu, sementara di hilir ada kementerian dan lembaga yang khusus pekerjaannya di hilir. “Kami terus bekerja sama, termasuk setiap ada *warning* dari BMKG,” tambah Rachmi.

Ada enam kebijakan utama pangan yang ditetapkan Bapanas. Pertama, cadangan pangan pemerintah. Kedua, stabilisasi pasokan dan harga. Ketiga, penguatan sistem logistik penanganan wilayah rentan rawan pangan dan gizi. Keempat, pengembangan panganekaragaman konsumsi. Kelima, penjaminan mutu. Keenam, keamanan pangan.

Setiap awal tahun, Bapanas juga membuat prognosis neraca pangan nasional yang di-*update* setiap bulan karena ada koreksi produksi. Prognosis tahunan tersebut memang harus terus diperbarui per bulan untuk menyesuaikan situasi.

Berdasarkan pembaruan yang setiap bulan dilakukan Bapanas, ditemukan ada empat komoditas di Indonesia yang pa-



MISASIA ANINDYA PUTRI

Kondisi anak Sungai Cisadane di Hutan Kota, pintu air Sungai Cisadane, Tangerang, Banten, Rabu (21/8/2019). Kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia berisiko menyebabkan gagal panen, penyakit akibat kekurangan air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan.

sokannya bergantung pada impor, yaitu kedelai, bawang putih, daging lembu, dan gula.

Bapanas berkepentingan ketersediaan pangan di dalam negeri selalu terjaga dengan baik. Begitu pula pengadaan dan distribusinya.

Jika ada keterlambatan pasokan, misalnya, menurut Rach-

mi, deputi-deputi di Bapanas langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kementerian Perdagangan untuk mencari tahu mengapa terjadi keterlambatan kedatangan komoditas pangan, terutama yang bersumber dari impor.

Cadangan pangan, jelas Rachmi, menjadi salah satu hal penting yang harus terus dipantau setiap hari. “Kita pantau setiap hari, berapa bahan pangan yang dikelola oleh Bulog dan Id Food, terutama beras dan jagung.”

Siap Hadapi Skenario Terburuk

Bagaimana jika terjadi bencana? Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, mengatakan, “Kita tentu berharap semoga situasinya akan aman, tenteram, dan damai. Tapi tentunya kita juga harus siap-siap menghadapi skenario terburuk.”

Menurut Avianto, masyarakat Indonesia, khususnya MPBI, sudah terbiasa menghadapi ancaman bencana. Ancaman kekeringan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara lain di Eropa, Asia Selatan, dan Amerika.

“Banyak sekali berita tentang kekeringan dan gelombang panas yang terjadi di banyak negara dan efek dari perubahan cuaca ekstrem terhadap kehidupan sehari-hari mereka,” ujar Avianto.

Mendengar paparan yang sudah disampaikan dalam Forum Diskusi Denpasar 12, dia mengatakan, “Perasaan kami, sepertinya

kita belum mengenal dengan jelas seperti apa sih sebenarnya musuh kita ke depan.”

Menurut Avianto, kelemahan Indonesia tidak hanya soal lumpung pangan, “Tapi juga bagaimana antisipasi kita terhadap kebakaran hutan dan lahan, bagaimana pula jika kekeringan menyebabkan gagal panen.”

Ia mengingatkan, bagaimana juga jika akibat kekeringan, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan untuk mendapatkannya harus membeli air bersih sehingga biaya hidup mereka lebih tinggi.

Keberadaan air berkorelasi dengan kesehatan. Jika masyarakat kurang mengonsumsi air, daya tahan tubuh pasti menurun, otomatis produktivitasnya juga menurun. Semua ini harus diantisipasi.

“Jika kita mengikuti apa yang disampaikan Presiden, bahwa yang pertama harus dilakukan ialah pencegahan. Persoalannya, apa yang akan kita cegah? Kita mencegah musim kemaraunya? Ini tentu tidak bisa. Yang bisa kita atasi ialah dampaknya,” kata Avianto.

Kekeringan, menghadapi gagal pangan dan juga kebakaran hutan, perubahan cuaca serta dampaknya terhadap individu, disebut Avianto, menjadi konsen MPBI. Terutama dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas.

Namun, belajar dari penanganan covid-19 di Indonesia, kata Avianto, “Pemerintah menjadi pionir dan dijadikan contoh bagi negara-negara lain.”

Ia menambahkan, hal-hal yang harus diperhatikan pula ialah bagaimana informasi tentang bencana dan antisipasinya bisa dilakukan dengan segera sehingga bisa menangkali informasi-informasi tidak benar atau hoaks.

“Menurut kami, langkah kuncinya ialah bagaimana informasi bisa menyebar dengan segera, baik ke wilayah publik atau ke kelompok yang berisiko terdampak El Nino,” kata Avianto.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, yang harus dilakukan masyarakat menghadapi El Nino ialah terus mengikuti peringatan-peringatan dini dan tidak mengabaikannya.

“Saya kira ajakan tidak semata untuk urusan El Nino, ajakan untuk berhemat air juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan. Karena itu, berhemat air menjadi penting, tidak hanya urusan menghadapi keadaan darurat,” ujar Saur Hutabarat. ■



VI



Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia

1 Latar Belakang: Sampah Makanan 48 Juta Ton Per Tahun

PEMBOROSAN pangan terjadi ketika makanan, yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi, dibuang atau tidak dimanfaatkan dengan tepat. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemborosan makanan, dari kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya infrastruktur penyimpanan, praktik perdagangan di pasar, kebijakan, hingga kurangnya pemanfaatan sisa makanan.

Menurut riset Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, total sampah makanan di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2019 sekitar 23 juta-48 juta ton per tahun. Padahal jika tidak terbuang, makanan tersebut dapat menghidupi 61 juta-125 juta penduduk atau setara

29%-47% rakyat Indonesia.

Pemborosan makanan menjadi masalah serius bukan hanya karena merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak pada lingkungan karena menghasilkan limbah yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan memperburuk masalah perubahan iklim. Di sisi lain, masih banyak masyarakat miskin yang kekurangan makanan.

Pengurangan pemborosan makanan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, bisnis, dan organisasi lainnya. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif sampah pangan pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. ■



Membuang makanan terjadi sepanjang hari mulai dari petani yang memanen, penjual di pasar, sampai makanan yang membusuk pada stok makanan rumah tangga.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Paradoks dan Ironi

INDONESIA menduduki peringkat ketiga sebagai negara terbanyak memproduksi sampah makanan setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kenyataan itu menjadi paradoks sekaligus ironi.

Kenapa? Menurut Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, ketika membuka diskusi yang diadakan Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) pada Rabu, 2 Agustus 2022, di satu sisi Indonesia berupaya menjamin ketahanan pangan untuk mengantisipasi kemarau panjang, menghadapi masalah *stunting*, dan krisis lain yang menyertai, tetapi di sisi lain kita menjadi produsen sampah makanan (*food loss*) terbesar ketiga di dunia.



M/IRAMDANI

Warga makan siang di sebuah wartag di Jakarta, Senin (25/9/2023). Kajian Bappenas bersama sejumlah lembaga menunjukkan bahwa Indonesia membuang sampah makanan sekitar 23 juta-48 juta ton per tahun pada periode 2000-2019 atau setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun. Sampah makanan menumpuk karena bahan makanan mentah yang belum diolah dibuang ketika proses pemilahan.

Pada setiap periode krisis, kata Lestari yang biasa disapa *Re-rie*, bahkan setiap tahun, salah satu langkah antisipasi ialah memastikan ketersediaan pangan. Ironisnya, kita belum menyiapkan langkah untuk mengurangi sampah makanan, malah memproduksi banyak sampah pangan.

Selain itu, tiap tahun pemerintah gencar menyerukan

penurunan angka prevalensi *stunting*. Akan tetapi, tanpa langkah preventif memanfaatkan ketersediaan bahan makanan pokok sebaik-baiknya, angka *stunting* cenderung meningkat, sebab kita tidak memiliki opsi teknologi pengolahan pangan karena pola konsumsi belum berubah.

Kajian Bappenas bersama sejumlah lembaga menunjukkan bahwa Indonesia membuang sampah makanan sekitar 23 juta-48 juta ton per tahun pada periode 2000-2019 atau setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun. Sampah makanan menumpuk karena bahan makanan mentah yang belum diolah dibuang ketika proses pemilahan.

Membuang makanan terjadi sepanjang hari mulai dari petani yang memanen, penjual di pasar, sampai makanan yang membusuk pada stok makanan rumah tangga.

Untuk mengantisipasi masalah *food waste* dan *food loss*, kata legislator NasDem itu, diperlukan kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, universitas, petani, perusahaan, dan pasar. Dengan demikian, dapat ditekan angka sampah makanan sekaligus menyudahi paradoks dan ironi tentang pangan. ■



Dengan adanya gerakan setop boros pangan itu, bangsa ini bisa memanfaatkan pangan tersisa atau berlebih untuk masyarakat sehingga tercipta ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.”

Nyoto Suwignyo

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Badan Pangan Nasional (Bapanas)

3 Perlu Kolaborasi Global

SELURUH negara di dunia berkepentingan menjaga ketahanan pangan masing-masing. Karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi sampah makanan karena sekitar 14% dari total produksi mengalami penyusutan dan 17% terbuang percuma akibat perilaku boros pangan.

“Untuk itu, kita memerlukan kolaborasi global dalam menekan *food loss* dan *food waste* karena berdampak terhadap ketahanan pangan dan gizi,” kata Nyoto Suwignyo, Deputi II Bidang Kerawan-

an Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dalam rantai sistem pangan di Indonesia, kata Nyoto, *food loss* terjadi pada fase produksi, pascapanen, penyimpanan, serta pemrosesan dan pengemasan. Adapun *food waste* terjadi pada fase distribusi, pemasaran, dan konsumsi.

Berdasarkan proses tersebut, tren *food waste* meningkat pada periode 2000-2019, dari 39% pada 2000 menjadi 55% pada 2019. Kehilangan ekonomi terbesar terjadi pada tahapan *food waste* yakni Rp107 triliun-Rp346 triliun per tahun.

Bapanas menawarkan Gerakan Selamatkan Pangan. Gerakan itu, kata Nyoto, untuk menyelamatkan pangan yang berpotensi menjadi *food waste* untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, disertai penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi atau promosi pencegahan terjadinya *food waste*.

Bapanas melakukan dua pendekatan dalam gerakan tersebut. Pertama, mencegah pemborosan. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan maupun upaya promosi dan sosialisasi. Kedua, melakukan berbagai proyek percontohan dalam rangka memfasilitasi penyaluran pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memastikan secara empiris pelaksanaan pengurangan pangan bisa dilakukan.

Dengan adanya gerakan setop boros pangan itu, bangsa ini bisa memanfaatkan pangan tersisa atau berlebih untuk masyarakat sehingga tercipta ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. ■



Sampah makanan dan buah-buahan juga dapat dibuat menjadi pupuk atau bahan untuk mencuci baju, membersihkan lantai, dan bahkan *skin care* jika diolah secara benar.”

Vinda Damayanti

Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK

4 Kerugian hingga Rp500 Triliun

SAMPAH yang tertimbun di tempat pembuangan akhir (TPA) bercampur antara sampah makanan, sampah plastik, sampah kertas, dan lain-lain. Belum terjadi pemilahan dari sumbernya.

Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022, Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Vinda Damayanti, mengatakan, setiap tahun terdapat 69,2 juta ton sampah di Indonesia. Komposisi sampah terbesar ialah sisa makanan, 41,27%, dan terbanyak dari rumah tangga sebesar 38,28%.



M/SUSANTO

Antrean panjang truk pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023). Jika dihitung total, kerugian dari *food loss* dan *food waste* mencapai Rp200 triliun-Rp500 triliun.

Peraturan terkait pengelolaan sampah sudah cukup banyak dengan payungnya UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang diterjemahkan ke dalam dua peraturan pemerintah (PP), yakni PP No. 81/2012 dan PP No. 27/2020, dan seterusnya diturunkan lagi pada peraturan-peraturan menteri. Pada semua peraturan itu sudah ada kewajiban dari tiap-tiap pihak, baik produsen,

masyarakat, maupun pemerintah pusat dan daerah.

Mengutip data FAO dan World Resource Institute 2016, Vinda menyebutkan, negara-negara penghasil *food waste* dan *food loss* terbesar ialah di sekitar Asia Selatan dan Asia Tenggara yaitu sebesar 87%. Adapun dari sisi konsumsi, kontributor terbesar sampah makanan ialah negara-negara Amerika Utara dan Oseania yakni sebanyak 61%.

Makanan yang banyak menjadi *food waste* hampir sama di seluruh negara, yaitu sereal, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, produk susu, daging, ikan, dan lain-lain.

Berdasarkan sebuah penelitian tahun 2016, kata Vinda lagi, dari 25 negara yang diriset, Indonesia menempati urutan kedua terbesar penyumbang *food waste* dan *food loss* setelah Arab Saudi. Namun, berdasarkan riset pada 2021 telah terjadi perbaikan. Dari 78 negara yang diriset, indeks *food loss and waste* Indonesia naik ke level menengah di urutan ke-44. Ini mirip hasil riset Bappenas bahwa tiap orang Indonesia menghasilkan sampah makanan sebesar 115-184 kilogram per tahun.

“Jadi kalau dihitung total kerugian dari *food loss* dan *food waste* ialah sebesar Rp200 triliun sampai Rp500 triliun,” kata Vinda.

Penyebab terjadinya *food waste*, kata Vinda, ialah kurangnya penerapan *good handling practice*, kurang optimalnya ruang penyimpanan pangan sehingga memungkinkan banyak terjadi pembusukan, serta standar kualitas pasar dan preferensi konsumen.

Untuk mengurangi *food waste*, hal penting yang dilakukan ialah membangun perilaku atau gaya hidup minim sampah, gerakan ‘habiskan makananmu’, serta pilah sampah dari rumah.

Selain itu, kata Vinda, perlu pula penguatan regulasi khususnya yang mengatur kelebihan porsi makanan, pelarangan dan pembatasan sampah makanan, penyaluran sisa pangan layak konsumsi serta daur ulang. Di beberapa restoran berlaku aturan jika makanan tidak dihabiskan, konsumen didenda. Regulasi seperti itu perlu untuk mengurangi *food waste* dan *food loss*.

Food waste banyak dimanfaatkan melalui berbagai metode, seperti penyaluran atau donasi atau *food bank*. Dengan metode itu, makanan yang masih layak konsumsi dapat didonasikan melalui *food bank* untuk diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. *Food waste* juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, atau dilakukan *composting* dan dibuatkan ekoenzim.

Sampah makanan dan buah-buahan juga dapat dibuat menjadi pupuk atau bahan untuk mencuci baju, membersihkan lantai, dan bahkan *skin care* jika diolah secara benar.

KLHK, kata Vinda, terus mengampanyekan ‘hidup minim sampah’. Ini harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat. ■



Jika harga pangan terlalu rendah atau tidak memihak petani, petani tidak memiliki kapasitas memelihara tanamannya lalu dibiarkan membusuk.”

Dwi Andreas Santosa

Guru Besar Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor (IPB University)

5 Harga Pangan Memihak Petani

MASALAH sampah makanan menyangkut dua hal besar, yakni *food loss* dan *food waste*. *Food loss* terjadi pada proses produksi sebelum pangan mencapai konsumen. Jadi sangat terkait dengan pertanian dan budi daya pertanian. Adapun *food waste* terjadi pada proses konsumsi ketika pangan sudah sampai di konsumen atau masyarakat.

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB University), Dwi Andreas Santosa, di seluruh dunia sekitar 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahun. Pangan itu hilang di setiap *life cycle* sejak produksi hingga dikonsumsi manusia. Pangan yang hilang itu menjadi sampah.

Di Indonesia, kata Andreas, tersedia beras sekitar 31 juta ton

untuk 278 juta penduduk sehingga konsumsi per kapita sebesar 115,5 kg per tahun. Jika melihat lebih detail, BPS menyebutkan konsumsi per kapita sebanyak 1,45 kg per minggu atau 75,4 kg per kapita per tahun. Itu berarti beras yang dikonsumsi hanya 67% dari produksi. Lalu 33% ke mana? Apakah untuk industri tepung?

Industri tepung beras, misalnya, mengimpor menir untuk memenuhi kebutuhan industri. Pada 2021 impor sudah mencapai 325.000 ton. Lalu ke mana 33% itu? Itulah yang bisa disebut hilang dalam fase produksi.

Sistem pangan global, tambah Andreas, menyumbang sekitar 30% emisi gas rumah kaca. Jika diasumsikan sebagai negara, sampah pangan menjadi penyumbang CO₂ ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.

Soal emisi gas, negara-negara produsen padi seperti Indonesia kerap dituduh negara-negara Barat bahwa sawah mengeluarkan emisi metana (CH₄) yang sangat besar. Kita pun, kata Andreas, bisa menuduh balik negara-negara besar pemelihara sapi bahwa dari perut sapi juga keluar gas metana.

Dampak kerugian akibat sampah pangan terhadap ekonomi global mencapai sekitar US\$1 triliun, jauh melampaui APBN Indonesia.

Konsep penanganan *food waste* dan *food loss* hanya *copy paste* dari negara maju, padahal persoalannya sangat berbeda. Di negara maju 61% *food waste* memang terjadi di fase konsumsi. Sebaliknya di Indonesia, 69% *food waste* terjadi di proses produksi.

Karena itu, mestinya penanganannya berbeda, bukan *copy paste*.

Karena *food waste* di Indonesia terjadi di proses produksi, maka kebijakan pemerintah harus menasar petani yakni harga pangan. Jika harga pangan terlalu rendah atau tidak memihak petani, petani tidak memiliki kapasitas memelihara tanamannya lalu dibiarkan membusuk.

“Di jaringan kami di Garut, misalnya, tomat dan cabai dibiarkan saja di lahan dan hilang semua, karena biaya untuk panen saja lebih mahal dibandingkan harga jualnya,” kata Andreas.

Masih menurut Andreas, tidak ada dalam literatur mengenai strategi penanganan *food waste* melalui kebijakan harga. Karena itu, yang mesti terus didorong ialah kebijakan harga yang berpihak kepada petani. Sementara saat ini kebijakan pangan di Indonesia terlalu berpihak kepada konsumen. ■



Di desa atau di kampung-kampung, kalau nasi berlebih, akan dijemur lalu menjadi rengginang. Jadi, di desa nyaris tidak ada pangan yang terbuang begitu saja. Dengan demikian, kearifan ekonomi sirkular itu sudah lebih dahulu dipraktikkan masyarakat desa.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

6 Penguatan Regulasi

PENGELOLAAN sampah secara umum di Indonesia telah mempunyai payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, menurut anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania, perangkat UU tersebut beserta aturan turunannya belum maksimal diterapkan di daerah.

Pemerintah daerah memang diberikan ruang dan kewenangan untuk menentukan secara leluasa pengelolaan sampah, misalnya terkait dengan sanksi dan denda.

Contohnya, cerita legislator NasDem dari Dapil Kalimantan

Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu, ketika berada di suatu wilayah atau tempat wisata, ada tulisan larangan membuang sampah disertai sanksi kurungan ataupun denda. Namun, ironisnya justru di sekitar tulisan itu ada timbunan sampah.

“Terkadang saya bertanya bagaimana *habit* masyarakat kita? Bagaimana penerapan regulasi yang sudah dibuat pemerintah pusat tetapi tidak linier sampai ke daerah?” kata Yessy.

Penanganan sampah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Karena itu, semua *stakeholder* harus duduk bersama mengkaji regulasi yang ada terkait dengan domain produsen, domain distributor, domain konsumen, atau terkait pengelolaan industri hulu sampai hilir.

Mengenai anggaran, kata Yessy, KLHK belum mendapatkan anggaran yang cukup, apalagi menghadapi persoalan dan tantangan lingkungan hidup secara global. Selain itu, setiap daerah mengalokasikan anggaran untuk lingkungan hidup tidak lebih dari 0,5% APBD. Dinas terkait di daerah yang mengurus masalah sampah juga belum dijadikan dinas strategis, atau belum menjadi prioritas jika dibandingkan dengan dinas PUPR, dinas pendidikan, atau dinas kesehatan.

Khusus perihal sampah makanan yang sedang menjadi isu global, kata Yessy, seluruh pihak perlu melakukan gerakan bersama secara masif dan kolektif untuk menyadarkan masyarakat mengenai penyelamatan bumi. Lembaga-lembaga pendidikan ha-

rus dilibatkan melalui kurikulum yang peduli tentang lingkungan hidup, juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, yang perlu terus-menerus mengomunikasikan tentang kebersihan sebagai cerminan iman.

Soal penguatan regulasi juga disampaikan Khudori, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang sampah secara umum, bukan sampah makanan. Karena itu, perlu regulasi yang lebih kuat mengenai sampah makanan.

Menurut Khudori, mengenai sampah pangan itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu menyangkut hal yang bisa dicegah dan hal yang harus dikelola. Kehilangan panen, makan berlebihan atau belanja berlebihan, bisa dicegah dengan teknologi atau advokasi. Adapun makanan sisa dan masih layak harus dikelola supaya tetap bisa dimanfaatkan.

Pasar Induk Sayur dan Buah Tangerang, kata Khudori, tiap hari menangani kira-kira 3.000-4.000 ton sayur dan buah. Dari jumlah itu, kira-kira 60 ton-80 ton menjadi sampah yang terbuang karena macam-macam. Bisa karena tidak lolos *grading*, rusak, atau kelebihan dan tidak terserap. Bapanas sudah mulai menangani itu dengan beberapa terobosan, dan itu perlu didukung serta diperkuat.

Dalam mengurangi *food loss* dan *food waste*, tambah Khudori, dilakukan melalui pendekatan ekonomi sirkular sebagai strategi baru mengatasi dampak perubahan iklim untuk meningkatkan



MIRAMDANI

Tumpukan sampah di tepi Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Tangerang, Banten, Senin (24/4/2023). Indonesia masih tertinggal dalam mengelola *food loss* dan *food waste* dibanding dengan negara lain. Kendala yang dihadapi antara lain belum tumbuhnya kesadaran masyarakat, termasuk pelaku usaha.

ketahanan pangan. Selain itu, bisa menjadi sumber pendapatan baru, nilai tambah baru yang menghemat devisa karena dari pangan terbuang itu tak sedikit yang bersumber dari impor.

Kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memang tertinggal dalam mengelola *food loss* dan *food waste*. Kendala yang dihadapi antara lain belum tumbuhnya kesadaran masyarakat,

termasuk pelaku usaha. Masyarakat juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya peluang baru terkait pendekatan ekonomi sirkular dalam mengatasi dan mencegah *food loss*. Karena itu, penting langkah advokasi dan pendampingan yang melibatkan aktor-aktor perubahan yang mengikutsertakan perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya.

Penerapan ekonomi sirkular pada rantai pangan mulai dari produsen hingga konsumen merupakan pintu masuk pengembangan *green economy* dan *blue economy* seperti yang didorong pemerintah akhir-akhir ini.

Untuk menjadi gerakan nasional yang konsisten dan berkelanjutan dalam mencegah *food loss* dan *food waste*, tambah Khudori, perlu ada dukungan dan penguatan regulasi.

Wartawan senior Saur Hutabarat, saat menutup diskusi, mengatakan *food waste* yang terjadi di level konsumsi cenderung menjadi urusan orang perkotaan. Di desa atau di kampung-kampung, kalau nasi berlebih, akan dijemur lalu menjadi rengginang. Jadi, di desa nyaris tidak ada pangan yang terbuang begitu saja. Dengan demikian, kearifan ekonomi sirkular itu sudah lebih dahulu dipraktikkan masyarakat desa.

Meski demikian, Saur menegaskan perlu ada kebijakan mengenai sampah pangan karena terlampau banyak pangan yang terbuang sebelum maupun sesudah panen.

Menyangkut konsumen, kata Saur, filsafat 'berhenti makan sebelum kenyang' mesti menjadi pandangan hidup bersama. ■



Catatan Moderator

Sampah Makanan Pemborosan Pangan

Oleh: **Muchtar Luthfi Mutty**

DATA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020 menyebutkan 39,8% sampah yang diproduksi oleh penduduk Indonesia berasal dari sampah makanan.

Secara ekonomi, sampah pangan sebanyak itu tentunya merupakan sebuah pemborosan. Jika dinominalkan, tingkat pemborosan makanan rata-rata orang Indonesia mencapai Rp2,1 juta per kapita per tahun, dengan nilai Rp330 triliun.

Data tersebut menunjukkan ada ketimpangan yang cukup memprihatinkan. Di satu sisi, masih terdapat 8,34% penduduk yang kekurangan pangan, di sisi lain terjadi pemborosan yang sangat tinggi. Tingginya pemborosan pangan itu menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 113 negara yang disurvei. Untuk tingkat ASEAN, kita berada di bawah negara-negara ASEAN berdasarkan data *Global Food Security Index* (GFSI). Itu sebabnya integrasi pengelolaan *food loss and waste* menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun dari aspek lingkungan, sampah pangan memberi kontribusi yang cukup signifikan atas timbulnya gas metana atau gas

rumah kaca. Metana berpotensi 21 kali lebih besar dapat memicu pemanasan global jika dibandingkan dengan CO₂.

Atas dasar itu, diskusi mingguan yang diselenggarakan setiap Rabu oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada edisi 156, Rabu, 2 Agustus 2023, mengangkat tema *Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia*.

Diskusi yang digagas Ibu Dr. Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah, menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya. Antara lain, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M. (Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional), Vinda Damayanti (Direktur Pengurangan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, PSLB3, KLHK) dan Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa (Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor/IPB University).

Di bagian penanggap ada Yessy Melania, S.E. (anggota Komisi IV DPR RI) dan Khudori, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Dan, seperti biasa, diskusi ditutup dengan *closing remark* dari wartawan senior, Opung Saur Hutabarat.

Pada kesempatan diskusi, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan bahwa sampah pangan di Indonesia 69% sejatinya disumbang oleh *agriculture productions, handling and storage*. Proses konsumsi hanya menyumbang 13% sampah pangan di Tanah Air.

Dari fakta yang diungkap Prof. Dwi Andreas itu, seharusnya

untuk menekan sampah pangan, kebijakan sektor pertanian saat ini lebih berpihak kepada petani agar sejumlah tahapan produksi pangan bisa lebih efisien sehingga minim sampah.

Ironisnya, upaya pengurangan sampah pangan di Indonesia malah berfokus pada sisi konsumen.

Upaya kurang tepat itu pula yang diduga menjadi penyebab hingga Mei 2023 Indonesia masih menduduki peringkat ketiga sebagai negara terbanyak memproduksi sampah makanan setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Ketidaksesuaian tindakan dengan fakta di lapangan menyebabkan persoalan dampak sampah makanan berlarut-larut. Dengan demikian, sangat dibutuhkan keseriusan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menegakkan tata kelola sampah makanan yang baik di Tanah Air. ■

Ancaman Krisis Pangan Dampak Perang Ukraina-Rusia

Oleh: **Radityo Fajar Arianto**

MASALAH pangan adalah masalah global yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat mengatakan dalam sambutannya bahwa perlu suatu kebijakan pemerintah yang dapat mewujudkan kedaulatan pangan di dalam negeri. Narasumber pertama, Prof. Dr. Bayu Krinamurti, yang pernah menjabat sebagai wakil menteri pertanian dan perdagangan periode lalu, menyoroti bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah lewat bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi komoditas pada konsumen yang merupakan target subsidi, sebagai langkah antisipasi naiknya harga-harga beberapa komoditas pangan strategis. Tantangannya ialah kemampuan pendanaan dan efektivitas pembagian di lapangan agar tidak disalahgunakan.

Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, mengungkapkan pentingnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Infrastruktur pertanian selama 2014 sampai 2022 mengalami perbaikan yang luar biasa dengan adanya pembangunan waduk, saluran irigasi, embung, dan lain-lain.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, menggarisbawahi antisipasi dampak perang Ukraina-Rusia terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Ada dua ancaman besar, yaitu kondisi geopolitik dan perubahan iklim. Beberapa kebijakan dapat ditujukan untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang mengancam pasokan dan menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas. Beberapa komoditas pangan strategis perlu mendapatkan perhatian, dari bantuan pupuk, peningkatan produktivitas, perencanaan impor, dan jalur distribusi. Perlu melakukan inovasi untuk menjaga komoditas pangan strategis, kemudian melakukan integrasi dengan industri lain seperti industri pakan ternak yang membutuhkan bahan baku turunan dari industri pangan strategis. Prof. Dr. Bustanul juga mengingatkan bahwa kebijakan antisipasi jangka pendek seperti pembagian BLT dan sejenisnya harus diawasi dengan sangat hati-hati agar tepat sasaran. Pemerintah pun perlu memberi insentif bagi petani yang mampu meningkatkan kualitas produksi pangan yang dapat mencapai level premium. Hal ini penting agar petani termotivasi untuk mengembangkan proses dan teknologi produksi pangan dengan lebih baik lagi.

Westri Susilowati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, memerinci antisipasi dalam jangka pendek berupa pemetaan kondisi neraca pangan, pemetaan kapasitas produksi, dan pengaturan distribusi. Ketiga hal itu akan digunakan sebagai upaya persuasif melalui operasi pasar yang

bertujuan menjaga kecukupan pangan dan kestabilan harga. Dalam jangka panjang perlu revitalisasi pertanian, diversifikasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan teknologi. Hal ini semua akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengedukasi pola konsumsi masyarakat yang selalu berubah.

Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang hadir sebagai penanggap diskusi, berpendapat bahwa pemerintah harus secara ketat mengendalikan harga. Hal itu harus dilakukan mulai hulu sampai hilir, berbagai data struktur biaya harus dipakai oleh pemerintah untuk melakukan analisis yang tepat dalam pengendalian harga. Hal tersebut dikonfirmasi oleh penanggap kedua, Dr. Luthfi Mutty, seorang pengusaha di industri pertanian. Ia menggarisbawahi bahwa petani adalah fondasi kekuatan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Jika petani diberikan bantuan dan diorganisasi melalui kelompok-kelompok tani, Indonesia tidak perlu khawatir akan ancaman krisis pangan. Sebagai penutup, wartawan senior *Media Indonesia*, Saur Hutabarat, kembali mempertegas bahwa keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani merupakan hal yang krusial. Bantuan pendanaan, pupuk, bibit, teknologi adalah keharusan jika pemerintah ingin mewujudkan kedaulatan pangan. ■

Ketahanan Pangan

Oleh: **Arimbi Heroepoetri**

KETAHANAN pangan selalu disandingkan dengan kedaulatan pangan. Keduanya sama-sama ingin memenuhi kebutuhan pangan warga, tetapi cara memenuhinya berbeda. Rezim ketahanan pangan lebih mementingkan pangan tersedia di pasar.

“Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tecermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.”¹

Adapun kedaulatan pangan, selain mementingkan ketersediaan pangan, juga memperhatikan produksi dan budaya lokal.

“Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangan sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis keluarga, yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.”²

Singkat kata, ketahanan pangan membolehkan impor pangan, sedangkan kedaulatan pangan anti terhadap impor pangan. Di sinilah letak permasalahannya. Dalam sejarah pengadaan pangan Indonesia, impor pangan masih terus terjadi sampai sekarang. Kalaupun pernah tercatat swasembada pangan (baca: beras), itu didapat melalui apa yang disebut sebagai ‘revolusi hijau’ yang digadang-gadang oleh Presiden kedua RI Soeharto. Namun, sesudah itu kita kembali masuk ke kubangan impor pangan sampai sekarang.

Dalam 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah menghabiskan US\$84,8 miliar atau setara Rp1,272 triliun untuk hanya berbelanja enam dari sembilan barang kebutuhan pokok (sembako), yaitu beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula, dari pasar internasional. Buah dan sayuran serta komoditas bahan pangan utama lainnya, seperti gandum, kedelai, dan jagung, sangat bergantung pada impor. Negara se subur Indonesia bahkan mengalami defisit perdagangan buah dan sayuran rata-rata Rp19 triliun per tahun.³

Impor bahan pangan bukan hanya membahayakan neraca keuangan negara, tetapi juga memicu kerentanan bahan pangan karena pengadaan pangan menjadi sangat tergantung pasar internasional. Jika terjadi sesuatu dengan pasar internasional, akan berpengaruh pada pengadaan pangan di Indonesia. Kondisi ini juga yang mendorong Indonesia menempati posisi ke-10 di Asia dan Pasifik dan ke-60 di dunia dalam hal ketahanan pangan pada *The Global Food Security Index 2022*.⁴

Lantas apakah mengimpor bahan pangan menjadi tidak boleh? Tentu saja boleh. Akan tetapi, harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan kuat, seperti dalam kondisi darurat ketika pandemi covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia di 2020. Pada saat itu kewajiban negara ialah menyediakan pangan yang cukup sampai tingkat rumah tangga. Bila memang diperlukan dengan melakukan impor. Namun, jika kondisi darurat sudah lewat, seyogianya menekan impor pangan sebanyak mungkin haruslah diupayakan dengan sungguh-sungguh. ■

¹ <https://pu.go.id/berita/ketahanan-pangan-untuk-kesejahteraan-masyarakat-dan-petani#:~:text=Ketahanan%20pangan%20merupakan%20suatu%20kondisi,aman%2C%20merata%2C%20dan%20terjangkau.>

² <https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/>

³ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230704185303-128-451320/indonesia-negara-darurat-impor-pangan>

⁴ *ibid*



Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A. lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■

**MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING**

ISBN 978-623-6165-13-3



9 786236 165133